

## Bab 7.5: Pelanggaran Hukum Perang

<a href="#">Bab 7.5: Pelanggaran Hukum Perang</a> .....	1
<a href="#">Bab 7.5: Pelanggaran Hukum Perang</a> .....	3
<a href="#">7.5.1. Pendahuluan</a> .....	3
<a href="#">7.5.2 Standar yang relevan</a> .....	6
<a href="#">7.5.3 Pelanggaran Hukum Perang oleh Pasukan Militer Indonesia</a> .....	7
<a href="#">7.5.4 Pelanggaran Hukum Perang oleh Fretilin/Falintil</a> .....	46
<a href="#">7.5.5 Temuan</a> .....	51



## Bab 7.5: Pelanggaran Hukum Perang

### 7.5.1. Pendahuluan

1. Mandat Komisi mewajibkan Komisi untuk membuat laporan mengenai pelanggaran hak-hak asasi manusia, termasuk pelanggaran hukum humaniter internasional. Hukum ini sering disebut hukum perang, atau hukum konflik bersenjata.<sup>1</sup>
2. Banyak pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi selama periode mandat 1974-1999, juga merupakan pelanggaran standar-standar hak asasi manusia internasional dan karenanya telah dibahas dalam bab-bab lain dalam Laporan ini. Tujuan utama bab ini adalah untuk melaporkan pelanggaran hukum perang yang tidak dicakup oleh bab-bab lainnya. Ini termasuk kelalaian penempur untuk melindungi penduduk sipil, tawanan perang, dan orang-orang yang terluka serta kelompok orang-orang yang dilindungi lainnya, tidak membedakan antara sasaran sipil dan militer selama operasi militer, perekrutan paksa, penghancuran secara sengaja atas harta penduduk sipil, penggunaan senjata ilegal seperti senjata kimia, dan pelanggaran aturan-aturan lainnya terkait pelaksanaan operasi militer.
3. Bagian ini sangat mengandalkan sumber informasi tangan pertama yang dikumpulkan Komisi selama proses pengambilan pernyataan dan lokakarya Profil Komunitas di desa-desa, dan melalui wawancara-wawancara mendalam. Karena pelanggaran hukum perang, seperti pembunuhan dan penyiksaan penduduk sipil, juga merupakan pelanggaran standar hak asasi manusia internasional lainnya, terdapat sedikit pengulangan antara bab ini dengan bagian-bagian lainnya dalam Laporan ini.
4. Bukti yang dipertimbangkan Komisi di dalam bab ini dan bab-bab lainnya memberikan gambaran tentang pelanggaran hukum perang berskala luas dan sistematis oleh pasukan keamanan Indonesia selama invasi Timor-Leste dan masa-masa pendudukan sesudahnya, termasuk program intimidasi, kekerasan dan penghancuran terkait dengan Konsultasi Rakyat pada tahun 1999.
5. Tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran tidak bisa disamakan antara militer Indonesia (ABRI/TNI) dan Fretilin/Falintil, tindakan kedua pasukan bersenjata memunculkan pelanggaran yang sangat beragam, dan menyebabkan penderitaan luar biasa di antara penduduk sipil Timor-Leste. ABRI/TNI dan kelompok binaannya jelas menjadi pelaku utama dalam hal ini. Fretilin/Falintil menyebabkan penderitaan dan kematian di antara penduduk sipil. Meski dalam banyak hal sangat berat, pelanggaran oleh Fretilin/Falintil hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan jumlah pelanggaran.
6. Kewajiban humaniter umum yang berlaku dalam situasi konflik bersenjata internal dilanggar baik oleh anggota Fretilin/Falintil maupun UDT selama periode konflik politik pada tahun 1975. Pelanggaran-pelanggaran ini, seperti pembunuhan, penahanan dan penyiksaan penduduk sipil dan tahanan telah dibahas secara komprehensif di bab-bab bersangkutan mengenai topik ini, dan di Bagian 8: Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban. Karena itu peristiwa perang sipil tidak dibahas secara mendalam di bab ini, meski di bawah disajikan ulasan singkat (lihat terutama di Bagian 3: Sejarah Konflik; Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa; Bab 7.3: Pemandahan Paksa dan Kelaparan; Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Perlakuan Buruk; Bab 7.8: Hak Anak).
7. Pada tanggal 11 Agustus 1975 UDT melancarkan aksi bersenjata yang oleh banyak kalangan disebut Gerakan 11 Agustus. Latar belakang dan penjelasan rinci mengenai aksi bersenjata ini dibahas secara mendalam di Bagian 3: Sejarah Konflik. Mário

Lemos Pires, Gubernur Portugis di Timor saat itu, menjelaskan kepada Komisi bahwa UDT mengambil alih kekuasaan memakai senjata yang diambil dari polisi Portugis.<sup>2</sup> Para pemimpin Fretilin mundur ke markas besar mereka di bukit Aileu, di selatan Dili. UDT menangkap anggota-anggota Fretilin di distrik di seluruh negeri dan menahan mereka (lihat Bab 7.4.: Penahanan, Penyiksaan dan Perlakuan Buruk). Upaya pemerintah Portugis untuk merundingkan penyelesaian gagal, dan pada tanggal 20 Agustus Fretilin melancarkan aksi bersenjata balasan, yang oleh banyak kalangan masyarakat disebut kudeta balasan. Kekerasan pecah di semua distrik selama beberapa minggu, dan pada akhir bulan September Fretilin praktis menguasai seluruh wilayah negeri ini. Para anggota UDT, Apodeti, dan partai-partai kecil Trabhalista dan KOTA serta keluarga mereka melarikan diri ke barat menuju perbatasan. Fretilin menahan ratusan anggota UDT, dan pada bulan Oktober juga menahan anggota Apodeti. Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Perlakuan Buruk membahas peristiwa ini secara mendalam.

8. Penduduk Timor-Leste yang melarikan diri ke wilayah perbatasan berada di bawah pengaruh militer Indonesia dan intel-intelnya, dan banyak yang bergabung dengan pasukan partisan yang dilatih oleh militer Indonesia sejak akhir 1974. Serangan lintas batas mulai pada akhir bulan Agustus, yang dilakukan oleh gabungan antara pasukan partisan ini dan pasukan reguler Indonesia.

9. Pada tanggal 15 Oktober, militer Indonesia melancarkan serangan skala penuh dengan dukungan dari laut dan udara, dan menduduki kota-kota seperti Batugade dan Balibo (Bobonaro) di Timor-Leste. Serangan di Balibo termasuk pembunuhan 5 wartawan internasional (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa).

10. Setelah pasukan Indonesia menduduki kota-kota sampai jauh ke timur seperti Atabae (Bobonaro), dan Pemerintah Portugis tetap di pulau Ataúro tanpa memperdulikan permintaan Fretilin untuk kembali, dan pembicaraan internasional antara Portugal dan Indonesia tidak mempertimbangkan realitas pasukan Indonesia yang menduduki kota-kota Timor-Leste, Fretilin menjadi semakin membutuhkan intervensi dan dukungan internasional untuk melindungi wilayahnya dari agresi asing. Fretilin mengumumkan kemerdekaan secara sepihak pada tanggal 28 November 1975.

11. Dengan dukungan Parlemen Nasional, militer Indonesia melancarkan invasi skala penuh ke Timor-Leste pada tanggal 7 Desember 1975. Pimpinan Fretilin mundur ke pedalaman. Banyak penduduk sipil melarikan diri dari militer Indonesia yang datang menyerbu atau dipaksa oleh Fretilin untuk melarikan diri ke pedalaman dengan mereka (lihat Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan). Penduduk sipil ini menderita luar biasa di pedalaman, selama perang yang berlangsung setelah itu.

12. Selama invasi, pasukan bersenjata Indonesia melakukan pelanggaran hukum perang dengan membunuh penduduk sipil di Dili pada tanggal 7 dan 8 Desember 1975 (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa).

13. Selama operasi militer skala besar setelah itu, di seluruh wilayah Timor-Leste, militer Indonesia tidak membedakan antara penduduk sipil dan para penempur, dan mengerahkan kekuatan militer mereka yang besar untuk membunuh penduduk sipil tidak bersenjata dalam jumlah besar, termasuk laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Penduduk sipil secara khusus menjadi sasaran dalam operasi untuk memaksa mereka menyerahkan diri dari wilayah-wilayah yang dikuasai Fretilin/Falintil (lihat Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan). Jarang sekali penduduk sipil diberi peringatan lebih dahulu sebelum operasi militer dilancarkan.

14. Anggota ABRI/TNI secara rutin membunuh, menyiksa dan memperkosa penduduk sipil dan tahanan yang ditangkap atau menyerah selama tahun-tahun awal penyerbuan dan resistensi. Militer Indonesia menggunakan semua cara yang ada untuk mematahkan resistensi terhadap invasi dan pendudukan. Pada tahun 1976, 1977 dan 1978 pelanggaran-pekerjaan ini bersifat luas dan sistematis. Ini termasuk penghancuran sistematis dan penjarahan harta

penduduk sipil, termasuk bangunan, rumah dan barang pribadi, penghancuran sumber makanan, dan pengerahan senjata yang dilarang oleh hukum internasional yang mengatur konflik bersenjata. Alat yang digunakan termasuk senjata kimia yang meracuni sumber air, mematikan tanaman dan tumbuhan lainnya, dan bom napalm dan alat-alat pembakar lain, yang efeknya membakar semuanya termasuk setiap orang dalam radiusnya tanpa pandang bulu, termasuk penduduk sipil laki-laki, perempuan dan anak-anak.

15. Resistensi yang dipimpin oleh Fretilin/Falintil pada tahun-tahun awal setelah invasi merumuskan sebuah ideologi yang bertujuan untuk membangun suatu revolusi sosial berdasarkan transformasi penduduk sipil, yang tinggal di wilayah pedalaman yang dikuasai oleh para pemimpin politik dan bersenjata (lihat Bagian 5: Resistensi: Struktur dan Strategi). Sejalan dengan meningkatnya skala serangan militer Indonesia dan yang semakin mendesak wilayah kekuasaan Fretilin/Falintil, perpecahan di antara pemimpin Fretilin mulai terjadi. Ini mendorong adanya pembersihan dengan kekerasan dalam tubuh partai pada tahun 1977. Fretilin/Falintil bertanggung jawab atas pelanggaran seperti penahanan dan penyiksaan penduduk sipil dan tahanan lainnya seperti anggota Falintil, dan atas pembunuhan tahanan (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik; Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa; Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Perlakuan Buruk). Semua ini dilakukan secara terorganisir dan sistematis.

16. Setelah serangan militer Indonesia menghancurkan basis-basis Fretilin/Falintil di gunung (*bases de apoio* atau basis pendukung) pada akhir tahun 1978, yang mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi ribuan penduduk sipil yang tinggal di wilayah-wilayah ini, para pemimpin politik dan militer Resistensi yang selamat melakukan perubahan strategi secara besar-besaran. Perubahan mendasar ini merubah hubungan antara resistensi bersenjata dan penduduk sipil, yang sebagian besar pada awalnya ditahan di kamp penampungan dan pusat-pusat penahanan sementara dan kemudian bisa tinggal di kota-kota dan desa-desa. Pada dekade 1980-an sebuah struktur dan jaringan klandestin besar dibentuk untuk mendukung resistensi gerilya bersenjata (lihat Bagian 5: Resistensi: Struktur dan Strategi). Selama periode ini Fretilin/Falintil melanggar hukum perang dengan menyerang penduduk sipil, membakar rumah-rumah dan mencuri bahan makanan dari penduduk sipil yang dicurigai bekerja sama dengan pasukan bersenjata Indonesia.<sup>3</sup>

17. Anggota ABRI/TNI secara sistematis melakukan perekrutan paksa penduduk sipil untuk dilibatkan dalam operasi militer mereka melawan resistensi bersenjata. Operasi paling besar melibatkan perekrutan paksa lebih dari 60.000 penduduk sipil selama bulan-bulan Operasi Kikis pada tahun 1981 (lihat bagian tentang perekrutan paksa ABRI/TNI untuk kegiatan militer, di bawah). Lebih lanjut, sudah menjadi praktek militer yang rutin untuk memaksa penduduk sipil untuk melayani dengan membawakan senjata dan amunisi dan memasak, membersihkan dan melayani kebutuhan pribadi penguasa militer. Orang-orang yang direkrut paksa, kebanyakan anak-anak, diperlakukan dengan buruk dan sering menjadi sasaran perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan.

18. Selama tahun-tahun pendudukan dan resistensi, ABRI/TNI secara teratur memberikan hukuman kolektif kepada penduduk sipil, termasuk membunuh, memperkosa dan menyiksa anggota keluarga dan penduduk sipil yang menjadi anggota kelompok masyarakat yang sama dengan orang yang dicurigai mendukung Fretilin/Falintil. Praktek luas terhadap penduduk sipil ini terutama kejam setelah Falintil melakukan operasi militer terhadap sasaran-sasaran ABRI (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa; Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Perlakuan Buruk).

19. Pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil termasuk eksekusi tahanan dan pembunuhan penduduk sipil, terutama yang dicurigai bekerja sama dengan militer Indonesia. Anggota Fretilin/Falintil menyiksa dan membunuh anggotanya sendiri yang tidak setuju dengan kebijakan Komite Sentral Fretilin. Mereka juga membakar rumah orang yang dicurigai sebagai kolaborator, dan merampas harta benda mereka (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di

Luar Hukum dan Penghilangan Paksa; Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan; Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Perlakuan Buruk).

20. Para perempuan dan gadis Timor yang ditahan sebagai tahanan, atau dipaksa bekerja untuk anggota ABRI/TNI, secara rutin diperkosa dan dipaksa menjadi budak seksual, termasuk 'diberikan' dari satu perwira ke perwira lain pada masa akhir tugas di wilayah ini (lihat Bab 7.7: Kekerasan Seksual).

21. Sejalan dengan semakin terlibatnya pemuda kota dengan Resistensi pada akhir dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, dan demonstrasi terbuka menjadi bentuk baru aksi Resistensi, ABRI/TNI melakukan pelanggaran terhadap penduduk sipil. Pembantaian Santa Cruz merupakan contoh paling terkenal mengenai militer Indonesia yang menembakkan senjata ke penduduk sipil tidak bersenjata yang terlibat dalam demonstrasi damai, yang mengakibatkan banyak orang meninggal dan luka parah (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa).

22. Selama dekade 1990-an ABRI/TNI bertanggung jawab atas berlanjutnya praktek penahanan dan penyiksaan penduduk sipil, biasanya mereka yang dicurigai terlibat jaringan klandestin Resistensi. Praktek ini terutama ditujukan terhadap pemuda yang semakin terlibat dalam Resistensi selama periode ini. Praktek ini termasuk pembunuhan dan penghilangan mereka yang ditahan (lihat Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Perlakuan Buruk; Bagian 10: *Acolhimento* (Penerimaan) dan Dukungan kepada Korban).

23. Pada akhir tahun 1998 dan awal tahun 1999, ABRI/TNI membentuk milisi bersenjata di seluruh wilayah Timor. ABRI/TNI menjalankan program perekrutan paksa secara sistematis di antara ribuan pemuda Timor untuk bergabung dengan kelompok-kelompok ini, disamping mereka yang bergabung secara sukarela (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik; Bagian 9: Rekonsiliasi Komunitas). Pasukan keamanan Indonesia dan milisi binaannya bertanggung jawab atas berbagai macam pelanggaran hukum perang, termasuk pembunuhan, perkosaan, penyiksaan dan penghancuran besar-besaran secara sengaja harta milik penduduk sipil di seluruh wilayah Timor-Leste setelah Konsultasi Rakyat (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa; Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan; Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Perlakuan Buruk; Bab 7.7: Kekerasan Seksual).

#### 7.5.2 Standar yang relevan.

24. Standar yang digunakan oleh Komisi berkaitan dengan hukum internasional mengenai konflik bersenjata dibahas secara rinci di Lampiran Bab 2: Mandat Komisi. Sebagian besar prinsip hukum yang relevan dengan konflik di Timor-Leste diambil dari Konvensi-konvensi Jenewa, dimana Indonesia dan Portugal adalah negara pesertanya, dan dari hukum kebiasaan internasional. Aturan-aturan yang paling fundamental tercermin dalam empat prinsip dasar berikut ini:<sup>4</sup>

1. Kekuatan tersebut hanya digunakan sejauh diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah (prinsip keperluan militer).
2. Semua tindakan yang diambil harus sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.\*
3. Serangan hanya boleh dilancarkan terhadap sasaran militer, dan dengan cara yang meminimalkan kerugian pada penduduk sipil dan obyek-obyek sipil. Serangan sama sekali tidak boleh dengan sengaja diarahkan kepada penduduk sipil dan obyek sipil (prinsip pembedaan).

---

<sup>4</sup> Prinsip kemanusiaan yang paling terkenal tercermin dalam Klausula Martens yang ada dalam mukadimah Konvensi Den Haag (IV) Mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Daratan tahun 1907.

4. Bilamana suatu serangan mungkin mengakibatkan korban sipil yang tidak disengaja, serangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kerugian terhadap warga sipil dan obyek sipil tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapat (prinsip proporsionalitas).

25. Standar-standar ini berlaku bagi pasukan militer Indonesia. Standar-standar ini juga berlaku bagi Falintil, yang bisa diakui dalam hukum humaniter internasional sebagai gerakan resistensi karena memenuhi secara umum syarat untuk pengakuan tersebut: Falintil mempunyai struktur komando; anggotanya membedakan diri dengan penduduk sipil, mereka membawa senjata secara terbuka; dan melakukan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

26. Bahkan dalam hal dimana Komisi mempunyai akses penuh ke semua bukti faktual, hal ini tidak selalu memungkinkan untuk membedakan antara keadaan dimana penduduk sipil secara langsung dan sengaja dijadikan sasaran, dan keadaan dimana penduduk sipil terbunuh atau terluka dalam pertempuran yang tidak secara langsung menjadikan mereka sasaran. Dalam banyak operasi militer yang diperiksa oleh Komisi dalam Laporan ini, Komisi menemukan bahwa serangan tidak memperdulikan dampaknya terhadap penduduk sipil, atau tidak sesuai dengan keperluan militer, dan karena itu merupakan pelanggaran hukum perang. Khususnya, bukti-bukti yang dipaparkan dalam bab ini dan yang dibahas lebih mendalam di dalam bab-bab bersangkutan di Laporan ini, menunjukkan bahwa ABRI/TNI secara sistematis mengabaikan dan secara sengaja melanggar kewajibannya untuk melindungi penduduk sipil Timor-Leste sesuai dengan Konvensi Jenewa dimana Negara Republik Indonesia menandatangani.

### 7.5.3 Pelanggaran Hukum Perang oleh Pasukan Militer Indonesia

#### **Serangan terhadap warga sipil dan harta benda sipil**

27. Hukum internasional tentang konflik bersenjata dengan jelas menyatakan bahwa serangan tidak boleh ditujukan kepada penduduk sipil, objek-objek sipil, atau kota atau bangunan yang tidak dipertahankan.<sup>5</sup> Selain itu tindakan-tindakan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror di antara penduduk sipil juga dilarang.<sup>6</sup>

28. Serangan tidak boleh dilancarkan dengan cara atau dengan menggunakan senjata yang tidak memungkinkan untuk membedakan sasaran sipil dan sasaran militer.<sup>7</sup>

29. Korban sipil insidental dan kerusakan objek sipil yang disebabkan oleh serangan terhadap sasaran militer diperbolehkan hanya selama serangan tidak berlebihan dalam kaitannya dengan keperluan militer dalam serangan tersebut.<sup>8</sup> Serangan harus dijalankan dengan cara yang menekan korban sipil dan kerusakan objek sipil.<sup>9</sup> Bilamana mungkin, peringatan dini harus diberikan kepada penduduk sipil mengenai serangan yang mungkin melukai penduduk sipil.<sup>10</sup>

30. Sub-bab ini akan membahas pelanggaran hukum perang oleh ABRI/TNI pada tahun-tahun awal konflik.

31. Mulai bulan Agustus 1975, ABRI/TNI melakukan serangan-serangan lintas batas di Timor-Leste, termasuk pembunuhan penduduk sipil dan penghancuran harta benda penduduk sipil (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa). Pada tanggal 15-16 Oktober, pasukan bersenjata Indonesia meningkatkan operasi, termasuk pemboman dari udara dan laut dalam skala besar di dalam wilayah Timor-Leste. Serangan-serangan ini memakan korban sipil dan menghancurkan harta benda penduduk sipil.

---

<sup>5</sup> Artikel 1, Peraturan Den Hague 1907; Aturan hukum humaniter mengikat kelompok non-negara yang terlibat konflik: Liesbeth Zegveld, *The Accountability of Armed Opposition Groups in International Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, hal. 9-38. Lihat juga Bagian 2: Mandat Komisi, Lampiran A.

32. Serangan skala penuh dimulai pada tanggal 7 Desember 1975, dengan gabungan serangan darat, udara dan laut pertama-tama di Dili dan kemudian di Baucau. Serangan-serangan ini diperluas ke distrik Bobonaro, Ermera, Manufahi dan Covalima. Serangan-serangan ini mengakibatkan banyak korban meninggal di antara penduduk sipil, pengungsian masal dan penghancuran skala besar bangunan umum dan pribadi. Selama serangan-serangan awal ini, penduduk sipil yang tidak bersenjata dijadikan sasaran langsung oleh pasukan ABRI dengan dibunuh, dan pada umumnya ABRI tidak membedakan antara sasaran sipil dan militer.

33. Penggunaan senapan mesin berat, bazoka, granat, mortir, dan artileri baik di daerah perkotaan maupun pedesaan mengakibatkan kerusakan besar yang tidak terelakkan. Sering tidak jelas apakah serangan ini terarah atau membabi buta. Komisi menerima bukti-bukti kuat dari pernyataan-pernyataan yang dikumpulkan di seluruh Timor-Leste dimana secara jelas menunjukkan bahwa militer Indonesia yang melakukan invasi mempunyai suatu kebijakan yang melibatkan penghancuran sistematis dan perampasan rumah, ternak, dan tanaman pangan, serta pembunuhan penduduk sipil secara sengaja.<sup>11</sup> José da Silva Amaral menjelaskan kepada Komisi tentang penghancuran sumber makanan secara sengaja oleh ABRI/TNI dalam serangan-serangan mereka di Oso-Gori, Uaibobo (Ossu, Viqueque) pada tahun 1976:

*Ketika ABRI menyerang kota Ossu pada saat musim kemarau tahun 1976, isteri saya, Ceverina, anak saya Arlindo dan pada saat itu tinggal di Basilau, Oso-Gori, suco Uaibobo. Kami mengungsi ke gunung Builo, Ossorua. ABRI bergerak maju memasuki kota Ossu. Mereka membangun pos didekat kebun milik saya di Loilubu, Ossurua. Dalam suatu patroli mereka membakar rumah saya di Basilau. ABRI meninggalkan pos tersebut setelah kurang lebih satu bulan menetap disana. Setelah saya tahu bahwa ABRI telah pergi, saya dan seorang saudara ipar saya bernama Patricio datang untuk mengecek kebun kelapa milik saya tersebut. Ternyata kebun saya porak-poranda, pohon pisang ABRI babat habis untuk membangun benteng pertahanan ABRI. Sedangkan kelapa saya yang berjumlah kurang lebih 300 pohon juga mereka potong semua. Hanya tinggal satu pohon saja yang dibiarkan hidup.<sup>12</sup>*

34. Selain menjadi sasaran dan menderita dari serangan-serangan membabi buta, penduduk sipil juga dihukum berat oleh ABRI/TNI apabila mereka dicurigai membantu pasukan Fretilin/Falintil. Hukuman ini beragam tergantung situasi dan individu yang terlibat. Lobato Amaral, prajurit muda Falintil, menyatakan kepada Komisi bahwa kakak laki-lakinya, Leonardo Freitas, dan 11 penduduk sipil ditangkap dan dibunuh oleh ABRI/TNI di Bobonaro karena mereka dicurigai menyediakan makanan baginya dan prajurit Falintil lainnya pada tahun 1979.<sup>13</sup>

35. Kecurigaan apapun akan adanya hubungan dengan orang-orang yang lari ke hutan, apakah mereka bagian dari pasukan Fretilin/Falintil atau tidak, dapat menimbulkan pembalasan dari ABRI/TNI. Sebagai contoh, pada tahun 1977 Frederico Gonçalves dari Atabae (Bobonaro) melaporkan bahwa ternaknya dirampas anggota milisi Halilintar yang mencurigainya mempertahankan hubungan dengan saudara laki-lakinya di hutan.<sup>14</sup>

36. Selama periode awal invasi berlangsung pertempuran sengit di banyak tempat, saat pasukan Fretilin/Falintil menahan gerakan maju pasukan Indonesia. Komisi menerima sejumlah laporan tentang serangan balas dendam brutal pasukan Indonesia terhadap penduduk sipil setiap kali mereka menguasai suatu wilayah. Di Desa Leimea Kraik (Atsabe, Ermera), contohnya, ABRI secara sengaja membakar rumah-rumah bersama para penghuni yang berada di dalamnya.<sup>15</sup> Resistensi tanpa kekerasan dari penduduk sipil kerap kali ditanggapi dengan kekuatan mematikan yang menimbulkan rasa takut dan panik yang luas ketika puluhan ribu

orang melarikan diri ke gunung dan hutan untuk mencari perlindungan dan tempat aman. Komisi menerima banyak laporan mengenai hal ini dari berbagai wilayah di negeri ini, yang menunjukkan kerentanan penduduk sipil Timor-Leste menghadapi pasukan Indonesia yang bergerak maju hingga akhir tahun 1978.<sup>16</sup>

37. Meski banyak orang mencari perlindungan dan tempat yang aman di wilayah-wilayah yang dikuasai pasukan Fretilin/Falintil, ketenangan ini terbukti hanya sementara, saat pasukan Indonesia berusaha semakin memperkuat pendudukan. Agustino Soares mengatakan kepada Komisi:

*Pada waktu evakuasi ke hutan dan sembunyi di Katrai Leten, dibawa kaki Gunung Ramelau, saya berusia 17 tahun. Saya sembunyi disana bersama 10 orang keluarga.. Penduduk yang terkonsentrasi di Katrai Leten pada waktu itu sekitar ribuan orang, termasuk penduduk yang datang dari Letefoho, Ermera, Ainaro, Aileu dan Cailaco.*

*Katrai Leten merupakan basis pertahanan Fretilin terbesar kedua di Ermera setelah Fatubesi, sehingga situasi keamanannya pun cukup aman, karena di depan pasukan Fretilin menjaga musuh, sedangkan kami tinggal dibelakang sambil membuat kebun maupun ladang, jadi bahan makanan bagi kami pada waktu tinggal di Katrai Leten adalah cukup tersedia, sehingga jarang orang meninggal dunia karena kelaparan maupun penyakit.*

*Namun dua tahun kemudian, yaitu tahun 1978, pasukan militer Indonesia mulai melakukan operasi ke basis pertahanan kami di Katrai Leten , sehingga menyebabkan kami pindah dari Katrai Leten menuju lokasi yang lain. Pada waktu itu kekuatan pasukan militer Indonesia [ABRI] datang dari arah Atsabe, Ainaro, Same dan Bobonaro, mereka membentuk formasi pengepungan dengan sistim lingkaran penuh, sambil mengelilingi basis konsentrasi kami di Katrai Leten, barulah mereka [ABRI] menyerang bersama-sama.*

*Pada waktu itu ABRI menembak kami dengan mortir, bazuka dan meriam. Diatas udara pesawat tempur membom kami. Bom yang dijatuhkan tidak membakar orang, tetapi ranjaunya membunuh banyak orang karena banyak orang yang tidak sempat bersembunyi di tempat-tempat yang strategis. Akibat dari penyerangan ABRI tersebut menyebabkan basis pertahanan kami Katrai Leten hancur pada tanggal, 18 Mei 1978.<sup>17</sup>*

38. Di seluruh Timor-Leste, seluruh komunitas terpaksa harus terus berpindah. Komisi menerima pernyataan mengenai pola pengalaman yang serupa, yang memuncak dengan kematian, penangkapan, atau penyerahan diri komunitas dan individu dari seluruh pelosok negeri. Pengalaman penduduk desa Muapitine (Lospalos, Lautém) menggambarkan hal ini. Ketika pasukan ABRI/TNI mendarat di Pantai Com pada bulan Februari 1976 dan mulai menembaki warga sipil, penduduk setempat lari ke gunung. Selama dua tahun, mereka tinggal bersama, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Selama tahun 1977-1978, 155 penduduk desa Muapitine mati kelaparan, sementara tujuh orang lagi meninggal selama serangan

ABRI/TNI pada tahun 1978. Sebagaimana di banyak tempat lainnya, pada akhir tahun 1978, penduduk desa yang selamat mulai menyerahkan diri kepada ABRI/TNI.<sup>18</sup>

39. Komisi memperoleh kesaksian yang memaparkan kejadian di mana para komandan ABRI/TNI sengaja tidak melindungi penduduk sipil dari penganiayaan, atau membedakan penduduk sipil dari pasukan Fretilin/Falintil. Mantan prajurit ABRI/TNI dari Timor-Leste yang berbasis di Same selama tahun 1977, menyatakan kepada Komisi bahwa sebelum melancarkan operasi di sekitar Gunung Kablaki, anggota Kodim dan Hansip di Manufahi diberi perintah oleh komandan Kodim untuk membunuh siapa saja yang mereka temukan selama operasi, tanpa membedakan apakah mereka penduduk sipil atau prajurit Fretilin/Falintil.

*Ketika kami mengadakan operasi ke Cablaki pada tahun 1977, operasi tersebut di lakukan oleh tentara dan Hansip dari dua daerah yaitu Ainaro dan Same, sehingga operasi itu berbentuk lingkaran dengan tujuan agar dapat membendung pasukan Falintil dan masyarakat sipil yang masih bersembunyi di hutan. Pada saat operasi ke Kablaki penyerangan itu di lakukan serentak dan kami di perintahkan oleh Komandan Kodim bahwa pada saat operasi berlangsung siapa saja yang anda lihat baik itu masyarakat sipil maupun Falintil tidak bisa di ampuni langsung tembak dan bila perlu di tangkap.*

*Sehingga kami tiba di puncak gunung kablaki kami melihat sekelompok orang sekitar lima atau enam orang sehingga kami langsung tembak dan kami tidak tahu apakah itu Falintil atau masyarakat sipil. Merekapun langsung lari dan kami hanya menemukan barang-barang mereka seperti sarung persediaan makanan yang di tinggalkan. Lalu kami pun melanjutkan operasi kembali ke Same dengan melewati Rotuto.<sup>19</sup>*

40. Mantan tentara ini juga menjelaskan kejadian lain selama operasi di sekitar Same yang bertujuan untuk mencari Falintil dan penduduk sipil yang masih bersembunyi di hutan, dimana seorang perempuan tua yang ditemukan oleh tentara dalam sebuah gubuk di desa yang ditinggalkan penduduknya dibunuh oleh seorang anggota Hansip.<sup>20</sup>

41. Gerakan maju dan serangan-serangan militer Indonesia terhadap komunitas-komunitas di wilayah-wilayah yang belum mereka kuasai berlanjut sepanjang tahun 1978. Dapat diduga, penduduk sipil terus menanggung akibat dari serangan-serangan tersebut. Maria José da Costa menceritakan pengalaman komunitasnya di wilayah sekitar Dolok di distrik Manufahi kepada Komisi:

*Pada tahun 1978 musuh mulai mengepung kami di Suco Dolok dan banyak yang meninggal akibat kelaparan. Semua makanan...dibakar. Mereka mengepung kami dari laut dengan kapal perang, dari udara dengan pesawat udara dan dari darat dengan membakar rumput-rumput dan mengepung dengan tentara. Pada saat itu bulan Agustus, saat musim kemarau. tentara membakar alang-alang sehingga api dengan cepat membakar wilayah tersebut bagaikan disiram dengan bensin. Banyak orang yang meninggal karena tidak dapat menyelamatkan diri dari kepungan api.<sup>21</sup>*

42. Militer Indonesia telah salah memperkirakan bahwa kekuatan persenjataannya yang sangat besar dapat menuntaskan pendudukannya atas Timor-Leste dengan relatif cepat. Ketika hal ini tidak terjadi, dan pasukan Indonesia terhenti lajunya, dengan pasukan Fretilin/Falintil tinggal di antara penduduk sipil di bagian-bagian wilayah pedalaman, pasukan Indonesia melancarkan serangan besar-besaran terhadap basis resistensi. Pada tahun 1978 serangan-serangan ini dikenal sebagai kampanye pengepungan dan pembumihangusan, dan menimbulkan banyak korban di antara penduduk sipil di basis-basis ini. Kenyataan bahwa begitu banyak warga sipil yang mencari tinggal bersama pasukan Fretilin/Falintil di basis-basis ini mungkin menjadi penyebab sulitnya membedakan antara penduduk sipil dan penempur. Namun, bukti yang diserahkan kepada Komisi memberikan gambaran yang jelas tentang kampanye militer ABRI/TNI yang mengabaikan prinsip perlindungan kepada penduduk sipil atau perlunya membedakan penduduk sipil dari para penempur. Serangan-serangan di wilayah ini tampaknya didasari asumsi bahwa siapa pun, pemberontak atau penduduk sipil, yang tinggal di luar wilayah kekuasaan militer Indonesia adalah sasaran yang sah (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik; Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa; Bab 7.3.: Pemindahan Paksa dan Kelaparan).

43. Komisi mendengar kesaksian serupa dari banyak daerah di negeri ini, saat orang-orang dan komunitas-komunitas berusaha mati-matian untuk berada di luar jangkauan militer Indonesia yang bergerak maju. Banyak penduduk menghabiskan antara tiga hingga empat tahun dalam pelarian, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, hidup dalam kondisi yang sangat sulit yang terus mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dan bahkan seluruh keluarga.<sup>22</sup> Komunitas desa Aiassa dan Malilait, di sub-distrik Bobonaro (Bobonaro) menceritakan kepada Komisi:

*Pada bulan Januari 1976 militer Indonesia memasuki kecamatan Bobonaro. Tembakan dari darat dan udara terus menerus dilepaskan sehingga membuat seluruh masyarakat mengungsi ke Lour. Ketika itu makanan yang dibawa hanya sedikit. Setelah itu penduduk bertahan di Holba, Anapal selama sekitar 1 tahun sambil berkebun dan menggarap sawah. Sambil menunggu waktu panen, sehari-harinya penduduk mencari umbi-umbian untuk dimakan. Sayangnya ketika musim panen tiba, TNI dan Partisan kembali memaksa penduduk pindah dari Holba ke Fatuleto dan meninggalkan hasil kebun dan sawah tidak dipanen. Penduduk tinggal di Fatuleto sekitar satu tahun, tetapi penduduk harus terus mengungsi ke Molop kemudian ke Dikehili, dimana pada saat itu banyak penduduk yang meninggal karena ditembak dari udara, sakit serta kekurangan makanan.*

*Pada tahun 1978, penduduk kembali melarikan diri ke Halik akibat tembakan terus-menerus dari udara yang dimulai pada jam tujuh hingga jam sembilan pagi yang mengakibatkan kurang lebih tujuh orang meninggal dunia, tak terhitung orang yang meninggal karena kelaparan, karena menderita sakit dan ada yang meninggal karena keracunan ketika makan daun-daunan.*

*Karena semakin terdesak akhir pada tahun 1979, penduduk berangsur-angsur menyerah ke pasukan Batalyon 507.<sup>23</sup>*

44. Komisi menerima 247 pernyataan dari distrik Baucau yang melaporkan 278 kasus serangan terhadap penduduk sipil dan sasaran sipil sepanjang periode Operasi Seroja pada

dekade 1970-an. Laporan-laporan serupa diterima dari Aileu, dimana tercatat adanya 97 warga sipil yang meninggal dan perusakan sasaran sipil selama operasi ABRI/TNI.

45. Penduduk sipil juga meninggal akibat kelaparan, setelah ternak dan persediaan bahan makanan mereka dihancurkan atau dicuri, atau karena melarikan diri dengan membawa sedikit bekal makanan atau tidak membawa bekal makanan sama sekali untuk bertahan hidup. Dalam periode yang sama, Tekanan yang meningkat di *zona libertadas* atau zona bebas akibat operasi ABRI/TNI membuat hidup menjadi sangat sulit serta hilangnya nyawa penduduk sipil yang tinggal di wilayah-wilayah ini. Pergerakan pada awalnya terbatas di wilayah-wilayah ini, dan kemudian penduduk sipil terpaksa selalu bergerak untuk menghindari serangan-serangan ABRI/TNI, sehingga mereka tidak bisa menanam dan memanen tanaman pangan (lihat Bab 7.3: Pindahan Paksa dan Kelaparan).

46. Bagi Fretilin/Falintil, kerawanan situasi mereka menjadi kekhawatiran utama. Membatasi gerakan penduduk sipil adalah konsekuensi langsung dari perlunya mengamankan dan mempertahankan kontrol geografis fisik. Pembatasan-pembatasan seperti ini tidak hanya ditujukan bagi kader politik dan militer Fretilin/Falintil. Cara-cara yang keras, bahkan brutal, sering dilakukan sendiri oleh penduduk sipil yang ingin bertahan hidup. Bertahan agar tidak terlacak saat berada di hutan, sering kali menghadapkan mereka pada pilihan hidup atau mati. Adriano João menjabat sebagai asisten politik Fretilin (adjunto) di Zona Cailaco, dan menjelaskan kepada Komisi langkah-langkah akhir yang diambil penduduk sipil untuk bertahan hidup selama periode ini:

*[Di Purugua] saya melihat seorang ayah mencekik anaknya yang masih berumur sekitar empat tahun hingga mati karena anak tersebut menangis terus. Pada saat itu ada konsensus antara masyarakat bahwa siapa saja termasuk anak-anak yang menyebabkan ABRI mengetahui keberadaan penduduk sipil harus disingkirkan. Anak saya sendiri yang berumur satu setengah tahun nyaris dibuang karena menangis terus.<sup>24</sup>*

47. Sekali pihak Indonesia menemukan lokasi konsentrasi pejuang Fretilin/Falintil atau penduduk sipil di wilayah tertentu, praktek yang lazim ialah menyerang lokasi tersebut dengan senjata berat. Serangan-serangan ini sering kali membabi buta dan mematikan. Pada tahun 1978, misalnya, pengeboman udara dan laut menyebabkan 100 orang meninggal di antara penduduk desa Aidantuik (Suai, Covalima) yang mengungsi ke Beco (Suai, Covalima).<sup>25</sup>

48. Basis Fretilin/Falintil di Gunung Matebian (distrik Baucau dan Viqueque) di timur, menjadi salah satu pusat resistensi terakhir pada tahun 1978 saat serangan-serangan ABRI/TNI menghancurkan *base de apoio* atau basis dukungan Fretilin/Falintil. Setelah invasi, pada awal tahun 1976, pasukan Fretilin/Falintil mengavakuasi banyak penduduk sipil dari Baucau, Viqueque dan Lautém ke gunung ini. Banyak penduduk sipil Timor melarikan diri ke gunung untuk menghindari serangan-serangan militer Indonesia pada tahun-tahun awal invasi. Pada tahun 1978, Gunung Matebian menjadi salah satu tempat berlindung utama yang terakhir. Setelah gerakan maju militer Indonesia menghancurkan basis-basis lain, pasukan Fretilin/Falintil dan penduduk sipil kembali menuju basis di Matebian. Sebagai reaksi, antara bulan Agustus dan Oktober tahun itu pihak militer Indonesia melancarkan serangan-serangan yang membinasakan dari darat, udara, dan laut ke gunung tersebut. Armindo da Silva, yang pada saat itu melarikan diri ke gunung itu, menceritakan kepada Komisi:

*Ketika saya dan keluarga saya tinggal di Matahoi Uatu-Lari [Viqueque], saya mendengar bahwa TNI melakukan penyerangan ke Osso Lero di kaki Gunung Matebian, di wilayah Baguia. Banyak masyarakat sipil dari Ossu tewas akibat serangan bom membabi buta dari udara dan tembakan mortir dari arah Quelicai [Baucau] oleh TNI....Selain itu keponakkan saya bernama Januario da Silva, berumur 20 tahun dan ibu saya yang bernama Paeloi...dan Liurai Uaibobo juga tewas akibat kena bom.<sup>26</sup>*

49. Tempat pengungsian di gunung tersebut dikepung oleh ABRI/TNI dan kampanye sistematis untuk memaksa semua orang yang berada di gunung mulai dilancarkan. Banyak komunitas yang dihubungi Komisi melaporkan kematian dan kehancuran yang terjadi akibat serangan ABRI/TNI.<sup>27</sup> Komisi menerima laporan mengenai ribuan penduduk yang terbunuh atau terluka sebelum ijin untuk menyerah keluar dari komandan Fretilin/Falintil pada tanggal 22 November 1978 untuk menyerah (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa; Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan).

### **Bom datang dari udara, atau laut, dan darat**

Komunitas di desa Defawasi, di sub-distrik Baguia di wilayah pegunungan Matebian di Baucau menceritakan kepada Komisi tentang pengalaman mereka saat militer Indonesia melancarkan serangan terakhir di gunung tersebut pada akhir tahun 1978:

*1978 adalah tahun ketika satuan-satuan angkatan darat, laut, dan udara Indonesia (Paskhas) dan Brigade Mobil Polisi (Brimob) menyerang, dengan membentuk sebuah pagar di sekeliling Gunung Matebian, yaitu Formasi Cincin. Penduduk desa Defawasi, Viqueque, Baucau, dan Lospalos berada di dalam lingkaran tersebut. Pagar ini diperketat setiap hari dan semakin banyak penduduk sipil terperangkap di Gunung Matebian.*

*ABRI/TNI menggunakan kesempatan ini untuk menyerang orang-orang, dengan serangan darat, dengan meriam, bazoka, mortir, dan roket; dan serangan meriam laut. Serangan yang tak henti-hentinya dilakukan menghancurkan mata air, tidak memberikan kesempatan untuk menyiapkan makanan, dan menciptakan situasi kacau.*

*Banyak orang mati terkena bom atau karena kelaparan, kehausan, atau tersesat di gunung. Para penduduk desa juga mati karena luka terkena peluru senjata otomatis. Diperkirakan 100 penduduk desa Defawasi dari segala umur, laki-laki dan perempuan, mati di Gunung Matebian. Dari tanggal 2 Oktober hingga 28 November 1978, penduduk desa Defawasi mulai kembali ke Kota Baguia dari gunung Matebian.<sup>28</sup>*

50. Meningkatnya serangan ABRI/TNI sepanjang tahun 1979 semakin memperburuk kondisi penduduk sipil di pedalaman, yang kemudian memaksa semakin banyak penduduk sipil menyerahkan diri kepada ABRI/TNI. Penduduk lainnya tetap lari dari serangan, hingga akhirnya mereka menyerah.<sup>29</sup> Penyerahan massal terakhir penduduk sipil terjadi setelah jatuhnya basis Matebian pada bulan November 1978, setelah Fretilin/Falintil memberi ijin untuk menyerah (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik; Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan).

51. Situasi setelah penangkapan atau penyerahan diri sangat suram. Militer Indonesia memisahkan mereka yang ditengarai sebagai Fretilin/Falintil, banyak di antaranya dieksekusi atau menghilang (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik; Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan Penghilangan Paksa,). Penduduk sipil lainnya pertama-tama ditahan di kamp-kamp sementara, kemudian di pusat penahanan dan akhirnya dimukimkan kembali di wilayah-wilayah dibawah kekuasaan ABRI/TNI. Makanan dan obat-obatan tidak mencukupi untuk penduduk sipil yang jumlahnya sangat besar yang ditahan di tempat penahanan, dan ribuan meninggal karena

kelaparan dan penyakit mungkin dalam tahun yang paling tragis dalam sejarah Timor-Leste. Bab 7.3: Pindahan Paksa dan Kelaparan, menjelaskan kejadian tragis ini dan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terkait. Komunitas di seluruh negeri menceritakan pengalaman mereka selama periode ini kepada Komisi. Misalnya, komunitas di Liquidoe (Aileu), Remexio (Aileu) dan Metinaro (Dili merenungkan besarnya jumlah kematian penduduk sipil setelah menyerah kepada pasukan Indonesia karena kelaparan dan penyakit di kamp.<sup>30</sup>

52. Meskipun serangan-serangan terhadap penduduk sipil dan sasaran sipil menurun tajam setelah Operasi Seroja berakhir pada tahun 1979, penduduk sipil terus menjadi sasaran dan terkena dampaknya akibat taktik anti pemberontakan ABRI/TNI yang terus berlanjut selama pendudukan Timor-Leste.

53. Selama Operasi Kikis pada tahun 1981, misalnya, Komisi menerima sejumlah laporan tentang eksekusi oleh ABRI/TNI terhadap penduduk sipil yang menyerah maupun penduduk sipil yang dipaksa terlibat dalam operasi. Komunitas dari desa Orlalan, Batara (Laclubar, Manatuto) menggambarkan pengalaman mereka saat dipaksa bergabung dalam operasi tersebut:

*Setelah menerima perintah dari Manatuto dan Dili agar menyiapkan penduduk untuk ikut Operasi Kikis, Komandan Koramil Laclubar langsung memerintahkan kepada kepala suco[desa] dari enam suco[desa] agar memilih penduduk laki-laki yang postur tubuhnya besar diharuskan ikut, kecuali anak-anak dan orang tua. Pada saat itu semua sekolah ditutup. Penduduk hanya diperbolehkan membawa pisau, tombak, panah dan kentongan bambu. Tiap orang harus ada ikat kepala dari kain sebagai tanda. Makanan harus dibawa sendiri dan tiap suco ada pemimpinnya. Penduduk kemudian dipaksa berjalan mulai jam 6:00pagi untuk mencari Falintil dan sisa-sisa penduduk yang masih di hutan. Jika ketemu maka harus ditangkap atau dibunuh agar perang cepat selesai.*

*Di Fatuhada[Laclubar, Manatuto] terjadi kontak senjata antara Batalyon 744 dan Falintil, dan pada saat itu 15 anggota Falintil tewas dan penduduk sipil yang menyerah sekitar 50 orang tersebut dibunuh semuanya oleh Batalyon 744. Pada saat itu juga ada seorang ibu hamil yang ditikam perutnya sehingga bayi yang dikandungnya pun meninggal. Setelah dibunuh, mayat-mayat tersebut kemudian dipotong-potong dan dikuburkan.*

*Selama operasi berlangsung, pasukan dari batalyon 744 yang mencurigai penduduk Laclubar berhubungan dengan Fretilin memerintahkan penduduk Laclubar agar merusak tanaman yang bisa dimakan agar Fretilin tidak mendapat makanan dan cepat menyerah. Perintah ini disertai ancaman dibunuh jika penduduk tidak menuruti perintah tersebut. Selama 40 hari perjalanan dalam operasi ini, satu orang penduduk Laclubar yang sakit meninggal dunia karena tidak sempat diobati dan seorang ditembak ABRI di Aitana tetapi ABRI memberi alasan bahwa ABRI salah lirik. Setelah itu penduduk Laclubar kembali ke suco [desa] mereka masing-masing di Laclubar.<sup>31</sup>*

54. Albino da Costa, seorang mantan pejuang Falintil, menceritakan kepada Komisi:

*Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana militer Indonesia dari Batalyon 744 membunuh penduduk. Mereka menangkap orang-orang tak bersenjata, mengikat mereka lalu menusuk mereka hingga mati. Ada perempuan hamil yang ditangkap dan dibunuh seperti itu, saya lihat dari jarak dekat, kira-kira 100 meter dari tempat kejadian.<sup>32</sup>*

55. Ketika gerakan maju mencapai wilayah Lacluta (Viqueque) pada bulan September 1981, sebuah pembantaian terjadi dimana menurut beberapa kesaksian mengatakan ratusan orang terbunuh. Sementara Indonesia mengumumkan kemenangan militer di daerah tersebut pada saat itu, dengan menyatakan tertangkapnya 450 anggota Fretilin beserta 150 senjata, Mgr. Martinho da Costa Lopes, Administrador Apostolik Katolik Timor-Leste saat itu, mengklaim bahwa 500 orang terbunuh (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik; Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa). Pemerintah Indonesia mengakui 70 orang terbunuh.<sup>33</sup> Orang lain memperkirakan jumlah yang meninggal mencapai ratusan orang.<sup>34</sup> Meski angka pasti mengenai insiden tersebut tidak ada, termasuk rincian apakah mereka yang terbunuh adalah penempur atau penduduk sipil, sebagian besar sumber menyebut hal ini sebagai pembantaian brutal penduduk sipil (lihat Bab 7.2.: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa).

56. Pemberontakan tahun 1983 oleh anggota Hansip dan Ratih Timor-Leste melawan militer Indonesia di Kraras (Viqueque Viqueque) merupakan salah satu kasus yang paling kejam mengenai balas dendam ABRI/TNI terhadap penduduk sipil (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa). Pemberontakan dikoordinasi secara ketat oleh Falintil. Setelah membunuh 12 anggota Zipur 4 Batalyon Teknik, anggota Hansip dan Ratih menyeberang ke Falintil dengan senjata mereka. Penduduk sipil menjadi rentan. Banyak penduduk yang melarikan diri ke hutan dan gunung sekitar karena takut balas dendam. Militer Indonesia melakukan tindakan hukuman kolektif yang mengerikan terhadap penduduk sipil yang tidak terlibat dalam penyerangan melawan pasukan mereka.

57. Serangkaian pembantaian penduduk sipil di daerah ini kemudian dimulai. Pada tanggal 7 September, tentara ABRI/TNI memasuki desa Kraras dan membunuh 4 atau 5 penduduk sipil, termasuk seorang perempuan tua. Mereka kemudian membakar rumah-rumah penduduk. Mayat dari beberapa korban pembunuhan ditinggal di rumah yang terbakar.<sup>35</sup> Selama beberapa minggu setelahnya tentara Indonesia melakukan patroli di seluruh wilayah pegunungan di sekitarnya untuk memaksa mereka yang melarikan diri untuk kembali ke desa Kraras dan Buikarin, dan ke kota Viqueque. Komisi menerima laporan bahwa sejumlah individu dieksekusi selama operasi ini, termasuk anak laki-laki berusia 15 tahun atau sekitar 12 tahun, dan tiga orang lain pada tanggal 15 September.<sup>36</sup> Selama masa itu banyak orang juga ditahan dan disiksa, kebanyakan di Olobai, dimana terdapat basis satu kompi dari Batalyon Infantri 745.

58. Komisi diberi tahu oleh korban yang selamat bahwa pada pagi hari tanggal 16 September tentara Indonesia dan Hansip membawa sekelompok besar penduduk sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, ke desa Caraubalu. Penduduk desa kemudian diangkut ke lokasi bernama Welamo dimana mereka disuruh berdiri di lubang yang muncul akibat tanah longsor, dan mereka kemudian dieksekusi oleh tentara dan anggota Hansip.<sup>37</sup> Komisi mengumpulkan daftar nama 54 korban yang dieksekusi di Caraubalu.

59. Pada tanggal 17 September tentara Indonesia mendekati sekelompok besar penduduk sipil di Kraras yang melarikan diri ke desa tetangga Buikarin. Desa itu dikepung dan mereka yang dari Kraras ditahan. Penduduk laki-laki dipisah dari penduduk perempuan dan diberi tahu bahwa mereka akan diarak ke Kraras di bawah pengawasan militer untuk membawa

---

<sup>32</sup> Daftar ini ditulis secara penuh dalam Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa.

makanan. Menurut bukti yang diterima Komisi antara 6 dan 8 tentara Indonesia dan dua Hansip Timor-Leste menyertai beberapa puluh penduduk laki-laki menuju sungai Wetuku di sebuah daerah yang dikenal sebagai Tahuben. Mereka kemudian ditembak. Hanya empat orang yang hidup dari pembantaian tersebut. Laporan mengenai jumlah korban yang terbunuh di Tahuben beragam, dari yang terendah yaitu 26 sampai yang tertinggi 181. Komisi menerima nama-nama 141 korban, semuanya laki-laki.<sup>†</sup>

### **Pelanggaran ekonomi dan harta benda – kerusakan sampingan atau strategi terencana?**

60. Menurut hukum perang, harta benda penduduk dilindungi dari serangan-serangan<sup>‡</sup> Kerusakan tidak langsung kepada obyek-obyek sipil diperbolehkan hanya kalau tidak bersifat berlebihan dibandingkan keuntungan konkrit militer.<sup>38</sup>

61. Informasi yang masuk ke Komisi menunjukkan bahwa perusakan dan pencurian harta milik itu sendiri adalah tujuan utama militer, dan bukan efek sampingan serangan tersebut. Komisi menerima pernyataan mengenai 1256 kasus pembakaran dan penghancuran rumah, penghancuran ternak dan tanaman pangan, pencurian dan perampokan harta benda. Meski banyak dari perusakan ini terjadi karena serangan-serangan membabi buta, terdapat cukup banyak bukti bahwa penduduk sipil yang dicurigai mendukung kemerdekaan dengan sengaja dijadikan sasaran ABRI/TNI dalam pelanggaran Hak Ekonomi, pada periode konflik yang berlainan dari masa-masa awal invasi sampai perusakan setelah Konsultasi Rakyat pada bulan September 1999.

62. Analisa pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Komisi menunjukkan bahwa pelanggaran hak milik dan ekonomi penduduk sipil selalu disertai dengan pelanggaran langsung lain atas penduduk sipil, seperti penangkapan, penahanan, penyiksaan, atau pembunuhan.

63. Pelanggaran atas hak ekonomi dan harta benda adalah bagian tak terpisahkan dari kebijakan militer Indonesia selama periode ini. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini digunakan untuk sejumlah alasan, termasuk hukuman, penghancuran sumber daya dan penerapan suatu sistem dimana kolaborator akan diberi penghargaan material dengan mengalihkan secara paksa harta benda milik lawan-lawan politik kepada mereka.

64. Sifat dan skala perusakan harta benda warga sipil dan pencurian dan perampasan selama invasi dan setelahnya menunjukkan kesamaan yang mencolok dengan kejadian-kejadian bulan September 1999 ketika kebijakan 'bumi hangus' membuat TNI dan milisi binaannya membakar dan menghancurkan kira-kira 60.000 rumah dan sebagian besar infrastruktur pemerintah di Timor-Leste hanya dalam waktu beberapa minggu.<sup>39</sup>

1975-1977

65. Komisi mengumpulkan bukti pencurian dan perusakan harta benda yang disengaja oleh tentara Indonesia sejak awal invasi. Seorang mantan anggota UDT yang bergabung dengan pasukan partisan Timor-Leste yang membantu ABRI/TNI selama invasi skala besar, Rui Emeliano Teixeira Lopes, menggambarkan perampasan yang dilakukan oleh tentara Indonesia:

---

<sup>†</sup> Wawancara CAVR dengan: António Soares, (tanpa tanggal) yang mengutip 79 terbunuh; Miguel Viana, Viqueque, 17 Juli 2003, yang mengutip 181 terbunuh; Silvino das Dores Soares, Viqueque, 10 Maret 2004, yang mengutip 143; Manuel de Jesus Pinto, Buikaren, Viqueque, 20 Maret 2004, yang berkata dia menghitung 82 mayat.

<sup>‡</sup> Daftar korban dari pembantaian ini juga dikutip penuh di Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa

<sup>‡</sup> Artikel 52 Protokol tambahan Konvensi Jenewa, yang diakui mencerminkan hukum adat, lihat J. Henckaerts and L. Doswald-Beck, ICRC's Customary International Humanitarian Law, Vol I: Rules, (2005) hal 25-26.

*Pada pagi hari tanggal 7 Desember 1975, Kopassus [waktu itu masih disebut RPKAD], Ranger, Kujang, Kostrad dan Marinir mendarat di Dili. Kami hanya berada didalam kapal. Ketika itu kami melihat ada api yang menjalar dan ada tembak menembak tetapi kami tidak mendarat karena mereka tidak membutuhkan bantuan kami. Ketika kami menuju Baucau, ABRI membawa mobil dan koper orang kemudian dimuat kedalam kapal yang akan kami tumpangi menuju Baucau. Melihat hal ini kami tidak suka. Kita berperang atau merampok barang orang. Perampokan semacam ini bukan hanya terjadi di Dili [dan Baucau], tetapi juga terjadi di Balibo dan Rumah Sakit Maliana.<sup>40</sup>*

66. Anggota partisan dituduh melakukan perusakan dan perampasan secara luas di Baucau.<sup>41</sup> Cerita yang sama juga diberikan di distrik Liquiça,<sup>42</sup> Ermera,<sup>43</sup> Baucau,<sup>44</sup> Lautém,<sup>45</sup> dan Bobonaro selama periode ini.<sup>46</sup>

67. Setelah invasi awal, pasukan Indonesia berupaya melakukan konsolidasi dan memperluas penguasaan teritorial mereka. Komisi menerima laporan tentang pencurian dan perusakan harta benda dari seluruh penjuru Timor-Leste selama gerakan maju ABRI/TNI, melalui lokakarya Profil Komunitas, termasuk dari komunitas di distrik Bobonaro (di Atabae dan Lolotoe), di Aileu, di Baucau (di Baguia, Quelicai, Venilale, Vemasse) dan di Viqueque (di Lacluta, Ossu, Uatu-Carbau Uaimori). Setelah menguasai wilayah baru, pasukan ABRI/TNI secara teratur merampas atau menghancurkan harta benda, sehingga secara efektif mengambil alih dan membuat pemilik dan penghuni rumah kehilangan rumah. Rumah dan harta benda lain dibakar, tanaman yang belum dipanen dihancurkan dan sejumlah besar hewan ternak dibantai. Di beberapa tempat, *uma lulik* atau (rumah adat) serta seluruh isinya dihancurkan.<sup>47</sup> Perusakan semena-mena semacam ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk menghancurkan budaya dan identitas orang Timor-Leste.

68. Di banyak wilayah, penduduk sipil lari ke gunung dan hutan sekitar sebelum pasukan Indonesia tiba. Dengan harta milik mereka yang tidak terjaga, ABRI/TNI secara efektif leluasa untuk menghancurkan atau mencuri harta benda apa saja yang mereka inginkan.

69. Praktek-praktek seperti ini terus berlangsung tanpa henti selama tahun-tahun awal pendudukan. Militer Indonesia secara terbuka mengakui perilaku ini sebagai bagian dasar praktek militer:

*Operasi Pamungkas V pada tanggal 6-7 Maret 1978 yaitu untuk membebaskan rakyat di SAS MAUBU yang dijaga oleh GPK. Dengan kekuatan 2 Ki [kompi] bersama Hansip dan Danpur-12, hasil yang diperoleh adalah 3 orang rakyat menyerah, 8 rumah dibakar dan 2 \_ hektar kebun jagung dimusnahkan.<sup>48</sup>*

70. Dalam serangan ofensifnya, ABRI/TNI dibantu sejumlah pasukan binaannya, termasuk Partisan, dan kemudian struktur pertahanan sipil seperti Hansip dan kelompok milisi seperti Halilintar di distrik Bobonaro. Komisi menerima berbagai laporan tentang keterlibatan kelompok-kelompok binaan ini dalam pencurian harta benda, baik bekerja sama dengan ABRI/TNI maupun sendiri-sendiri.

71. Komisi menerima berbagai laporan tentang pencurian ternak dan hasil panen. Selain itu, barang-barang bernilai, seperti *tais* (kain ikat), manik-manik dan uang perak juga dicuri. Domingos da Costa da Silva dari Fatuberliu (Manufahi), menceritakan kepada Komisi tentang pencurian barang-barang tradisional berharga dalam jumlah besar:

*Pada tahun 1976 kami lari ke hutan sampai tahun 1978 dan sembunyi di sebuah lokasi bernama "Orboa" Aldeia Orlara. Pada suatu saat datang sekelompok orang Hansip dengan pimpinan L1, para rombongan datang dan menangkap adik saya bernama João da Costa dengan memukul dan menarik dia seperti binatang. Selain itu para pelaku mengambil semua harta milik kami berdua diantaranya Morten 15 buah, Belak tujuh buah, Kaibauk tujuh buah, fucador 15 buah, osan manu liras 30, kalung 25, sasaki 10, loku liman 2, buti liman 10, sisir dari emas empat dan Murak bulu Ayam dua buah. Barang-barang tersebut di atas dibawa kabur semua oleh para pelaku, sedangkan kami ditinggalkan dalam keadaan babak belur.<sup>49</sup>*

72. Skala laporan kepada Komisi tentang perampasan dan pencurian yang terus merajalela oleh tentara Indonesia menunjukkan bahwa tindakan-tindakan tersebut seharusnya diketahui dan didukung oleh pejabat militer senior. Tentu saja, penggunaan bahan makanan hasil curian meringankan beban persediaan makanan yang penting bagi pasukan Indonesia. Ternak yang didapat juga memberi peluang peningkatan pendapatan bagi anggota ABRI/TNI dari generasi ke generasi. Militer Indonesia menggunakan harta benda milik penduduk sipil Timor-Leste sebagai bagian penting untuk mendukung operasi militer mereka. João Pinto Dias menceritakan kepada Komisi:

*Pada tahun 1976, saya punya 12 kuda. Komandan, L2 [orang Timor-Leste] dan anak buahnya mengambil kuda-kuda saya. Beberapa ditembak mati, beberapa dimakan, dan beberapa dijual. Saya punya 40 kerbau lebih, tetapi Komandan L2 dan L3 [orang Timor-Leste] menembak beberapa kerbau itu dan sisanya mereka jual di Batugade kepada orang-orang dari Atambua.<sup>50</sup>*

73. Pencurian harta benda dan perusakan juga kerap dilakukan setelah pembunuhan penduduk sipil. António Soares menceritakan kepada Komisi tentang pembunuhan pamannya, pembakaran rumahnya dan pencurian harta benda oleh anggota Hansip di Esa-isi, Ossu (Ossu, Viqueque):

*Para hansip yang dipimpin oleh L18 bersama kedua orang pengikutnya, masing-masing bernama L4 dan L5 melakukan patroli ke Esa-isi [Ossu, Viqueque]. Mereka membunuh Cristovão dan membakar juga rumah serta mengambil ternak mereka berupa kerbau 40 ekor, kuda 31 ekor, dan kambing 58 ekor serta 5 lumbung padi.<sup>51</sup>*

74. Jacinto Olo Mau mengatakan bahwa pada tahun 1975 ABRI/TNI dari Batalyon 501 menyerang Lahomea [Maliana, Bobonaro] dan membunuh orang tuanya, Bere Soro dan Bui Bere. Setelah keduanya tewas, dan rumah dalam keadaan kosong, tentara dari Batalyon 501 mengambil kesempatan menjarah harta benda korban. Jacinto Olo Mau mengatakan kepada Komisi:

---

<sup>49</sup> *Morten* : kalung yang dibuat dari biji batuan berwarna kuning; *belak*: adalah lempengan timah berbentuk bundar yang digantung di leher dengan benang yang kuat; *Kaibauk*: Hiasan dikepala berbentuk seperti tanduk kerbau yang terbuat dari timah atau emas yang ditempa tipis; *Osan manu liras*: Koin timah antik dari Portugis; *Sasakis*: *Loku liman*: Gelang pada lengan atas yang terbuat dari emas atau timah; *Buti liman*: gelang tipis dari timah a; *murak bulu ayam*: Pernik dari bulu ayam.

*Setelah kedua orang tua saya dibunuh dan rumah kosong, pelaku menggunakan kesempatan untuk masuk dan mengambil semua barang-barang milik, setelah itu mereka membakar rumah tersebut serta mayat kedua korban di dalam.<sup>52</sup>*

75. Pencurian ternak dan penghancuran tanaman pangan menimbulkan akibat langsung, karena penduduk di banyak daerah mengalami kekurangan pangan yang parah, yang mengakibatkan kelaparan di mana-mana. Laporan tentang kelaparan sebagai akibat perusakan yang dilakukan oleh ABRI/TNI diterima dari sejumlah daerah termasuk Cailaco dan Lolotoe (Bobonaro) dan Zumalai (Covalima). Alfredo Moniz Soares merenungkan hal ini di hadapan Komisi:

*Pada tahun 1977, saat pasukan TNI melakukan penyerangan, dan karena tidak ada kesempatan untuk mencari makanan sehingga banyak keluarga saya yang meninggal dunia karena kekurangan makanan dan obat-obatan. Selain itu, para pelaku [ABRI] juga melakukan pembakaran rumah dan perampasan terhadap ternak-ternak kami.<sup>53</sup>*

1978-1979

76. Ketika banyak penduduk sipil turun gunung dan menyerahkan diri kepada militer Indonesia pada tahun 1977-78, mereka pada umumnya tidak diijinkan langsung pulang ke daerah asal mereka. Mereka ditahan di kamp-kamp sementara, banyak yang tetap ditahan di pusat penahanan ABRI/TNI atau desa-desa pemukiman selama bertahun-tahun (lihat Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan). Saat mereka pulang ke daerah asal mereka, banyak yang menemukan desa-desa dan rumah mereka sudah dijarah dan dibakar. Meski basis Fretilin/Falintil sudah dihancurkan dan bentuk resistensi bersenjata sudah berubah secara fundamental, perang belum selesai dan perang ini tetap mempunyai dampak yang mendalam di segala bidang kehidupan penduduk sipil. Penduduk sipil tidak lagi tinggal bersama resistensi bersenjata di pedalaman, tetapi selama periode ini, mereka ditahan dalam kondisi yang dijaga ketat oleh militer Indonesia yang mempunyai tujuan agar penduduk sipil tidak bisa melakukan hubungan dan memberi dukungan kepada pejuang Resistensi. Pengawasan, pengumpulan informasi dan kontrol ketat gerakan penduduk sipil merupakan realitas setiap hari bagi sebagian besar penduduk sipil di kamp-kamp yang dikuasai ABRI/TNI. ABRI/TNI tetap menghancurkan tanaman pangan dan mencuri harta benda mereka sebagai bentuk hukuman, intimidasi, dan oportunisme ekonomi. Banyak orang yang ditahan di kamp menjadi sasaran pemukulan dan pelanggaran fisik lainnya oleh pasukan bersenjata Indonesia.<sup>54</sup>

77. Hubungan masa lalu dengan Fretilin yang diketahui selalu menyebabkan orang tersebut menjadi sasaran militer Indonesia. Orang Timor yang bersekutu dengan pasukan pendudukan juga dapat mengambil kesempatan dari situasi ini. José António menyatakan kepada Komisi bahwa mantan anggota UDT mengambil alih tanahnya selama tahun 1979, di Beikala, (Hatu Udo, Ainaro) karena latar belakangnya sebagai anggota Fretilin.<sup>55</sup> Deponen lain mengatakan kepada Komisi bahwa dia ditangkap ABRI/TNI pada bulan Maret 1979, disiksa berkaitan dengan aktivitas Fretilin dan kemudian dipaksa menyerahkan perkebunan kopinya.<sup>56</sup> Orang-orang lainnya terus menjadi sasaran karena dicurigai memiliki hubungan dengan pejuang Resistensi yang masih berada di hutan.

78. Laporan tentang pencurian dan perampasan harta benda oleh pasukan pendudukan Indonesia dari orang-orang yang telah menyerahkan diri diterima dari distrik Bobonaro,<sup>57</sup> Baucau (di sub-distrik Laga,<sup>58</sup> Vemasse,<sup>59</sup> Quelicai,<sup>60</sup> Baguia,<sup>61</sup>), Manufahi,<sup>62</sup> Manatuto,<sup>63</sup> Covalima,<sup>64</sup> Ermera,<sup>65</sup> Viqueque,<sup>66</sup> dan Oecusse.<sup>67</sup> Dalam beberapa kasus tindakan tersebut diikuti dengan pemukulan dan penyiksaan.<sup>68</sup>

79. Di Lautém, upaya baru ABRI/TNI pada tahun 1979 untuk mencari pasukan Fretilin/Falintil mengakibatkan lebih banyak kematian penduduk sipil.<sup>69</sup> Maria Alves menyerahkan diri kepada militer Indonesia pada tahun 1979 di kota lama Fatuberliu (Fatuberliu, Manufahi). Dia menceritakan kepada Komisi tentang penghancuran harta bendanya.

*Pada tahun 1979, saya menyerah di Fatuberliu Lama. Kemudian saya disuruh oleh TNI dan Hansip L6 dan L19 untuk membangun rumah dan membuat sawah. Setelah membangun rumah dan membuat sawah kemudian saya disuruh untuk pindah lagi ke Sukaer Laletek oleh camat L7 dan TNI, lalu tanaman-tanaman yang saya tanam seperti, pepaya, ubi dihancurkan semua dan rumah yang saya bangun juga dibakar semua.<sup>70</sup>*

*Dekade 1980-an*

80. Menjelang akhir tahun 1979, hanya ada beberapa lokasi di beberapa distrik yang masih berada di bawah kekuasaan Fretilin/Falintil. Pada awal dekade 1980-an, sementara beberapa warga sipil tetap berada di kamp-kamp pemukiman di bawah kendali langsung Indonesia, banyak penduduk sipil yang sudah kembali ke rumah mereka. Dalam periode ini, ABRI/TNI mampu membangun kapasitas teritorial yang memungkinkan adanya pos-pos militer di desa-desa di seluruh wilayah ini. Penduduk sipil hidup di bawah pengawasan ketat dari ABRI/TNI dan sekutu mereka dari Timor-Leste seperti Hansip dan Babinsa (lihat Bagian 4: Rejim Pendudukan).

81. Jumlah pelanggaran sosial dan ekonomi yang dilaporkan kepada Komisi jauh lebih sedikit dalam periode ini dibanding jumlah laporan selama empat tahun sebelumnya. Antara tahun 1980 dan 1989, operasi-operasi ABRI/TNI ditujukan untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan Fretilin/Falintil, dan sering terkonsentrasi pada wilayah tertentu negeri ini untuk melancarkan operasi ini.

82. Pada pertengahan tahun 1981 militer Indonesia melancarkan Operasi Kikis\*, seperti yang dibahas pada bagian mengenai serangan militer Indonesia terhadap penduduk dan sasaran sipil, di atas. Komisi menerima laporan bahwa selama operasi ini, ABRI/TNI dan anggota Hansip tetap membakar rumah, mencuri ternak dan harta benda, dan menghancurkan tanaman pangan dan bahan makanan lainnya.<sup>71</sup> Komisi, misalnya, menerima 43 laporan mengenai rumah penduduk sipil yang dibakar di desa Mauchiga (Hatu-Builico, Ainaro) antara tanggal 20 dan 24 Agustus 1982 oleh ABRI/TNI dan anggota Hansip.

83. Setelah Indonesia mulai mengkonsolidasikan kekuasaan mereka atas wilayah ini, maka Indonesia mulai memfokuskan tindakan dan perhatiannya pada lokasi, komunitas, dan individu tertentu yang dicurigai berhubungan dengan Resistensi. Upaya militer Indonesia untuk menumpas aktivitas klandestin yang mendukung Resistensi berakibat pada intimidasi dan penindasan di mana-mana. Di seluruh negeri, penangkapan, pemukulan, dan penyiksaan berlanjut disertai dengan pencurian dan perusakan harta benda.<sup>72</sup>

84. Ketika ABRI/TNI berupaya menguasai penduduk sipil yang telah kembali ke daerah asal mereka, mereka sangat mengandalkan orang-orang Timor-Leste yang mereka bina seperti Hansip dan Babinsa. Situasinya sangat represif bagi komunitas penduduk sipil dan kadang-

---

\* Di Timor-Leste ini dikenal dengan nama Operasi Kikis. Ini nama pendek untuk takti militer yang dikenal dengan nama *Operasi Saber Kikis Baratayudha* (dari nama perang di wayang kulit Jawa), juga dikenal dengan nama operasi "Pagar Betis". Ini merupakan teknik menggunakan puluhan ribu penduduk sipil sebagai perisai hidup yang bergerak di depan pasukan ABRI/TNI dalam suatu upaya besar-besaran dan terkoordinasi untuk menjepit pasukan Fretilin/Falintil. Teknik ini pertama dipakai selama pemberontakan Darul Islam pada dekade 1950-an. Lihat misalnya Ken Conboy, KOPASSUS, *Inside Indonesia's Special Forces*, Equinox Publishing (Asia), Jakarta, 2003, hal.297-8. Lihat juga Bagian 3: Sejarah Konflik; Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan.

kadang muncul ketegangan antara ABRI/TNI dan orang Timor-Leste binaan mereka. Beberapa pemberontakan internal oleh orang-orang binaan ini mulai muncul pada awal dekade 1980-an, yang diikuti oleh aksi balas dendam yang kejam terhadap penduduk sipil oleh ABRI/TNI. Pada bulan Agustus 1983, setelah desersi massal anggota Hansip dan Ratih dari ABRI/TNI di Tutuala (Lautém), militer Indonesia melakukan balas dendam dengan membantai puluhan ternak milik keluarga orang-orang yang membangkang.<sup>73</sup>

85. Hukuman kolektif yang diberikan ABRI/TNI terhadap penduduk sipil di Kraras (Viqueque, Viqueque) pada bulan September 1983, yang dilaporkan pada bagian mengenai serangan Indonesia terhadap penduduk dan sasaran sipil, di atas, juga termasuk tindakan penghancuran harta benda. Rumah-rumah dibakar dan ternak dibunuh oleh anggota militer Indonesia sebagai balasan atas pemberontakan Hansip dan Ratih dari Timor-Leste. Dampak sosial dan ekonomi dari aksi ini dan pembantaian skala besar penduduk laki-laki di desa tersebut, menyebabkan kerugian berkelanjutan kepada masyarakat ini sampai sekarang.

86. Di seluruh negeri sepanjang dekade 1980-an tujuan operasional militer Indonesia adalah untuk mematahkan jaringan klandestin antara Fretilin/Falintil dan penduduk sipil yang mendukung mereka. ABRI/TNI dengan bantuan anggota milisi memaksa penduduk sipil untuk terlibat dalam operasi Curlog,<sup>\*</sup> yang bertujuan menghancurkan persediaan bahan makanan agar pasukan Fretilin/Falintil kelaparan.<sup>74</sup> Penduduk sipil menjadi sasaran, rumah mereka dibakar dan harta benda mereka diambil.<sup>75</sup> Lebih jauh, ABRI/TNI juga merampas persediaan bahan makanan penduduk (lihat Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan).<sup>76</sup>

#### *Dekade 1990-an*

87. Selama dekade 1990-an, meskipun ABRI/TNI mempertahankan kehadirannya yang besar di Timor-Leste, ABRI/TNI tidak lagi terlibat dalam operasi militer skala besar. Strategi Resistensi telah berubah dari konflik bersenjata langsung dengan ABRI/TNI ke diplomasi internasional dan perlawanan kota bertumpu pada pertumbuhan gerakan pemuda. Operasi ABRI/TNI terus ditujukan terutama pada penduduk sipil yang dicurigai terlibat aktivitas klandestin yang mendukung Resistensi. Operasi ini sering didukung oleh Hansip dan organisasi para-militer Timor-Leste lainnya yang dibentuk selama periode ini (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik; Bagian 4: Rejim Pendudukan). Polisi anti huru-hara Indonesia, Brimob, juga memainkan peranan sangat aktif dalam menekan pembangkangan pada periode ini.

88. Strategi ABRI/TNI ini selalu melibatkan kekerasan terhadap penduduk sipil. Seperti pada dekade 1970-an dan 1980-an, Komisi menerima berbagai laporan tentang penghancuran rumah dan harta benda lain, serta pencurian dan pemerasan dengan ancaman kekerasan. Komisi juga menerima sejumlah laporan tentang keterlibatan kepolisian Indonesia dalam penganiayaan kejam, perusakan harta benda dan pemerasan selama periode ini.

89. Seperti pada periode-periode sebelumnya, pencurian dan perusakan harta benda selama periode ini paling tepat dipahami sebagai suatu bentuk hukuman yang disengaja. Rumah-rumah dibakar apabila pemiliknya dicurigai mendukung atau bersimpati kepada pasukan Fretilin/Falintil.<sup>77</sup> Sebagai contoh seorang penduduk Ainaro menjelaskan kepada Komisi bahwa tentara ABRI/TNI membakar rumahnya pada bulan November 1991 menjelang pembantaian Santa Cruz, karena ia dicurigai menyimpan bendera RDTL.<sup>78</sup>

90. Seorang deponen lain dari Liquiça menceritakan kepada Komisi bahwa dia ditangkap karena memiliki bendera Fretilin, dan hanya dibebaskan setelah istrinya memberikan uang sebesar Rp. 300000.- dan tujuh koin perak kepada seorang komandan ABRI/TNI.<sup>79</sup> Komisi menerima sejumlah pernyataan dari berbagai wilayah negeri ini, yang mengungkapkan

---

<sup>\*</sup> Curlog artinya Hancur Logistik. Tujuannya menghancurkan segala jenis tanaman pangan yang bisa dipakai Falintil. Ini membatasi persediaan makanan Falintil dan penduduk sipil karena tanaman pangan dihancurkan (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik; Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan).

bagaimana pemerasan yang dilakukan militer dan polisi menjadi hal yang umum selama masa ini. Sering, orang ditahan dan hanya dibebaskan apabila mereka mampu membayar petugas. Keluarga sering diwajibkan membayar untuk pembebasan orang yang mereka kasahi, dan pembayaran dilaporkan berkisar antara Rp 100.000.- dan Rp 1.800.000.-.<sup>80</sup>

91. Praktek-praktek seperti ini pada dasarnya bersifat oportunistik, dan sangat tergantung pada petugas yang terlibat. Aksi-aksi ditujukan pada jaringan aktifis klandestin. Di Baucau, tentara ABRI/TNI merampas harta benda dan barang berharga penduduk dan memeras penduduk sipil yang dituduh bekerja sama dengan Fretilin/Falintil.<sup>81</sup>

92. Di Dili, setelah pembantaian Santa Cruz pada bulan November 1991, ABRI/TNI menggeledah rumah-rumah di seluruh Dili untuk mencari para demonstran yang melarikan diri dari tempat penembakan. Komisi menerima pernyataan yang memberi kesaksian bahwa mereka yang kedapatan menyembunyikan para demonstran, atau yang memiliki buku-buku atau bahan-bahan pro-kemerdekaan, rumahnya dihancurkan.<sup>82</sup>

93. Laporan serupa mengenai kekerasan, pembakaran dan pemerasan selama dekade 1990-an berhasil dihimpun di Ermera. Berbagai unit militer, termasuk Linud 700 (Lintas Udara), ditunjuk sebagai pelaku.<sup>83</sup>

94. Serangan Falintil terhadap ABRI/TNI selama periode ini pada umumnya terbatas pada saat-saat strategis, dengan tujuan mendapatkan efek psikologis paling besar sebagai peringatan akan keberadaan dan kemampuan mereka, atau efek internasional untuk mengingatkan bahwa konflik masih berlanjut (lihat Bagian 5: Resistensi: Struktur dan Strategi). Bila serangan benar-benar terjadi, praktek hukuman secara berwakil atau hukuman kolektif oleh militer Indonesia terhadap penduduk sipil secara rutin dilancarkan. Pada tanggal 9 November 1998, Falintil menyerang Koramil Alas (Manufahi). ABRI/TNI melancarkan operasi besar-besaran dalam upaya menangkap para pelaku serangan tersebut. Selama operasi ini penduduk sipil dibunuh, ditahan dan diperkosa dan harta benda mereka dihancurkan (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa; Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Perlakuan Buruk; Bab 7.7: Kekerasan Seksual).<sup>84</sup> Komisi juga menerima kesaksian José Tilman, seorang penduduk sipil, yang berada selama penghancuran harta benda oleh ABRI/TNI pada waktu serangan itu:

*Pada tanggal 12 November 1998 L12 dan L13 (keduanya orang Timor) dan tentara Koramil lainnya membakar rumah penduduk di Lurin. Mereka mulai dari Kulutetuk dan berakhir di Hasbot. Di Natarwaen, kerusakan meliputi alat-alat upacara tradisional dan harta pribadi. Para penyerang juga menjarah barang-barang keramat, seperti patung orang suci. Saya bersama dengan tentara di Natarwaen. Pertama-tama, mereka membakar rumah Rémigio, kemudian rumah-rumah lainnya... Sebelum itu, mereka menyuruh penduduk desa meninggalkan desa dan menahan mereka di bangunan sekolah dasar (SD Inpres Kota Alas), sekitar 10 meter dari Kantor Koramil 02.<sup>85</sup>*

*Penghancuran pada tahun 1999*

95. Dengan jatuhnya Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998, ruang politik di Timor-Leste tampaknya terbuka pada semester kedua tahun tersebut. Berbagai pawai dan seruan untuk referendum mengenai status politik wilayah ini, yang sebelumnya belum pernah ada, berjalan tanpa mendapat halangan dari militer atau penguasa Indonesia. Meski demikian, 'Musim Semi di Dili' ini tidak berlangsung lama. Laporan mengenai pengurangan jumlah pasukan TNI

---

<sup>80</sup> José Tilman berada di Soe (Timor Barat, Indonesia) ketika dia membuat pernyataan kepada Komisi.

ternyata tidak benar, dan pada akhir tahun 1998 TNI dilaporkan membentuk jaringan milisi di seluruh wilayah ini. Program ini dijalankan dengan cepat di awal-awal bulan tahun 1999 pada saat Indonesia, Portugal dan PBB merundingkan rincian tindakan penentuan nasib sendiri di Timor-Leste (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik; Bagian 4: Rejim Pendudukan).

96. Dengan penandatanganan Kesepakatan 5 Mei dan pengumuman Konsultasi Rakyat, CNRT (*Concelho Nacional da Resistência de Timor-Leste*, atau Dewan Nasional Resistensi Timor-Leste) dan organisasi pelajar mulai melakukan organisasi secara terbuka di seluruh wilayah Timor-Leste sebagai persiapan untuk referendum mengenai masa depan Timor-Leste.

97. Perekrutan, baik dipaksa maupun sukarela, penduduk sipil ke dalam milisi dukungan TNI meningkat pesat pada awal-awal bulan tahun 1999. Bersama TNI dan polisi Indonesia, mereka memulai kampanye teror dengan tujuan mengintimidasi penduduk Timor-Leste untuk mendukung integrasi dengan Indonesia. Tindakan-tindakan kekerasan skala besar dan pola kekerasan dan intimidasi dibahas secara mendalam di beberapa bab di dalam Laporan ini, termasuk Bagian 3: Sejarah Konflik, Bagian 4: Rejim Pendudukan; Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa, Bab 7.3: Pemandangan Paksa dan Kelaparan, Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Perlakuan Buruk, dan Bab 7.7: Kekerasan Seksual. Pelanggaran ekonomi dan harta benda juga umum diterapkan dalam program teror dan intimidasi ini. Semua ini terjadi sebelum Kesepakatan 5 Mei dan Konsultasi Rakyat, menjelang referendum, dan dalam kampanye kekerasan setelah pengumuman hasil yang menolak integrasi dengan Indonesia.

98. Analisa kuantitatif dari pernyataan yang diambil oleh Komisi menunjukkan pola-pola pelanggaran hak-hak asasi manusia, intimidasi dan kekerasan tertentu yang dilakukan oleh TNI dan milisi antara Januari dan Oktober 1999. Khususnya, Pola ini menunjukkan serangan skala besar secara umum terjadi pada periode-periode dimana tidak ada kehadiran staf internasional di wilayah ini: misalnya, pada periode Januari-April sebelum Kesepakatan 5 Mei ditandatangani dan staf PBB dan staf internasional lain ditugaskan di wilayah ini; dan pada periode setelah pengumuman hasil Konsultasi Rakyat saat sebagian besar orang-orang internasional, termasuk media, sudah pergi atau diungsikan dari wilayah ini, atau terkurung di kantor UNAMET di Dili, yang mengakibatkan seluruh komunitas di distrik terlepas dari pengawasan internasional. Analisa kuantitatif ini juga menunjukkan bahwa penghancuran harta benda oleh TNI dan milisi terjadi di semua distrik, meski tingkat kerusakan berbeda-beda antar distrik dan sub-distrik (lihat Bagian 6: Profil Pelanggaran HAM).

99. Saat Presiden Habibie membuat pengumuman pada tanggal 27 Januari 1999 bahwa rakyat Timor-Leste diperbolehkan memilih masa depan politik mereka, 'Musim Semi Dili' sudah berakhir. Setelah serangan TNI terhadap penduduk sipil di Alas (Manufahi) pada bulan November 1998 dan meningkatnya perekrutan milisi, kekerasan TNI dan milisi semakin terjadi di wilayah ini, sementara itu perundingan berlanjut untuk menyetujui rincian tindakan menentukan nasib sendiri.

100. Pada akhir bulan Maret, perundingan berhenti saat wakil Indonesia kembali dari New York ke Jakarta untuk meminta persetujuan akhir tentang Kesepakatan tersebut. Bulan April terjadi peningkatan kekerasan oleh militer Indonesia dan milisi di bawah kekuasaannya, yang ditujukan kepada penduduk sipil. Pembantaian penduduk sipil di Gereja Liquica pada tanggal 6 April merupakan salah satu serangan paling kejam terhadap penduduk sipil, yang diorganisir oleh TNI, polisi dan milisi (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa).

101. Saat PBB belum tiba di wilayah ini, kekerasan ini diorganisir secara terbuka, bahkan terjadi demonstrasi masal pada tanggal 17 April di depan kantor pemerintah di Pantai Dili yang diadakan oleh pemimpin senior milisi dan TNI. Komisi telah mencermati dokumen film tentang demonstrasi, dan melihat kehadiran anggota TNI dan pemimpin milisi seperti Eurico Guterres dan João Tavares. Setelah serangan, milisi berpawai sekeliling kota dengan truk dan sepeda motor dan mengintimidasi penduduk sipil. Mereka menyerang dan membantai pengungsi yang berlindung di rumah Manuel Carrascalão di pusat kota.

102. Selama penyerangan ini pada tanggal 17 April TNI dan milisi juga menghancurkan rumah milik Filomena da Cruz, sekretaris zona gerakan klandestin.<sup>86</sup> Kantor satu-satunya surat kabar di wilayah ini, Suara Timor Timur, juga dihancurkan yang tampaknya merupakan tindakan balas dendam dan intimidasi karena surat kabar yang biasanya pro-integrasi membuat laporan yang relatif terbuka tentang seruan untuk referendum mengenai masa depan wilayah ini (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik).

103. Di Liquiça, militer dan anggota milisi Besi Merah Putih (BMP) juga terlibat dalam serangkaian pembakaran rumah, penjarahan dan pencurian sejak awal tahun 1999.<sup>87</sup>

104. Cerita yang sama tentang keterlibatan langsung militer dalam serangan dan intimidasi terhadap penduduk sipil selama periode ini juga dilaporkan ke Komisi di berbagai bagian yang berbeda di negeri ini. Laporan mengenai kekerasan seperti ini selama periode ini diterima dari distrik Bobonaro,<sup>88</sup> Baucau,<sup>89</sup> Viqueque,<sup>90</sup> Manufahi,<sup>91</sup> Covalima,<sup>92</sup> dan Ermera.<sup>93</sup> Seorang mantan komandan milisi Darah Merah Putih, yang beroperasi di salah satu sub-distrik di Ermera selama periode ini, menceritakan kepada Komisi:

*Pada bulan April 1999, Dandim Kodim 1637 di Ermera yang bernama L20 memberikan tujuh pucuk senjata, satu truk Fuso/Hino, dua buah mobil kijang dan satu buah mobil Taft kepada saya. Pada saat itu pula saya mempunyai 200 orang anggota yang dibentuk dengan tujuan untuk membunuh orang-orang prokemerdekaan di Hatulia. Saya dan 200 anggota menyerang Hatulia...Kami membakar rumah- penduduk di aldeia Kukara, Desa Manusae Kraik. Masyarakat setempat meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri.<sup>94</sup>*

105. Banyak orang lari dari rumah mereka di seluruh wilayah ini karena takut serangan-serangan seperti ini, meninggalkan rumah dan harta benda mereka yang mudah dihancurkan dan dijarah (lihat Bab 7.3: Pemandahan Paksa dan Kelaparan).

106. Daerah kantong distrik Oecusse terutama sangat rawan, karena dikelilingi wilayah Indonesia dan terpisah dari wilayah Timor-Leste lainnya. Meski milisi Sakunar di distrik ini merupakan salah satu milisi terakhir yang dibentuk TNI, pada bulan April 1999, milisi ini terbukti merupakan kelompok yang paling kejam. Jumlah besar penduduk dewasa laki-laki direkrut ke dalam milisi ini, dengan menggunakan berbagai bentuk kekerasan seperti penangkapan, penahanan, intimidasi, penyiksaan dan penghancuran harta benda untuk menakuti penduduk sipil. Seperti di distrik lain, milisi segera mulai membakar dan menjarah rumah-rumah.<sup>95</sup> Mereka yang menjadi sasaran termasuk penduduk pada umumnya, serta secara khusus pendukung pro-kemerdekaan, aktifis dan pemimpin CNRT. Lebih jauh, anggota milisi yang ragu-ragu juga dijadikan sasaran oleh TNI dan pendukung pro-otonomi. Komisi juga menerima laporan tentang pendukung pro-kemerdekaan yang dipaksa membakar rumah pemimpin mereka.<sup>96</sup>

107. Setelah Pengumuman Kesepakatan 5 Mei pendukung pro-otonomi menjadi bersikap marah, dan secara terbuka mengancam akan melakukan teror, pembunuhan, penahanan, perkosaan dan penghancuran rumah dan harta benda. Dalam beberapa hari TNI dan milisi melakukan serangan gabungan terhadap penduduk sipil yang dicurigai mendukung gerakan pro-kemerdekaan di seluruh distrik di wilayah Timor-Leste.<sup>97</sup> Dalam sebuah serangan di Atara dan Lasaun (Atsabe, Ermera) pada tanggal 16 Mei 1999, SGI dan milisi Tim Pancasila membakar rumah, menghancurkan tanaman pangan, dan menjarah harta benda penduduk sipil di kedua desa.<sup>98</sup> Beberapa serangan skala besar juga terjadi. Pada tanggal 8 Mei, tiga hari setelah pengumuman PBB, sekelompok anggota TNI memimpin lebih dari 400 anggota milisi dalam sebuah serangan di desa Tumin (Oesilo, Oecusse) dan membakar rumah, membantai ternak, membunuh sejumlah penduduk sipil, dan memaksa lebih dari 75 orang untuk pergi ke desa Imbate (Timor Barat, Indonesia).<sup>99</sup>

108. Dengan penugasan UNAMET pada bulan Juni, bersama dengan satu kontingen besar media masa dan pengamat internasional, skala kekerasan oleh TNI dan milisi pada umumnya berkurang di seluruh wilayah ini. Namun demikian, kekerasan meningkat di tempat-tempat atau periode tertentu. Hal ini terutama terjadi menjelang Konsultasi Rakyat. Misalnya, pada bulan Agustus TNI dan kelompok milisi meningkatkan kekerasan di Oecusse, dengan sasaran pemimpin dan pendukung CNRT. Pada pagi hari tanggal 28 Agustus 1999, kekuatan gabungan milisi Sakunar dan Besi Merah Putih dari Liquiça, bersama TNI dan anggota polisi Indonesia, menyerang kantor CNRT di Oecusse, menghancurkan kantor ini dan membunuh dua pendukung CNRT yang terperangkap di dalam.<sup>100</sup> Pada hari yang sama, serangan gabungan oleh milisi Sakunar, Aitarak dan Besi Merah Putih, yang bertindak bersama TNI dan polisi Indonesia, mendorong terjadinya penjarahan dan pembakaran rumah di Cruz, Bobometo, Oesilo di Oecusse.<sup>101</sup> Tiga hari kemudian, TNI, milisi dan polisi membakar 120 rumah di kampung Debaha di desa Bobometo (Oesilo, Oecusse).<sup>102</sup>

109. Saat mayoritas rakyat Timor-Leste memutuskan untuk menolak opsi otonomi khusus dan memilih merdeka, militer Indonesia bersama milisi, melancarkan kampanye bumi hangus yang memaksa lebih dari 300.000 orang melarikan diri ke pedalaman, dan 250.000 orang ke Timor Barat.<sup>103</sup> Meski sejumlah orang memilih pergi ke Timor Barat secara sukarela, pada umumnya ini merupakan kampanye yang diorganisir teroris dan intimidasi yang diorganisir militer untuk memindahkan penduduk ke luar wilayah Timor-Leste. Di Timor-Leste, militer Indonesia mendukung dan mengorganisasikan operasi besar-besaran untuk menghancurkan harta benda milik pribadi dan milik pemerintah besar-besaran di seluruh wilayah Timor-Leste. Sebagian besar infrastruktur di Timor-Leste juga diratakan ke tanah, lebih dari 60.000 rumah diperkirakan hancur termasuk harta benda penduduk, dan ternak dibantai di seluruh wilayah Timor-Leste.<sup>104</sup> Selama audiensi Rekonsiliasi Komunitas yang difasilitasi Komisi antara tahun 2002 dan 2004 di seluruh wilayah ini, keluhan umum dari para korban penghancuran harta benda ini ialah kemiskinan berat yang terus berlanjut akibat kekerasan ini (lihat Bagian 9: Rekonsiliasi Komunitas).

110. Komisi menerima pernyataan dan laporan selama lokakarya Profil Komunitas tentang kekerasan setelah referendum yang dilakukan oleh militer Indonesia dan milisi dari setiap distrik. Banyak dari pernyataan laporan ini menekankan bahwa militer Indonesia dan milisi melancarkan operasi bersama, misalnya di Ermera,<sup>105</sup> Manatuto,<sup>106</sup> Manufahi<sup>107</sup> Baucau,<sup>108</sup> Viqueque,<sup>109</sup> Covalima,<sup>110</sup> dan Oecusse.<sup>111</sup>

111. Komisi menerima pernyataan tentang pelanggaran dalam jumlah terbesar selama periode pasca referendum dari distrik Oecusse.\* Ratusan penduduk desa dari sub-distrik Oesillo dipaksa milisi Sakunar dan kemudian oleh militer Indonesia untuk membakar rumah-rumah di desa Bobometo, (Oesilo, Oecusse) dan lokasi lain. Pernyataan yang dibuat kepada Komisi menjelaskan bahwa tindakan ini sering terkoordinasi secara rapi dan merupakan operasi besar.<sup>112</sup> Seperti di tempat lain, serangan sering melibatkan anggota milisi dengan dukungan polisi dan militer.<sup>113</sup>

112. Komisi menerima lebih dari 200 pernyataan dari distrik Bobonaro dalam kaitannya dengan kejahatan berkaitan dengan harta benda sepanjang tahun 1999. Banyak dari pernyataan ini memberi penjelasan terperinci mengenai operasi dan serangan gabungan antara milisi dan militer.<sup>114</sup>

113. Meski pola pembakaran rumah, pembantaian ternak dan penghancuran bahan makanan mirip dengan periode konflik sebelumnya, skala kerusakan dalam periode singkat ini tidak pernah terjadi. Seperti pada dekade 1970-an dan 1980-an tidak ada bukti tentang adanya upaya untuk menghindari atau menghentikan pelanggaran ini oleh polisi Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, dan keamanan, sesuai dengan Kesepakatan 5 Mei. Juga tidak ada bukti militer Indonesia mencoba mencegah penghancuran ini setelah diberi tanggung jawab untuk menegakkan hukum sesuai dekrit keadaan darurat yang dikeluarkan oleh

---

\* 110 pernyataan menyebut 117 kasus dimana ABRI/TNI dan kelompok milisi disebut sebagai pelaku kekerasan.

Presiden Habibie pada awal bulan September. Sebaliknya, terdapat banyak bukti bahwa militer Indonesia merupakan pelaku utama dalam pelanggaran ini. Bukti adanya kolusi antara militer dan berbagai kelompok milisi di seluruh wilayah ini jelas dan sangat memojokkan. Laporan terbaru yang diperkuat oleh ratusan pernyataan yang diberikan kepada Komisi dari orang-orang yang menyaksikan keterlibatan langsung anggota militer dan polisi dalam kekerasan (lihat Bagian 4: Rejim Pendudukan; Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum; Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan; Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Perlakuan Buruk; Bab 7.7: Kekerasan Seksual; Bagian 8: Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban).

114. Tuduhan kolusi dan keterlibatan langsung militer dalam kekerasan juga diperkuat oleh pernyataan yang diberikan kepada Komisi dari mantan anggota milisi, serta pernyataan dan kesaksian dari mantan anggota milisi yang dibuat dalam Audiensi Rekonsiliasi Komunitas di seluruh negeri.<sup>115</sup> Lebih jauh, laporan Profil Komunitas yang dikumpulkan oleh Komisi dari lokakarya yang diselenggarakan di desa-desa di Timor-Leste juga mencatat keterlibatan militer Indonesia dalam operasi besar-besaran untuk menghancurkan harta benda penduduk di Timor-Leste.<sup>116</sup>

115. Komisi juga menerima submisi yang memberikan penjelasan rinci mengenai penjarahan museum nasional di Dili berkaitan dengan ratusan benda-benda budaya dan bersejarah. Submisi-submisi tersebut menulis bahwa anggota TNI menyiapkan truk, mengangkut benda-benda bersejarah tersebut dan membawa mereka ke Timor Barat, Indonesia, tersimpan disana sampai sekarang.\*

#### **Penganiayaan terhadap penempur musuh**

116. Hukum internasional jelas memberi perlindungan bagi penempur yang tertangkap. Biasanya ketika seorang penempur tertangkap oleh musuh, ia mendapat status Tawanan Perang-Prisoners of War (POW). Ini termasuk orang-orang dari salah satu kelompok-kelompok di bawah ini:

---

<sup>\*</sup> Komisi menerima submisi berdasar wawancara dengan Virgilio Simith, yang pada tahun 1999 menjadi anggota senior CNFT yang bertanggung jawab atas urusan kebudayaan. Virgilio Simith menceritakan bahwa hampir 3.000 benda dan peninggalan budaya dibawa oleh penguasa Indonesia dari Museum di Comoro, Dili pada bulan September 1999 dan belum dikembalikan. [Wawancara dengan Virgilio Simith, 7 Juli 2005 oleh David Hicks, Maxine Hicks dan Phyllis Ferguson, submisi ke CAVR. Arsip CAVR. Lihat juga Bagian 3: Sejarah Konflik.

- anggota pasukan bersenjata;
- orang-orang yang secara spontan mengangkat senjata untuk melawan pasukan invasi, dan yang tidak sempat membentuk satuan-satuan yang terorganisasi, tetapi yang membawa senjata secara terang-terangan (kadang disebut *levée en masse*); dan
- pejuang resistensi atau anggota milisi yang mentaati aturan tertentu yang mengharuskan mereka membedakan diri dari penduduk sipil.<sup>117</sup>

### Status Falintil

Falintil bukan merupakan pasukan bersenjata suatu negara yang terlibat konflik, dan karena mereka bukan semata-mata penduduk sipil yang secara spontan mengangkat senjata menghadapi pasukan invasi, mereka tidak dapat disebut *levée en masse*. Falintil, karena itu, hanya bisa mendapat status sebagai tawanan perang apabila mereka memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam Konvensi Jenewa Ketiga untuk gerakan resistensi, milisi dan kelompok-kelompok serupa lainnya.<sup>118</sup> Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kelompok yang dimaksud harus dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya (dengan kata lain, kelompok tersebut harus memiliki struktur komando yang efektif).
- Anggota kelompok tersebut harus mengenakan tanda pengenal yang dapat dikenali dari jauh. Tujuan persyaratan ini adalah untuk memungkinkan musuh membedakan anggota kelompok tersebut (sebagai sasaran militer yang sah) dari penduduk sipil (yang bukan sasaran militer yang sah). Karena alasan tersebut sangat mungkin bahwa menurut ketentuan hukum kebiasaan hal ini diatur dengan persyaratan yang lebih longgar bahwa anggota kelompok ini harus membedakan dirinya dengan warga sipil dengan suatu cara.
- Anggota kelompok tersebut harus membawa senjata secara terbuka; dan
- Kelompok tersebut secara umum harus menjalankan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

Komisi yakin bahwa anggota Falintil cukup memenuhi persyaratan di atas agar dapat diakui sebagai penempur yang memiliki hak untuk tujuan Laporan ini.

Falintil memiliki struktur komando dan disiplin yang relatif ketat dan ditegakkan, membawa senjata secara terbuka dan umumnya melakukan operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. Sejak awal konflik anggota Falintil mengenakan seragam tentara Portugis. Pada tahun 1978 banyak seragam ini sudah usang, sehingga harus diganti beberapa kali dengan seragam militer lain. Namun demikian kombinasi antara seragam dan tanda pengenal yang ada, serta ciri-ciri khusus lainnya, seperti anggota Falintil mengambil kebijakan khusus dan seragam untuk memiliki rambut yang sangat panjang, membuat mereka sangat mudah dibedakan dari jauh.<sup>119</sup>

117. Apabila ada ketidakjelasan apakah seseorang bisa mendapatkan status tawanan perang, maka dia harus diperlakukan sebagai tawanan perang sampai statusnya diputuskan oleh pengadilan yang kompeten.<sup>120</sup>

<sup>119</sup> Pasal 43 (3) Protokol Tambahan Pertama Konvensi Jenewa 1977. kelihatannya bahwa persyaratan yang luas ini merefleksikan kebiasaan yang ada sebelum tahun 1977 atau menjadi kebiasaan segera setelah tahun 1977:: lihat Christopher Greenwood, "Customary Law Status of the 1977 Geneva Protocols", in Astrid J.M. Delissen and Gerard J. Tanja (eds), *Humanitarian Law of Armed Conflict: Challenges Ahead*, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1991, pada hal.107. .

118. Tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi.<sup>121</sup> Mereka tidak boleh disiksa, dibunuh, atau diintimidasi atau dihina.<sup>122</sup> Mereka harus mendapat makanan dan minuman serta perawatan medis yang diperlukan.<sup>123</sup> Mereka harus ditahan di tempat yang jauh dari bahaya serangan selama aktivitas militer berlangsung.<sup>124</sup>

119. Para penempur yang bukan tawanan perang masih berhak atas standar perlakuan tertentu. Di atas segalanya mereka harus diperlakukan secara manusiawi. Mereka juga dilindungi hukum hak-hak asasi manusia, yang melarang pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan penahanan sewenang-wenang, dan mendapat jaminan hak-hak atas peradilan yang adil. Lebih jauh, Konvensi Jenewa Keempat menyatakan bahwa orang-orang yang berada di wilayah pendudukan yang dicurigai melakukan tindakan yang memusuhi kekuatan pendudukan harus diperlakukan secara manusiawi dan berhak atas peradilan yang adil.<sup>125</sup>

120. Komisi mendapatkan salinan dokumen resmi Indonesia yang menjelaskan prosedur interogasi bagi penduduk sipil dan prajurit Falintil yang menyerah atau tertangkap. Dokumen tersebut menyatakan bahwa untuk mendapatkan informasi berkualitas baik, keselamatan tahanan selama interogasi perlu dijamin. Teknik-teknik yang dipakai termasuk meyakinkan para tahanan bahwa ABRI/TNI sadar akan bahaya yang dihadapi para tahanan dari Fretilin/Falintil, sebagai balasan atas informasi sensitif yang diberikan. Dokumen tersebut juga menggarisbawahi hal-hal yang harus dihindari selama interogasi, seperti memaksakan keinginan penginterogasi kepada tahanan, penggunaan kekerasan dan ancaman atau membuat kesimpulan tergesa-gesa.<sup>126</sup>

121. Kenyataannya, para tahanan, dan terutama prajurit Falintil, selalu menjadi sasaran penyiksaan selama interogasi. Beberapa tahanan sengaja dibunuh dan tahanan lain mati karena luka-luka yang dialami selama interogasi. Bab 7.4. dari Laporan ini, tentang Penahanan, Penyiksaan dan Perlakuan Buruk, memberikan rincian mengenai prosedur-prosedur tersebut dan menyimpulkan bahwa modus operandi interogasi pada dasarnya tidak sah.

122. Periode Operasi Seroja oleh militer Indonesia, pada tahun-tahun setelah invasi tahun 1975, paling banyak terjadi penangkapan atau penyerahan diri prajurit Fretilin/Falintil. Militer Indonesia menerapkan operasi khusus untuk mencoba meyakinkan pimpinan senior Fretilin/Falintil untuk menyerah, seperti Operasi Skylight kadang-kadang disebutkan gerakan Skylight (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik). Lebih jauh, Presiden Soeharto menawarkan amnesti kepada anggota Fretilin/Falintil yang menyerah pada tahun 1977. Kedua inisiatif ini gagal menjamin perlindungan bagi anggota Fretilin/Falintil yang menyerahkan diri atau tertangkap, karena banyak yang disiksa dan dibunuh atau dihilangkan (lihat bagian 3: Sejarah Konflik; Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan; Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Perlakuan Buruk). Hal yang masih tidak mungkin adalah menentukan berapa banyak anggota Fretilin/Falintil yang mengalami perlakuan semacam ini selama tahun-tahun Operasi Seroja pada dekade 1970-an.

123. Pernyataan-pernyataan yang diterima Komisi memberikan penjelasan mengenai perlakuan tentara Fretilin/Falintil yang tertangkap, termasuk penyiksaan dan perlakuan buruk.<sup>127</sup> Banyak yang hilang dalam tahanan, tidak pernah terlihat lagi dan dinyatakan meninggal.<sup>128</sup> Seiring dengan banyaknya penduduk sipil yang turun gunung setelah operasi militer besar-besaran yang bertujuan untuk menghancurkan basis Fretilin/Falintil sepanjang tahun 1978, militer Indonesia mencoba mengidentifikasi mereka yang dicurigai sebagai anggota Fretilin/Falintil. Mereka juga menginterogasi penduduk sipil untuk mendapatkan informasi mengenai kekuatan Resistensi yang masih tersisa di gunung. Misalnya, komunitas desa Lifau (Laleia, Manatuto) menjelaskan kepada Komisi bagaimana ABRI/TNI menginterogasi sekelompok orang yang

---

<sup>121</sup> Lebih khususnya, dengan penerapan Klausula Martens (yang tertuang di Konvensi Den Hague IV tahun 1907 dan sejumlah Konvensi lain), "Prinsip Kemanusiaan" berlaku: lihat Laporan Komisi Hukum Internasional mengenai Hasil Sesi ke-empat puluh enam, 2 Mei – 22 Juli 1994, GAOR A/49/10, pada hal. 317; Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons (1986) Laporan ICJ paragraf 78 dan Pendapat Berbeda Hakim Shahabuddeen.

ditangkap di desa mereka. Tiga orang ditemukan sebagai pemimpin Fretilin/Falintil, dan Komisi diberi tahu bahwa mereka dibunuh oleh militer Indonesia.<sup>129</sup> Istilah seperti 'sekolah lagi' atau 'mandi laut' atau 'pergi berenang' menjadi samaran untuk pembunuhan di luar hukum oleh militer Indonesia.<sup>130</sup>

124. Pada tahun 1980, setelah pemberontakan oleh Resistensi dengan penyerangan atas stasiun pemancar televisi di Marabia di luar Dili, militer Indonesia membalas dendamnya dengan perlakuan brutal terhadap mereka yang dicurigai terlibat Resistensi. Ratusan orang ditahan dan disiksa, dan banyak yang dieksekusi atau dihilangkan (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa; Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Perlakuan Buruk). Cerita mengenai pelanggaran yang sama terhadap Fretilin/Falintil juga diterima berkaitan dengan Operasi Kikis pada tahun 1981.<sup>131</sup>

125. Komisi menerima sejumlah laporan tentang penganiayaan dan juga pembunuhan terhadap prajurit Falintil yang tertangkap pada dekade 1980-an.<sup>132</sup> Pada tahun 1984, misalnya, pertempuran meletus antara Falintil dan ABRI/TNI di hutan di sekitar Manatuto, dimana tiga prajurit Falintil tertangkap ABRI/TNI dan dibawa ke Dili. Satu prajurit dimasukkan ke dalam tong yang penuh air selama dua jam, dipaksa tidur dengan pakaian basah, dan dipukuli dengan sebatang kayu di kepala, kaki dan tangannya setiap malam selama satu minggu.<sup>133</sup> Penganiayaan terhadap para penempur dan penduduk sipil terus terjadi selama dekade 1990-an,<sup>134</sup> yang memperkuat dugaan bahwa perlakuan ABRI/TNI terhadap penempur yang tertangkap melanggar prinsip hukum

126. Komisi menyadari bahwa karena terbatasnya waktu dan sumber daya yang dialokasikan untuk kerja Komisi ini, dan keterbatasan akses ke dokumen militer Indonesia, banyak kasus penganiayaan dan pembunuhan pejuang Falintil yang tertangkap atau menyerahkan diri tidak dilaporkan selama kegiatan pengumpulan informasi Komisi. Penelitian lebih lanjut mengenai pengalaman pasukan Falintil/Fretilin selama periode ini perlu dilakukan untuk memperkaya materi yang dimiliki Komisi.

### **Sarana Perang di Luar Hukum**

127. Hukum humaniter membatasi jenis senjata dan teknik ("sarana perang") yang boleh digunakan untuk melukai pasukan lawan.<sup>135</sup> Dua prinsip umum berlaku:

1. Dilarang menggunakan sarana perang yang menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu<sup>136</sup>
2. Dilarang menggunakan sarana perang yang tidak memungkinkan penyerang untuk membedakan antara sasaran militer dan sipil ("sarana yang tidak membedakan").<sup>137</sup> Larangan ini mencakup taktik seperti meracuni air atau bahan makanan,<sup>138</sup> dan usaha untuk membuat penduduk kelaparan.<sup>139</sup>

128. Invasi Indonesia ke Timor-Leste pada tahun 1975 adalah operasi militer skala besar, yang melibatkan ribuan pasukan yang menggunakan peralatan tempur berat maupun ringan. Dokumen militer resmi yang diperoleh Komisi berisi daftar senjata dan prosedur yang digunakan selama operasi di Timor-Leste.<sup>140</sup> Kebanyakan prosedur ini tujuan utamanya adalah penghancuran skala besar, meski ABRI/TNI sering menggunakan bom-bom ini dalam operasi mereka untuk menghancurkan sasaran non-militer termasuk rumah penduduk sipil, panen tanaman pangan, sawah, dan bahkan penduduk sipil, yang mencerminkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional.

129. Komisi juga mendapatkan informasi tentang jenis amunisi yang digunakan oleh militer Indonesia selama operasinya di Timor-Leste.<sup>141</sup> Meskipun hukum perang mengizinkan penggunaan jenis-jenis amunisi yang ada dalam daftar untuk operasi militer dengan sasaran pasukan bersenjata lawan dan target militer, atau target sipil tertentu yang digunakan untuk

tujuan militer, amunisi ini tidak dapat digunakan untuk menyerang penduduk sipil selama operasi militer, atau dalam situasi di mana sulit untuk membedakan antara penempur dan penduduk sipil. Komisi juga menerima laporan yang menyatakan bahwa ABRI menanam ranjau di bangunan sipil atau sekitarnya. Penduduk desa Maneluma (Laulara, Aileu) menceritakan kepada Komisi bahwa pada tahun 1978, banyak penduduk desa menyerahkan diri kepada ABRI. Saat itu, salah seorang penduduk, Aurelia Daumali, dilaporkan menginjak ranjau saat sedang mencari makanan di sekitar gereja, dan meninggal.<sup>142</sup>

130. Komisi menerima pernyataan-pernyataan berkaitan dengan 285 pengeboman dari udara oleh militer Indonesia antara tahun 1975 dan 1979, dan 125 di antaranya merinci bagaimana pengeboman tersebut menewaskan penduduk sipil, menghancurkan rumah-rumah, serta bangunan-bangunan lain dan tanaman pangan. Pengeboman terjadi di semua distrik, kecuali Oecusse. Sebagian besar laporan yang diterima berkaitan dengan pengeboman yang terjadi pada tahun 1978, ketika *Zona Libertadas* (zona bebas) mengalami serangan hebat, yang mengakibatkan banyak penduduk sipil meninggal dan kehancuran zona-zona ini dan ribuan penduduk sipil menyerahkan diri kepada pasukan ABRI/TNI (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa; Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan).

131. Sejumlah laporan Profil Komunitas di Komisi memberi konfirmasi bahwa pengeboman udara membunuh banyak penduduk sipil yang melarikan diri dari invasi. Komisi menerima sejumlah laporan yang memastikan penggunaan senjata kimia atau biologis oleh pasukan Indonesia terhadap penduduk sipil dan sasaran militer.<sup>\*</sup> Masyarakat desa di berbagai tempat mengatakan kepada Komisi tentang banyaknya korban meninggal akibat keracunan setelah pengeboman udara Indonesia. Lokakarya Profil Korban dari sub-distrik Atsabe (Ermera) menyatakan bahwa pengeboman di wilayah-wilayah mereka selama tahun 1976 dan 1977 menyebabkan kelumpuhan anggota badan dan akhirnya menyebabkan kematian, dan menyatakan bahwa sebanyak 2.500 orang mati akibat keracunan.<sup>143</sup> Peristiwa serupa terjadi di Lacro (Atsabe, Ermera) dan Paramin (Atsabe, Ermera) pada bulan Januari 1977. Sekitar 1.500 penduduk desa yang pindah ke Cailaco di Lesumau (Atsabe, Ermera) untuk menghindari dari kelaparan akhirnya meninggal setelah makan sayuran, jagung, dan minum air. Korban yang selamat menceritakan kepada Komisi bahwa mereka yakin bahwa hal ini disebabkan karena racun yang dijatuhkan oleh para pesawat pengebom Indonesia.<sup>144</sup> Dalam kejadian selanjutnya pada tahun 1978 di Laubono di desa Lesumau (Atsabe, Ermera) banyak penduduk desa dari Lasaun (Atsabe, Ermera), bersama prajurit Falintil yang berkumpul di Lesumau mati karena keracunan makanan dan air dalam masa satu bulan setelah pengeboman ABRI.<sup>145</sup> Penduduk desa di Guololo (Letefoho, Ermera) juga mengatakan kepada Komisi bahwa sepanjang bulan Juni 1978 banyak penduduk sipil di Cailaco (Bobonaro) meninggal karena keracunan makanan dan air.<sup>146</sup>

132. Augusto Soares, yang saat itu berusia 17 tahun, menceritakan kepada Komisi tentang kematian penduduk sipil akibat keracunan di Lesumau (Atsabe, Ermera) antara tahun 1977 dan 1978:

---

<sup>\*</sup> Beberapa pernyataan (lihat misalnya Pernyataan HRVD 04078) berisi rincian tentang bom yang menunjukkan bahwa ini lebih dari pada aturan standar. [Lihat juga wawancara CAVR dengan Francisco Barbosa, Desa Manumera (Turiscai, manufahi), 8 September 2003]

*Akibat dari pegeboman racun tersebut mengakibatkan semua bahan makanan terkontaminasi dengan racun, apabila penduduk pergi memetik dedaunan liar, dimasak kemudian dimakan meninggal, minum air bersih juga meninggal, menggali ubi kayu sedalam 15 sentimeter untuk dimakan juga meninggal. Jadi penduduk yang meninggal akibat bom racun tersebut kira-kira 400 orang, yang paling banyak adalah penduduk Desa Katrai Kraik [Letefoho, Ermera], yaitu satu RK semuanya meninggal, yang hidup hanya seorang nenek dan anak perempuannya. Sekarang mereka tinggal di Desa Katrai Kraik.<sup>147</sup>*

133. Augusto Soares mengatakan kepada Komisi bahwa ribuan orang yang melarikan diri dari ABRI/TNI bergerak dari Letefoho (Ermera), ke Ermera, Ainaro, Aileu, dan Cailaco (Bobonaro) berlindung di basis Fretilin/Falintil di Katrai Leten, di kaki Gunung Ramelau (Letefoho, Ermera). Pasukan Falintil mengumpulkan para pengungsi ini di luar jangkauan tembakan sehingga mereka bisa bercocok tanam untuk menghindari kelaparan. Pada tahun 1978, militer Indonesia menyerang Katrai Leten dari Atsabe (Ermera), Same (Manufahi), dan Bobonaro. Mereka mengepung desa-desa penduduk dan menembakkan mortir, bazoka, dan meriam dari keempat arah, sementara pesawat-pesawat menjatuhkan bom yang mengakibatkan banyak korban meninggal, serta kehancuran basis Katrai Leten dan tertangkapnya banyak penduduk sipil.<sup>148</sup>

134. Komisi juga menerima laporan-laporan tentang helikopter-helikopter yang menjatuhkan racun, yang menyebabkan lebih dari 200 penduduk sipil meninggal di desa Bora dan Manelima (Laclubar, Manatuto).<sup>149</sup> Komisi tidak bisa menentukan jenis-jenis bom yang digunakan untuk meracuni tanaman pangan dan air, karena keterbatasan akses ke dokumen militer Indonesia. Setelah Operasi Seroja selesai, militer Indonesia tetap menggunakan racun yang mengakibatkan hancurnya semua pohon dan tanaman. Penduduk desa Kakae Uman (Natabora/Barique, Manatuto) melaporkan bahwa militer Indonesia meracuni tanaman pangan selama Operasi Kikis pada tahun 1981. Masyarakat juga mengatakan kepada Komisi bahwa selama satu bulan pada tahun 1983, militer Indonesia memaksa penduduk desa terlibat dalam sebuah operasi di hutan dan meracuni semua tanaman pangan, yang menurut beberapa orang hal tersebut dilakukan untuk meracuni dan membunuh prajurit Falintil yang mungkin memakan tanaman tersebut.<sup>150</sup>

135. Pasukan Indonesia sangat mengandalkan bom-bom berkekuatan besar yang mempunyai akurasi terbatas, yang mengakibatkan banyak korban penduduk sipil meskipun bom-bom ini ditujukan kepada sasaran militer. Komisi menerima pernyataan, misalnya, bahwa pada tahun 1978 hingga 800 orang dari desa Guruça (Quelicai, Baucau) yang melarikan diri ke Gunung Matebian meninggal dari pegeboman udara.<sup>151</sup> Sejumlah laporan lain dari masyarakat jelas menggambarkan kerusakan yang disebabkan oleh kampanye pegeboman tanpa henti selama periode ini.<sup>152</sup>

136. Menurut Lucas da Costa Xavier, mantan prajurit ABRI/TNI yang bertugas di Same (Manufahi) yang terlibat dalam sejumlah operasi militer, selama dua minggu pada tahun 1978 militer Indonesia menembakkan roket ke semua arah setiap malam, termasuk ke daerah-daerah yang diduga menjadi tempat persembunyian Fretilin di Tutuluro, Kablaki, Roin, dan Hola Rua (Same, Manufahi). Lucas da Costa Xavier mengatakan kepada Komisi bahwa seorang penduduk sipil memberitahu dia tentang operasi terkait, bahwa :

*Bom yang dijatuhkan itu apabila mengenai pohon–pohon dan rumput langsung terbakar dan apabila mengenai air maka air tersebut tidak boleh diminum karena sudah mengandung racun. Ada banyak masyarakat sipil yang mati akibat minum air yang terkena fragmentasi bom yang di jatuhkan dari pesawat dan banyak sekali masyarakat yang mati karena terbakar api.... Saat itu juga musim kemarau sehingga rumput–rumput itu mudah sekali terbakar api.<sup>153</sup>*

137. Berdasarkan gambaran yang diberikan kepada Komisi tentang pengeboman- pengeboman tersebut, dan tujuan-tujuan strategis kampanye militer menghadapi gerilya, Komisi menyimpulkan bahwa bom api digunakan dalam kampanye-kampanye tersebut. Pesawat-pesawat OV-10 buatan Amerika telah digunakan.<sup>154</sup> dilengkapi dengan senjata ringan, roket, dan *Opalm*, bom sejenis *Napalm* buatan Soviet yang dibeli Indonesia selama kampanyenya di Irian Barat pada tahun 1962.<sup>155</sup> Komisi menerima salinan film propaganda militer Indonesia tentang kampanye pada akhir dekade 1970-an, termasuk dokumen panjang mengenai persiapan pengeboman di Bandara Baucau, serta dokumen mengenai pengeboman itu sendiri. Dalam dokumen tersebut, anggota militer Indonesia terlihat di film sedang memuat bom-bom bertuliskan 'OPALM' ke dalam pesawat-pesawat OV-10 Bronco di Bandara Baucau. Pesawat-pesawat tersebut kemudian terlihat lepas landas.<sup>156</sup> Lebih jauh, dokumen rahasia militer Indonesia yang diserahkan ke Komisi berisi rincian tentang senjata yang digunakan, termasuk bom OPALM, yaitu bom yang efeknya luas dan sasarannya tidak jelas, dan penggunaan pesawat OV-10 Bronco dan Sky Hawk. Tabel-tabel berikut diambil dari dokumen rahasia Indonesia.

**Table 1 - Kemampuan Taktis Pesawat.\***

Tipe Senjata	A-4 SKY HAWK	OV-10F BRONCO
Senjata Otomatis	Dua meriam 30 MM (250 peluru)	4 meriam 12,7 (1600 peluru)
Roket	6 Peluncur (42 Rx FFAR-2,75)	4 Peluncur (28Rx FFAR-2,75)
Bom	8 bom	5 bom
Amunisi	Peluru 30 MM	Peluru 12,7 MM
	Roket FFAR 2,75 inci	Roket FFAR 2,75 inci
	Bom MK-81-130 Kg	Bom MK-81-130-Kg
	Bom MK-82-250 Kg	Bom MK-82-250 Kg
	Bom FAB-250 Kg	Bom FAB 25 Kg
	Bom OFAB-100 Kg	Bom OFAB 100 Kg
	Bom TAL-1-250 Kg	Bom TAL 1-250 Kg
	Bom ZHB-100 Kg	Bom ZHB-100 Kg
	Bom MK-1-130 Kg	

\* Prosedur Operasional Resmi, No. PROTAP 3/IV/1988, Kemampuan Taktis Pesawat, 30 April 1988, Angkatan Bersenjata Indonesia, Komando Operasi Keamanan Timor Timur.

**Table 2 - Jenis Amunisi dan Jangkauan mereka**

Amunisi	Kemampuan	Minimum Jangkauan
Peluru 12,7 MM	Anti-personil, radius 10 M	500 M
Peluru 30 MM	Anti-personil dan mampu menembus baja, radius 35 M	500 M
Roket FFAR 2,75 inci	Anti-Tank dan Anti-personil, radius 130 M	700 M
Bom KM-1-130 Kg	Manfaat Umum, radius 400 M	1.700 M
Bom MK-82-250 Kg	Manfaat Umum, radius 540 M	2.000 M2.000 M
Bom MK-5B-250 Kg	Sasaran pembakaran, dengan panas mencapai +/- 1725 derajat Celcius selama 15 menit, radius 600 M	2.000 M
Bom TAL-1- 250 Kg	Anti-personil, radius 260 M	2.000 M
Bom FAB-250 Kg	Anti-personil dan sasaran lunak (rumah), radius 495 M	1.700 M
Bom OFAB-100 Kg	Anti-personil dan sasaran keras (gudang), radius 370 M radius	1.700 M
Bom ZHB-100 Kg	Anti-personil dan membakar dalam radius 340 M	1.500 M
OPALM	Membakar sasaran dengan panas mencapai +/- 1.725 derajat Celcius, radisu 400 M	

*Prosedur Resmi Operasional, No.: PROTAP/3/IV/1988, kemampuan pesawat Taktis, 30 April 1988, Angkatan Bersenjata Indonesia, Komando Operasi Keamanan Timor Timur.*

138. Tabel Satu menunjukkan pentingnya pesawat-pesawat buatan luar negeri dalam penyerangan, dan kemampuan luar biasa dari pesawat-pesawat ini. Tabel Dua membuktikan pasokan "OPALM" yang dipakai di Timor-Leste, dan bom seperti dicantumkan di atas yang digunakan untuk sasaran lunak (rumah), serta bom anti-personil dengan radius cukup besar dan "membakar sasaran" yang tidak mungkin ada jaminan keselamatan dengan hanya ditujukan kepada sasaran militer jika dipakai di daerah pegunungan yang dekat penduduk sipil. Dokumen tersebut dari tahun 1988, tetapi kesaksian di hadapan Komisi membuktikan adanya pemakaian OV-10 Bronco pada akhir dekade 1970-an yang melancarkan serangan pengeboman di wilayah-wilayah padat penduduk dengan efek yang sangat mengerikan bagi penduduk sipil (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik; dan Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan).

139. Meskipun sebuah perjanjian yang melarang penggunaan senjata-senjata pembakar seperti Napalm belum dibuat hingga tahun 1980,<sup>157</sup> dan tidak pernah didatangi atau diratifikasi oleh Indonesia, sebagian besar penggunaan senjata perang semacam ini melanggar prinsip-prinsip umum yang melarang cara perang dan persenjataan yang mengakibatkan luka berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu.

140. Adriano João, yang menjadi *Delegado* (wakil) Fretilin di Cailaco (Bobonaro) hingga tahun 1979, menceritakan kepada Komisi bahwa pada tahun 1977 bom-bom Napalm dan roket-roket ditembakkan pesawat militer Sky Hawk, yang menimbulkan iritasi kulit yang parah dan kematian penduduk sipil.<sup>158</sup> Penduduk desa Obulo dan Butamanu (Atsabe, Ermera) juga melaporkan bahwa militer Indonesia menjatuhkan bom-bom Napalm di Atasuro di Lesumau, yang menyebabkan kematian dua belas penduduk sipil pada tahun 1979.<sup>159</sup>

### **Perekrutan Paksa ke dalam Kegiatan Militer**

141. Hukum humaniter melarang pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memaksa warga negara musuh untuk mengambil bagian dalam operasi militer melawan negaranya sendiri.<sup>160</sup> Kekuatan pendudukan tidak boleh memaksa penduduk sipil untuk berdinasi di dalam pasukan militer atau pasukan binaannya,<sup>161</sup> dan tidak boleh menggunakan tekanan atau propaganda untuk mendorong pendaftaran ke dalam dinas militernya.<sup>162</sup>

142. Setelah invasi pada akhir tahun 1975 dan operasi-operasi militer sesudahnya untuk menguasai wilayah Timor-Leste, militer Indonesia memulai proses untuk merekrut penduduk sipil Timor-Leste untuk membantu mereka dalam operasi-operasi militer. Mulai akhir tahun 1974 militer Indonesia telah melatih anggota partai politik pro-integrasi Apodeti, dan menyebut mereka kekuatan partisan. Anggota partai politik UDT yang lari ke Timor Barat, Indonesia setelah kekalahan dalam konflik internal bersenjata bergabung dengan Partisan dan membantu militer Indonesia dalam operasi-operasi lintas batas dan akhirnya dalam invasi skala penuh. Setelah invasi Dili dan Baucau, dan setelah menguasai wilayah distrik-distrik di bagian barat Timor-Leste, militer Indonesia mulai melakukan proses perekrutan penduduk sipil, terutama laki-laki dewasa dan anak-anak, untuk digunakan mengangkut barang dan kebutuhan logistik militer lainnya. Kampanye perekrutan ini dikenal dengan istilah Tenaga Bantuan Operasi (TBO). TBO sering menyertai pasukan ke garis depan pertempuran, membawa amunisi dan barang-barang lainnya. Kadang mereka bertindak sebagai penunjuk jalan bagi militer Indonesia, dan bahkan disusupkan ke *zonas libertadas* sebagai mata-mata ABRI/TNI (lihat Bab 7.8: Hak Anak, terutama kotak mengenai peran TBO dalam operasi militer).

143. Beberapa operasi militer tertentu melibatkan perekrutan paksa penduduk sipil. Operasi Kikis, seperti dibahas di atas, misalnya, mewajibkan partisipasi paksa penduduk sipil secara masal (lihat juga Bagian 3: Sejarah Konflik); Pasukan Tombak, seperti dibahas di bawah; pencarian paksa keluarga penduduk sipil di hutan dan gunung; tugas jaga malam di komunitas tertentu; serta partisipasi paksa dalam pertahanan sipil dan struktur milisi lokal.

144. Pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Komisi menunjukkan bahwa perekrutan penduduk sipil oleh militer Indonesia, baik yang dipaksa maupun yang tidak, terutama ditujukan pada laki-laki dewasa, meski juga melibatkan sejumlah besar anak-anak (lihat Bab 7.8: Hak Anak). Pernyataan-pernyataan di atas juga menyatakan bahwa perekrutan ini dimulai sebelum invasi, dan meningkat setelah invasi, dan terus meningkat secara tetap selama periode Operasi Seroja antara tahun 1975 sampai tahun 1979. Antara akhir tahun 1979 dan 1981, sebelum Operasi Kikis dimulai, perekrutan menyusut. Perekrutan ini meningkat secara pesat melalui kampanye perekrutan besar-besaran yang menyertai Operasi Kikis tahun 1981. Setelah Operasi ini, jumlah penduduk sipil yang direkrut terus menurun, sebelum meningkat kembali pada akhir 1998 dan awal 1999.

145. Komisi mengambil pernyataan sekitar 405 kasus perekrutan paksa penduduk sipil ke dalam operasi militer Indonesia selama periode tahun 1975-1979. Sebanyak 292 kasus lainnya juga diterima selama periode 1980-1990, dan ini menurun menjadi 143 kasus selama periode 1990-1999. Jumlah kasus perekrutan meningkat lagi pada akhir 1998 dan awal 1999 ketika militer Indonesia mulai melancarkan kampanye pembentukan kelompok milisi pro-otonomi di seluruh Timor-Leste. Jumlah kasus perekrutan TBO yang dilaporkan yang relatif sedikit selama periode Operasi Seroja dan Operasi Kikis, ketika banyak penduduk sipil direkrut paksa untuk mendukung operasi militer di seluruh wilayah Timor-Leste, konsisten dengan opini publik yang pada umumnya tidak menganggap perekrutan paksa sebagai pelanggaran berat dibanding pelanggaran lainnya yang terjadi dimana-mana selama tahun-tahun penahanan dan penyiksaan, pembunuhan dan penghilangan dan pelanggaran berat lainnya.

146. Komisi menyadari bahwa tidak semua orang Timor-Leste yang terlibat sebagai TBO atau dalam kapasitas lain untuk mendukung militer Indonesia dipaksa melakukan hal tersebut. Jelas ada orang yang menjadi TBO atau personil pendukung lainnya dalam tubuh ABRI/TNI karena berbagai alasan ekonomi, keamanan, pribadi dan politik (lihat Bagian 4: Rejim Pendudukan; Bab 7.8: Hak Anak, sub-bab mengenai TBO anak).

[Insert Graph G122Mhrvd 2100.pdf](#)

### *Pola-pola Perekrutan*

147. Dalam setiap periode konflik, pendaftaran dan perekrutan paksa penduduk sipil Timor-Leste digunakan untuk tujuan strategis militer dan politis tertentu. Selain manfaat-manfaat praktis seperti menggunakan 'tenaga kerja' lokal, praktek ini juga bermanfaat untuk memecah belah dan melemahkan komunitas Timor-Leste dan masyarakat pada umumnya, serta memberi dasar bagi propaganda Indonesia bahwa ada banyak dukungan bagi kehadiran mereka di Timor-Leste.

148. Walaupun perekrutan ditujukan bagi laki-laki dewasa, Komisi menerima bukti jelas bahwa perempuan dan anak-anak juga dipaksa berpartisipasi di sejumlah lokasi dalam berbagai operasi militer. Perekrutan paksa digunakan sebagai taktik untuk mengkonsolidasi invasi, dan bahkan digunakan dalam tahap pra-invasi ketika pasukan Indonesia secara rahasia menyusup ke bagian barat wilayah ini. Odete dos Santos mengatakan kepada Komisi tentang perekrutan paksa sebagai TBO sebelum invasi skala penuh terjadi.

*Pada tahun 1975 L20, (mantan Bupati Bobonaro) dari partai UDT, memaksa keluarga saya dan saya untuk pindah ke Atambua [Timor Barat]. Di sana [Atambua], TNI memaksa dua orang, Lesu Bere dan Alfredo Lopes, untuk menjadi TBO.*

*Mereka kemudian ikut operasi di Atabae [Bobonaro] bersama TNI. Lesu Bere ditembak mati oleh TNI di Atsabe. Mayatnya dibawa dan dikubur di dekat perbatasan dengan Atambua. TNI juga membunuh dan mengubur Alfredo Lopes di Maliana [Bobonaro]. Kuburannya masih ada di sana sampai sekarang.<sup>163</sup>*

149. Selama periode Operasi Seroja pada tahun-tahun setelah invasi, Komisi menerima pernyataan tentang perekrutan paksa oleh militer Indonesia di setiap distrik di wilayah Timor-Leste kecuali Oecusse, karena tidak ada operasi militer saat itu.

150. Kebanyakan perekrutan TBO terjadi pada tahun-tahun awal Operasi Seroja antara tahun 1975-1979, masa-masa dimana militer Indonesia melancarkan operasi militer besar-besaran di seluruh wilayah Timor-Leste dalam upaya untuk mengalahkan resistensi bersenjata Fretilin/Falintil. TBO direkrut secara luas dari kelompok penduduk sipil yang menyerah selama periode ini.

151. Kesaksian yang diterima Komisi menunjukkan bahwa militer Indonesia sengaja mencari pendukung Fretilin atau anggota Falintil untuk dijadikan TBO. Maumali Sarmento, anggota Fretilin berusia 31 tahun ditangkap ABRI pada hari pertama invasi dilancarkan dan tetap menjadi TBO selama tiga tahun. Dia mengatakan kepada Komisi:

*Pada tanggal 7 Desember 1975, ketika invasi militer Indonesia ke Dili dilancarkan saya menjadi anggota Fretilin bersama dua teman, Mau Mali dan Domingos da Silva. Kami dipaksa direkrut menjadi TBO oleh anggota pasukan Marinir 1, Zipur 10 dan Armed 1. Kami berangkat bersama pasukan dalam operasi sampai Metinaro. Selama tiga tahun kami menjadi TBO, tugas kami termasuk mengumpulkan kayu bakar, memasak, mengambil air dan mencuci pakaian.<sup>164</sup>*

152. Kesaksian serupa diterima dari José Nunes de Andrade, seorang simpatisan Fretilin yang melarikan diri ke Same pada tahun 1975, dan ditangkap ABRI saat mereka menguasai wilayah tersebut. Ia digunakan sebagai pengangkut barang dengan berjalan kaki melintasi pegunungan, dan tetap menjadi TBO sampai tahun 1979.<sup>165</sup> Flaviano dos Santos adalah anggota Falintil bersenjata saat ditangkap di Atabae (Bobonaro) pada tahun 1975. Dia mengatakan kepada Komisi bahwa setelah ditangkap dia dipaksa membawa makanan dan amunisi untuk dua batalyon militer selama 9 bulan. Pada tahun 1976, ketika ia diizinkan kembali ke daerah asalnya, milisi Timor setempat serta anggota ABRI telah merampas rumahnya dan harta miliknya yang lain.<sup>166</sup>

153. Pada bulan Januari 1976, ketika ABRI merebut Atabae (Bobonaro), banyak penduduk sipil menyerah atau ditangkap oleh mereka. Agostinho dos Santos Barreto mengatakan kepada Komisi bahwa sekitar 400 penduduk sipil dipaksa menjadi TBO dalam operasi-operasi militer di sekitar Bobonaro, dan di Maubara (Liquiça), sebelum kembali ke Atabae dimana sebagian diizinkan kembali ke keluarganya masing-masing sementara yang lainnya dipaksa tetap menjadi TBO.<sup>167</sup>

154. Cerita serupa dilaporkan kepada Komisi oleh penduduk desa Guruça (Quelicai, Baucau). Pada bulan Mei 1978, 500 penduduk menyerahkan diri kepada militer Indonesia setelah turun dari Gunung Matebian. Walaupun banyak di antara para laki-laki yang sakit dan lemah, mereka dipaksa untuk bekerja bagi ABRI dan Hansip, dimana sekitar 60 orang direkrut sebagai TBO untuk operasi militer Indonesia, sementara para perempuan dipaksa ikut jaga malam.<sup>168</sup>

155. Beberapa laporan yang diterima Komisi mengungkap bagaimana anggota Fretilin/Falintil yang menyerah atau ditangkap selama masa ini kadang dipaksa untuk kembali ke hutan untuk mencari Falintil. Pada tahun 1978, misalnya, Horacio Sousa, yang berjuang dengan pasukan Falintil yang beroperasi di Nunululi (Laclubar, Manatuto), ditangkap bersama empat orang lainnya. Setelah mendekam satu minggu dalam penahanan di Fatumakerek-Laclubar, mereka diberi seragam Hansip dan senjata dan dipaksa berpartisipasi dalam serangkaian operasi militer bersama Linud 100 di sekitar Laclubar (Manatuto), Alas (Manufahi) dan Maubisse (Ainaro).<sup>169</sup>

156. Komisi menerima kesaksian dan mendengar dari masyarakat di wilayah timur bahwa TBO orang Timor-Leste terlibat dalam serangan akhir ABRI/TNI di Gunung Matebian.<sup>170</sup>

157. Kampanye perekrutan masal yang mengerahkan penduduk sipil untuk digunakan dalam Operasi Kikis tidak pernah terjadi sebelumnya, karena melibatkan struktur pemerintahan sipil setempat yang didirikan untuk melengkapi administrasi militer yang secara efektif menguasai wilayah. Partisipasi bersifat wajib, dan Komisi menerima sejumlah laporan tentang penyiksaan terhadap penduduk sipil yang menolak untuk terlibat.<sup>171</sup>

158. Operasi-operasi serupa juga dilancarkan oleh militer Indonesia sepanjang tahun 1982 dan 1983, dalam upaya mencari sisa-sisa pejuang Fretilin/Falintil. Meskipun demikian selama periode ini perekrutan penduduk sipil relatif terbatas dan kampanye militer hanya terbatas pada operasi-operasi pencarian di daerah-daerah tertentu. Selama operasi tersebut penduduk desa diperintahkan untuk menghancurkan, meracuni dan membakar tanaman pangan yang mereka temukan untuk mencegah agar Fretilin/Falintil tidak bisa memanfaatkannya.<sup>172</sup>

#### *Kerja sebagai TBO—resiko dan bahayanya*

159. Kondisi kerja bagi TBO sungguh berat, dan mereka sering berada dalam situasi yang mengancam keselamatan jiwa mereka. Bahaya dan ancaman datang dari berbagai sumber. Gizi yang buruk dan penyakit melemahkan dan membunuh banyak orang; TBO sering menjadi korban dalam pertempuran, ditangkap atau dibunuh oleh pasukan Fretilin/Falintil; beberapa TBO

dibunuh oleh militer Indonesia; sementara TBO lainnya tidak pernah kembali dari operasi-operasi dan tetap hilang hingga kini.

160. Floréntino Santos dari desa Talimoro (Ermera, Ermera) mengatakan kepada Komisi bahwa kakak laki-lakinya yang dipaksa menjadi TBO di Liquiça ditangkap dan dibunuh oleh Falintil pada tahun 1976.<sup>173</sup> Moises da Costa, yang berusia 11 tahun ketika bapaknya menyerahkan diri kepada militer Indonesia pada tahun 1978, mengatakan kepada Komisi bahwa bapaknya dipaksa kembali ke hutan untuk mencari keluarganya, tetapi ditangkap dan dibunuh oleh Falintil yang menuduhnya sebagai mata-mata ABRI.<sup>174</sup> Komisi menerima sejumlah laporan tentang orang-orang yang hilang, dimana terakhir kali diketahui direkrut sebagai TBO, tapi tidak pernah kembali dari operasi.<sup>175</sup>

161. Lokakarya Profil Komunitas Komisi juga memberikan penjelasan mengenai dampak perekrutan TBO. Penduduk desa Defawassi, (Baguia, Baucau) misalnya, menjelaskan bagaimana mereka menyerahkan diri kepada pasukan ABRI pada bulan Oktober 1978 setelah serangan di Gunung Matebian. Militer Indonesia memaksa mereka tinggal di kamp-kamp, dimana banyak yang meninggal akibat penyakit dan kelaparan, dan mereka yang masih memiliki keluarga di hutan disiksa. Para laki-laki dipaksa bekerja sebagai TBO. Sekitar 40 pemuda Defawassi menjadi TBO, dan sebagian besar meninggal dalam pertempuran.<sup>176</sup>

162. TBO anak terutama paling rentan dan banyak yang diduga meninggal akibat kelelahan, dan kesehatan yang buruk karena kekurangan makanan dan obat-obatan, karena harus membawa beban berat dalam operasi militer. Menurut Domingas Freitas, misalnya, adik laki-lakinya Rai Ano dan temannya, Zeca, direkrut sebagai TBO di Viqueque pada tahun 1978. Domingas Freitas diberi tahu oleh Zeca bahwa Rai Ano meninggal di kota Uatu-Lari (Viqueque) karena kondisi fisik mereka yang lemah dan mereka dipaksa membawa peralatan tempur yang berat.<sup>177</sup>

163. Banyak TBO dijadikan sasaran perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan. Anacleto Pires dari Katrai Kraik (Letefoho, Ermera) misalnya, menjelaskan kepada Komisi bahwa pada tahun 1976 dia dibawa secara paksa ke ABRI oleh kepala kampung setempat, yang memaksa dia untuk bekerja sebagai TBO selama dua tahun:

*Tugas saya membuat kopi, membawa ransel untuk Batalyon 521 TNI dalam operasi mereka di hutan. Saya dijadikan sasaran penganiayaan seperti dipukul dan direndam dalam kolam air setiap malam.*<sup>178</sup>

164. Dengan berakhirnya Operasi Seroja pada tahun 1979, setelah militer Indonesia berhasil menghancurkan semua basis utama Fretilin/Falintil di pedalaman, ABRI memusatkan operasi militernya di wilayah-wilayah yang belum dikuasai. Pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Komisi dari distrik Manufahi, Viqueque, Manatuto dan Baucau, menunjukkan berlanjutnya perekrutan paksa selama periode ini.

165. Beberapa lokakarya Profil Komunitas Komisi dari distrik Viqueque melaporkan bahwa perekrutan paksa penduduk sipil menjadi TBO pada tahun 1979 terjadi setelah penangkapan besar-besaran penduduk sipil yang selama ini berada di gunung.<sup>179</sup> Komisi juga menerima sejumlah pernyataan di Viqueque dari orang-orang yang dipaksa bekerja untuk militer Indonesia dan pasukan Hansip selama periode ini.<sup>180</sup> Domingos Miguel mengatakan kepada Komisi:

*Pada tahun 1979, kami dikumpulkan di kota Ossu [Viqueque] oleh Hansip yang tidak kami kenal. Suatu hari saya dipanggil untuk ikut operasi. Selama operasi, Hansip menangkap seorang anggota Falintil, Mateus. Dia langsung dijadikan TBO dan Hansip melanjutkan perjalanan mereka ke Uatu-Carbau. Saat kami sampai di Uatu-Carbau, anggota Hansip membunuh seorang anggota Falintil yang tidak dikenal. Setelah kami kembali dari operasi, saya dipanggil Danramil. Saya dibawa ke Koramil Ossu dan ditahan di sana satu hari bersama 40 korban lain.<sup>181</sup>*

166. Sebagian orang yang menyelesaikan "tugas" mereka sebagai TBO kemudian dipenjarakan. Mateus Damazo, misalnya, menceritakan kepada Komisi bahwa pada tahun 1979, setelah ABRI menangkapnya di Alas (Manufahi), dia dipaksa membawa makanan dan amunisi serta memasak untuk pasukan dalam serangkaian operasi. Setelah menyelesaikan operasi-operasi ini dia tidak dibebaskan, tetapi justru ditahan selama setahun di Penjara Betano (Same, Manufahi).<sup>182</sup> João Baptista S. Martins, yang berusia 11 tahun ketika dipaksa menjadi TBO pada bulan Oktober 1979, melarikan diri setelah anggota ABRI memberi tahu bahwa ia akan dibawa ke Indonesia setelah ia menyelesaikan tugasnya sebagai TBO.<sup>183</sup>

167. Penduduk sipil terutama sangat rawan terhadap penganiayaan fisik dalam konteks permusuhan yang terus berlanjut, dan selalu dilihat dengan penuh kecurigaan oleh militer Indonesia berkaitan dengan loyalitas mereka. Komisi menerima laporan tentang penduduk sipil yang menyerahkan diri kepada ABRI disiksa sebelum dipaksa menjadi TBO.<sup>184</sup> Komisi juga menerima sejumlah pernyataan tentang penduduk yang disiksa setelah menjadi TBO, karena dicurigai tetap berhubungan dengan Fretilin/Falintil. António de Jesus mengatakan kepada Komisi tentang kakaknya yang hilang, seorang TBO muda pada tahun 1982 yang dicurigai militer Indonesia berhubungan dengan Falintil:

*Pada tahun 1982, Batalyon 320 merekrut Domingos de Jesus menjadi TBO. Dia bersama pasukan pergi ke Lospalos, di desa Soru. Dia kemudian dicurigai [oleh militer], jadi mereka membawa dia kembali menumpang pesawat helikopter militer Indonesia langsung ke Paitamor, Set, mereka langsung menginterogasi dan menyiksa dia agar mengaku tentang hubungannya dengan Falintil atau Fretilin. Setelah mendengar pernyataannya, [mereka] menyimpulkan bahwa dia seorang klandestin, dan cukup berbahaya. Jadi diadibawa ke lokasi di Iliomar bernama Hama-Um untuk dibunuh. Kami masih belum menemukan mayatnya sampai sekarang.<sup>185</sup>*

168. Pada akhir Operasi Seroja sudah merupakan praktek umum bagi tentara ABRI/TNI untuk mendapatkan bantuan penduduk sipil untuk tugas rumah tangga seperti memasak dan kebutuhan pribadi lain. Para TBO biasanya tinggal bersama anggota ABRI/TNI di kamp atau barak, dan kadang menyertai anggota ABRI/TNI dalam operasi lapangan. Hidup mereka sarat dengan berbagai penganiayaan. Komisi diberi tahu tentang lemahnya posisi perempuan dalam situasi demikian:

*Pada tahun 1980 saya direkrut menjadi TBO. Selama dua bulan, saya melihat saudara perempuan saya sendiri, CM, diperkosa dan dijadikan budak seksual oleh anggota ABRI. Saat pasukan bergerak dari Fahinehan, Ermelinda akhirnya dilepas. Tetapi saya dibawa mereka ke Same, Kablaki, Ainaro, Mamlau, Ermera dan Dili. Selama menjadi TBO, saat kami beroperasi di hutan, saya punya kesempatan untuk membantu seorang anggota Falintil dengan memberi makan. Linus, teman saya dari Aileu, memberi tahu TNI Yonif 643 tentang hal ini. Jadi saya ditendang dengan sepatu tentara dan mereka mengancam akan menembak saya. Mereka kemudian menambah beban yang harus saya bawa ke Ermera, Railako dan Dili.<sup>186</sup>*

169. Meski beberapa orang bergabung sebagai TBO karena hal ini menjamin adanya bantuan sosio-ekonomi, kebanyakan tidak punya pilihan dan dipaksa terlibat. Beberapa orang setuju menjadi TBO karena takut,<sup>187</sup> yang lain karena tertangkap,<sup>188</sup> dan beberapa lainnya karena ABRI mengancam akan melukai keluarga mereka kalau mereka tidak mau.<sup>189</sup>

*TBO dalam Operasi Kikis, 1981*

170. Di paruh kedua tahun 1981 militer Indonesia melancarkan operasi besar-besaran menyusur seluruh wilayah untuk mengikis pejuang Resistensi yang masih tersisa. Operasi Kikis memobilisasi banyak penduduk sipil dan memaksa mereka terlibat dalam operasi ini (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik). Pasukan teritorial ABRI/TNI dan pejabat sipil dari kampung, desa dan distrik ditugaskan untuk merekrut penduduk sipil laki-laki berusia antara 12 sampai 35 tahun. Pada kenyataannya, ABRI/TNI juga merekrut penduduk yang lebih muda dan lebih tua serta melanggar kebijakan yang berlaku, bahkan mereka juga merekrut perempuan.<sup>190</sup> Menurut beberapa Laporan Profil Komunitas Komisi, laki-laki yang dipaksa ikut dalam operasi termasuk di antaranya pegawai negeri sipil, guru, pelajar, perawat, pedagang, petani dan pengangguran. Perekrutan ini mengakibatkan penutupan sementara sekolah-sekolah, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat selama masa operasi.<sup>191</sup>

171. Jumlah penduduk sipil yang direkrut paksa untuk Operasi Kikis masih diperdebatkan. Menurut sebuah dokumen militer Indonesia yang diterbitkan tahun 1982, Operasi Kikis melibatkan 60.000 penduduk sipil, termasuk anggota struktur pertahanan sipil yang dibina ABRI seperti Wanra (Perlawanan Rakyat) dan Ratih (Rakyat Terlatih).<sup>192</sup> Menurut penulis, Ken Conboy operasi ini melibatkan 33.000 penduduk sipil, yang bergerak dari dua arah dengan 12 Batalyon ABRI di belakang mereka: Pantai Laga dan Dili, bergerak menuju lokasi pembunuhan dekat Aitana (Manatuto).<sup>193</sup> Sumber militer Indonesia lainnya menyatakan bahwa lebih banyak penduduk sipil yang dilibatkan, dan mengakui bahwa delapan batalyon disertai oleh 120.000 anggota milisi terlatih bergerak dari timur ke barat, ditambah dengan tujuh batalyon yang disertai oleh 25.000 milisi terlatih yang bergerak dari barat ke timur.<sup>194</sup>

172. Komisi menerima pernyataan dari 80 orang di tujuh distrik mengenai perekrutan penduduk sipil sebagai TBO selama Operasi Kikis. Selain itu, rincian mengenai perekrutan juga terdapat dalam sejumlah lokakarya Profil Komunitas Komisi dari beberapa bagian wilayah ini. Penduduk desa Lelalai (Quelicalai, Baucau), misalnya, menjelaskan bahwa pada tahun 1981 pejabat pemerintah distrik Baucau mengeluarkan instruksi yang memerintahkan semua laki-laki yang mampu secara fisik untuk ambil bagian dalam Operasi Kikis selama 3 bulan.<sup>195</sup> Laporan-laporan serupa juga diterima dari penduduk desa Muapitine (Lospalos, Lautém),<sup>196</sup> dan dari Rasa (Lospalos, Lautem), dimana ratusan orang direkrut sebagai TBO selama periode ini. Masyarakat di Rasa mengatakan kepada Komisi bahwa perekrutan ini termasuk tiga orang remaja yang meninggal dalam operasi ini.<sup>197</sup>

173. Jalan paksa selama operasi sangat berat, dan banyak penduduk sipil yang dipaksa ikut operasi oleh militer Indonesia meninggal karena alasan-alasan yang tidak jelas. Francisco António Menezes mengatakan kepada Komisi tentang kematian kakak laki-lakinya:

*Pada tanggal 20 Agustus 1981 Vicente sakit malaria dan dia ingin mencari obat di kota Baguia. Ketika tiba di sana, banyak pasukan TNI dari Batalyon 521 dengan anggota Hansip. Kemudian seorang anggota TNI, L21 dan Hansip dan anggotanya menangkap Vincente Mariano Pinto, dan penduduk sipil lainnya serta anak-anak muda. TNI Batalyon 521 menyuruh anak-anak muda menjadi TBO, membawa ransel dan senjata ke hutan... Pada tanggal 12 Oktober 1981 saya dengar dari seorang anggota Batalyon 521, L21, bahwa Vincente dan teman lain meninggal di Watu-Lari (Viqueque). L21 menyuruh saya mengunjungi kuburan Vincente di Teulale. Sampai sekarang, saya masih tidak tahu apa penyebab kematian Vincente dan dimana dia dikubur.<sup>198</sup>*

174. Pada tahun 1982, TBO pada dasarnya sudah tidak lagi terlibat dalam operasi-operasi militer, tetapi disekap sebagai tahanan dan pembantu pribadi di barak ABRI/TNI. Mereka yang dicurigai mempunyai hubungan dengan Fretilin/Falintil tetap menjadi sasaran utama.<sup>199</sup> Mulai sekitar waktu itu perekrutan paksa tidak terlalu serampangan dan mereka yang diinginkan para anggota ABRI untuk 'direkrut' sebagai TBO diharuskan menghubungi dan mengatur hal ini dengan Babinsa setempat.<sup>200</sup>

#### **Dipaksa mencari keluarga di hutan**

175. Komisi menerima 38 pernyataan berkaitan dengan penduduk sipil yang menyerah yang dipaksa militer Indonesia untuk kembali ke hutan untuk mencari anggota keluarga yang lain. Orlando da Silva dari Rotuto (Same, Manufahi) menceritakan kepada Komisi:

*Pada awal tahun 1976, ABRI Batalyon 509 menangkap Aniceto Mendes dan saya saat kami mencari makan. Mereka membawa kami ke Rotuto dan menginterogasi kami sambil menodongkan senjata, tentang keluarga kami yang masih di hutan. Setelah ditahan satu hari, kami diberi ransum beras dan garam dan dipaksa mencari keluarga kami di hutan [dan menyuruh mereka] untuk menyerah. Kami tidak bisa menemukan keluarga kami. Yonif 509 juga memaksa Rosalina, Angelina, Hermenegilda dan Filomeno pergi mencari keluarga mereka yang masih di hutan, tetapi mereka juga tidak berhasil, jadi Yonif 509 menahan Rosalina dan Hermenegilda di pos Yonif 509.<sup>201</sup>*

176. Sebagian besar kasus ini terjadi selama masa Operasi Seroja sampai tahun 1979.

177. Penduduk sipil yang dipaksa kembali ke hutan untuk mencari keluarga mereka tidak diberi senjata. Sebagian akhirnya kembali bersama keluarga mereka. Alfredo da Silva Carvalho, menceritakan kepada Komisi bahwa setelah menyerahkan diri kepada militer Indonesia pada tanggal 29 November 1978, saudara laki-lakinya, João do Rosario de Fatima dan tiga temannya dipaksa kembali ke hutan keesokan harinya untuk mencari anggota keluarga mereka. Mereka berhasil dan kemudian kembali ke Dili dengan anggota keluarga mereka.<sup>202</sup>

178. Penduduk desa Waetami (Quelicai, Baucau) menceritakan kepada Komisi bahwa sekitar 1.000 orang dari desanya menyerah kepada militer Indonesia pada bulan Juni 1979, setelah Marinir menguasai daerah itu. Penduduk laki-laki diperintahkan kembali ke hutan untuk menangkap gerilyawan Falintil, tetapi tidak berhasil dan kembali ke Quelicai dengan tangan hampa.<sup>203</sup> Kisah serupa juga dilaporkan di daerah-daerah lainnya.<sup>204</sup>

179. Mantan anggota Falintil yang tertangkap juga dipaksa kembali ke hutan dan mencari anggota Falintil lainnya setelah diinterogasi dan disiksa. Mateus da Costa menceritakan kepada Komisi:

*Pada tahun 1979, saya dipercaya menjadi komandan Fretilin. Tetapi pasukan TNI dari Batalyon 700 menangkap saya di Betun Oan-Alas, [Manufahi] dan membawa saya ke Fatuberliu. Teman saya, Mateus Torrejão, dan saya disuruh TNI pergi ke hutan dan mencari saudara kami yang masih di sana. Kami pergi dan mencari tetapi tidak berhasil. Dalam perjalanan pulang, kami bertemu satu kompi pasukan Linud 100 dan kami dibawa ke Dili dengan berjalan kaki.<sup>205</sup>*

180. Césario de Jesus mengatakan kepada Komisi bahwa tentara Indonesia memaksa dia dan teman-temannya untuk kembali ke hutan dan mencari anggota keluarga mereka atau anggota Fretilin/Falintil pada bulan Maret 1979. Dia mengatakan bahwa militer Indonesia membawa tahanan Falintil dengan pesawat, dan tidak pernah terlihat lagi.<sup>206</sup>

181. Tidak semua penduduk sipil yang dipaksa mencari keluarga mereka atau Falintil di hutan kembali dengan selamat. Magdalena Pereira dari Letefoho (Ermera) berusia 14 tahun pada tahun 1977, ketika dia dan neneknya Laubrani ditangkap ABRI dan dibawa ke Koramil Letefoho. Setelah diinterogasi, mereka dipaksa mencari keluarga mereka di hutan. Magdalena tidak melanjutkan perjalanan di luar Lauana, tetapi Laubrani dipaksa tentara ABRI dan Hansip melanjutkan dan ketika dia mulai berjalan dia ditembak di punggung dan langsung meninggal.<sup>207</sup> Dalam beberapa kasus, mereka yang dikirim ke hutan tidak pernah kembali.<sup>208</sup>

182. Selama awal dekade 1980-an, militer Indonesia tetap memaksa penduduk sipil mencari anggota keluarganya yang masih belum menyerah.<sup>209</sup> Tentara ABRI/TNI juga memukul dan menyiksa penduduk sipil yang tidak berhasil menemukan anggota keluarga atau Falintil di hutan. Arlindo Fernandes Xavier mengatakan kepada Komisi:

*Pada tahun 1983, TNI Batalyon 623 datang dan memanggil Adolfo Fernandes Xavier dan memaksa dia pergi ke hutan mencari anggota Falintil, Manuel dos Santos. Karena dia tidak bisa menemukannya, mereka memukul Adolfo dengan senjata sampai dia babak belur. Adolfo kemudian ditahan satu hari satu malam di Pos [Batalyon] 623 Lautém. Anibal Fernandes Xavier dan Etelvina Fernandes Xavier juga ditangkap dan dibawa ke Kodim Lospalos oleh anggota Kodim Lospalos. Mereka diinterogasi, disetrum, ditendang dan dipukul dengan gagang senapan sampai mereka babak belur. Korban kemudian dimasukkan ke sel selama satu bulan. Setelah itu, korban Etelvina disuruh pulang, Tetapi Anibal dibawa pergi oleh pelaku dan masih hilang sampai sekarang.<sup>210</sup>*

183. Pada tahun 1983, Perundingan gencatan senjata diadakan antara Falintil dan ABRI. Ketika itu juga terjadi sejumlah pembelotan oleh anggota pasukan binaan ABRI/TNI seperti Hansip di distrik Lautém, Viqueque dan Ainaro. Di Lautém, setelah menerima perintah dari

Xanana Gusmão untuk membawa senjata ke hutan, sejumlah anggota Hansip dan Ratih merampas senjata dari polisi dan Koramil dan melarikan diri ke hutan. Sebagai tanggapannya, pasukan keamanan memerintahkan perempuan yang suaminya lari ke hutan untuk mencari suami mereka di hutan. Militer Indonesia bereaksi dengan cara yang sama setelah Falintil membakar rumah penduduk di desa Mehara (Tutuala, Lautém), dan lagi tahun 1987 di Poros/Herana di desa Mehara, dimana ABRI memaksa para perempuan untuk mencari suami mereka yang masih di hutan dengan kawalan Hansip.<sup>211</sup>

184. Di Kraras (Viqueque, Viqueque), setelah *levantamento* (pemberontakan) pada tanggal 9 Agustus 1983, penduduk sipil diserang dan dibunuh oleh militer Indonesia dalam serangkaian pembantaian, sebagai balasan terhadap pembunuhan tentara Indonesia oleh dan dengan pembelotan anggota Hansip dan Ratih ke Falintil (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa). Pada awal 1984, sejumlah penduduk sipil dan anggota Ratih masih berada di hutan. Penduduk mengatakan kepada Komisi bahwa pada awal tahun 1984 anggota pasukan khusus, Kopassus menculik 13 orang dari Kraras dan membawa mereka ke hutan dan memaksa mereka mencari penduduk lainnya dan anggota Falintil. Dari 13 penduduk Kraras yang dipaksa melakukan hal ini, hanya enam yang kembali, sementara tujuh lainnya masih hilang.<sup>212</sup>

#### *Pasukan Tombak*

185. Pada dekade 1980-an suatu bentuk lain perekrutan paksa penduduk sipil ke dalam operasi militer Indonesia adalah Pasukan Tombak. Nama ini diambil dari satu-satunya senjata yang boleh mereka bawa, yang membatasi kapasitas militer mereka dalam kaitannya dengan komandan militer Indonesia.

186. Tidak banyak yang diketahui tentang awal mula dan perkembangan pasukan ini, walaupun data yang ada menunjukkan bahwa Pasukan Tombak hanya dibentuk di distrik-distrik yang dianggap rawan terhadap serangan Falintil/Fretilin setelah Operasi Kikis tahun 1981. Setelah perundingan gencatan senjata gagal dengan pemberontakan di Viqueque pada tahun 1983, dan kembalinya penduduk sipil yang selama itu ditahan di Ataúro sejak tahun 1980 karena dicurigai mempunyai hubungan dengan Fretilin/Falintil, kecurigaan Indonesia atas dukungan klandestin terhadap Resistensi tinggi. Indonesia membentuk Pasukan Tombak untuk mengawasi kegiatan penduduk sipil. Penduduk sipil direkrut secara paksa menjadi anggota Pasukan Tombak di sejumlah tempat di wilayah ini, tetapi mereka direkrut di daerah-daerah dimana Fretilin/Falintil masih aktif.<sup>213</sup> Perekrutan terus berlanjut sampai pertengahan dekade 1980-an, sering terpusat di komunitas-komunitas dimana penduduk laki-lakinya telah lari ke gunung-gunung setelah pemberontakan tahun 1982 dan 1983.<sup>214</sup>

187. Komisi menerima pernyataan dari 19 penduduk sipil yang dipaksa ikut Pasukan Tombak. Mereka kebanyakan dari distrik Lautém dan Viqueque yang menceritakan tentang perekrutan paksa ke dalam pasukan ini antara tahun 1982 dan 1987.

188. Penduduk sipil yang direkrut ke dalam Pasukan Tombak seringkali adalah anggota Falintil yang telah menyerah, meski melibatkan juga penduduk sipil yang anggota keluarganya masih berada di hutan. Sejumlah pernyataan menunjukkan bahwa proses perekrutan dilakukan setelah penangkapan, penahanan dan penyiksaan penduduk sipil dan orang lainnya yang ditangkap di wilayah yang dikuasai Fretilin/Falintil.<sup>215</sup>

189. Dengan latar belakang perekrutan seperti ini, tidak mengherankan bila ABRI terus menyimpan kecurigaan terhadap penduduk sipil tertentu yang direkrut ke dalam Pasukan

---

<sup>211</sup> *Levantamento Armado* (Pemberontakan Bersenjata) di Ponta Leste terjadi pada tanggal 9 Agustus 1983, dipimpin oleh *Iiurai* Miguel dos Santos, dikenal sebagai Cuba Levantamento. Pemberontakan ini melibatkan anggota Hansip dan pemuda klandestin yang disebut Lorico Paicau. Pemberontakan terjadi atas perintah Komandan Falintil, Xanana Gusmão. [Profil Komunitas CAVR, Desa Mehara, Sub-distrik Tutuala, Distrik Lautém 27 November 2002].

Tombak. Komisi menerima sejumlah pernyataan dari para mantan anggota Pasukan Tombak yang ditahan dan disiksa karena gagal menjalankan tugas mereka atau karena dicurigai memberi informasi atau bekerja sama dengan pasukan Falintil/Fretilin. Paulino Freitas mengatakan kepada Komisi:

*Pada bulan September 1983, saya dan anak muda yang kuat direkrut sebagai Pasukan Tombak. Saya kenal beberapa orang; Ernesto, Afonso, Brandão, Faikaik dan Joaquim Kainoko. Kami direkrut oleh L23, Babinsa di desa Uma Oan Kraik, dan oleh L24 dan L25, Komandan Babinsa. Setelah direkrut kami dilatih di Audian Matan, kota Viqueque. Mereka juga menyuruh kami jaga malam...Suatu hari Adelino dan saya sedang tugas jaga malam ketika L23 dan L27 memukul kami dengan gagang senjata dan menendang kami, menuduh kami mempunyai rencana dengan Fretilin untuk menyerang pos yang kami jaga.<sup>216</sup>*

190. Setelah pemberontakan Kraras pada tahun 1983 banyak orang lari ke hutan karena takut pembalasan dari militer Indonesia terhadap penduduk sipil. Militer Indonesia melancarkan operasi untuk memaksa mereka pulang ke desa mereka. Dalam operasi tersebut, serangkaian pembantaian penduduk sipil oleh militer Indonesia berlangsung (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa). Sebagian dari penduduk sipil yang kembali dipaksa bergabung dengan Pasukan Tombak sebagai penjaga untuk militer Indonesia.<sup>217</sup>

191. Mereka yang direkrut ke dalam Pasukan Tombak juga beresiko dibunuh oleh Falintil ketika mereka dikirim ke hutan untuk mencari pasukan Fretilin/Falintil yang menganggap mereka sebagai kaki tangan ABRI/TNI.<sup>218</sup> Jacinta Hornay mengatakan kepada Komisi tentang Pasukan Tombak yang ditempatkan di garis depan dengan Falintil dan akibatnya mereka terbunuh:

*Pada bulan Mei 1984, Jacinto Pinto dan Tomás Ramos ditangkap oleh dua anggota TNI, dan dibawa ke Koramil Luro. Keduanya dicurigai mempunyai hubungan dengan [seorang anggota] Falintil bernama Mateus Morreira. Di Koramil, kedua korban dimasukkan ke sel selama tiga bulan.*

*Setelah tiga bulan mereka dibebaskan tetapi masih diwajibkan lapor setiap hari ke Koramil. Pada tanggal 8 Agustus 1984, atas perintah Koramil Luro, kedua korban dan 24 penduduk sipil lainnya dari Luro pergi sebagai Pasukan Tombak ke hutan mencari Falintil bernama Mateus Morreira. Di hutan, Jacinto dibunuh Falintil di Lakira[Lospalos]. Mayatnya ditemukan oleh pasukan Koramil dan dikubur pada tanggal 5 September 1984 di Luro.<sup>219</sup>*

192. Pasukan Tombak juga digunakan ABRI/TNI untuk melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil yang dicurigai berhubungan dengan Fretilin/Falintil.<sup>220</sup>

#### *Jaga Malam dan Patroli Paksa*

193. Militer Indonesia juga memaksa penduduk sipil untuk bertugas jaga malam dan patroli di masyarakat sepanjang periode pendudukan. Komisi menerima 74 pernyataan yang secara khusus menceritakan pengalaman-pengalaman ini. Khususnya di masyarakat pedesaan

dimana militer Indonesia khawatir akan serangan Falintil, penduduk sipil yang bertugas jaga malam dan patroli pada dasarnya dijadikan perisai untuk melindungi anggota pasukan bersenjata Indonesia.

194. Seperti dalam kasus-kasus perekrutan paksa lainnya, sering kali orang-orang yang baru menyerah atau ditangkap oleh pasukan Indonesia, dipaksa menjalankan tugas ini. Dalam sejumlah kasus, penduduk sipil disiksa sebelum diwajibkan oleh militer untuk melakukan jaga malam.<sup>221</sup> Jaga malam dan patroli paksa terutama sering terjadi di komunitas yang baru saja dikuasai oleh militer Indonesia, saat ABRI/TNI masih belum yakin dengan kekuasaannya. Tingkat kepercayaan antara ABRI/TNI dan struktur keamanan binaan mereka beragam. Namun demikian dari pernyataan yang diterima tampaknya seperti dengan pengerahan penduduk sipil lainnya untuk peran militer, militer Indonesia tetap curiga akan kelanjutan hubungan mereka dengan Falintil. Dalam beberapa kasus, warga desa yang diberi tugas patroli kemudian diasingkan bersama keluarga mereka ke pulau Atauro.<sup>222</sup>

195. Profil Komunitas Komisi menunjukkan bahwa di dalam komunitas yang sudah menyerahkan diri atau tertangkap oleh militer Indonesia, perempuan sering dipaksa melakukan jaga malam sementara penduduk laki-laki dipaksa menjadi TBO atau mencari Fretilin/Falintil dan penduduk sipil lainnya di hutan. Komisi diberi tahu tentang penyiksaan para perempuan yang menolak berpartisipasi dalam tugas jaga malam.<sup>223</sup> Ernesto Soares mengatakan kepada Komisi tentang pemaksaan dengan kekerasan terhadap penduduk sipil:

*Pada tahun 1977, pasukan Batalyon 711 membangun pos di desa Leodato (hatulia, Ermera). Setelah dibangun, Yonif 711 memaksa saya dan teman-teman menjaga pos pada malam hari. Kalau kami menolak untuk datang, kami dipukuli dan dimasukkan ke rawa-rawa.<sup>224</sup>*

196. Tidak jarang penduduk sipil yang dipaksa melakukan jaga malam mengalami kekerasan jika ABRI atau Hansip yang mengawasi mereka merasa bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Bernardo Savio menjelaskan kepada Komisi bahwa dia dipaksa melakukan tugas jaga malam, dan bila ia dipergoki tertidur selama bertugas, ia akan dipukuli dan disiksa.<sup>225</sup> Orang lain memberi gambaran tentang perlakuan yang sama kepada Komisi.<sup>226</sup> Daniel Suban dari Caraubalu (Viqueque, Viqueque) menceritakan kepada Komisi tentang bapaknya, Rubigari, yang dipaksa melakukan jaga malam:

*Pada tanggal 14 Juli 1980, Rubigari, Rai Olo, Rubi Gamu dan Loi Gamu dipaksa TNI menjaga pos pada malam hari. Ayah saya, Rubigari, jatuh tertidur saat giliran dia berjaga. Dia tertangkap basah oleh 3 anggota TNI Batalyon 202 dan dimarahi, ditendang, dipukul dengan senjata sampai tulang rusuknya patah dan langsung meninggal.<sup>227</sup>*

197. Kekerasan oleh anggota ABRI dan Hansip bersifat sewenang-wenang dan dapat terjadi kapan saja, meski tanpa ada provokasi apapun. Alfredo da Costa Freitas, misalnya, menggambarkan sebuah kejadian kepada Komisi dimana anggota Hansip memukuli dia dan tiga orang temannya tanpa alasan apapun saat mereka melakukan tugas jaga malam. Mereka kemudian dilempar ke sungai, pos jaga mereka dibakar dan mereka disuruh untuk membangun kembali pos jaga tersebut keesokan harinya.<sup>228</sup>

198. Analisa laporan lokakarya Profil Komunitas Komisi menunjukkan bahwa militer Indonesia juga memaksa penduduk sipil untuk ikut ambil bagian dalam berbagai kegiatan lainnya pada malam hari, seperti datang ke pesta dansa dan patroli keamanan jika terdapat banyak aktifitas Fretilin/Falintil di daerah tersebut. Kehadiran orang Timor-Leste di kegiatan-kegiatan tersebut tampaknya ditujukan untuk mengurangi resiko serangan Falintil, jadi penduduk sipil pada dasarnya dipakai sebagai tameng hidup. Penduduk sipil sering dipaksa menyiapkan makanan

bagi tentara.<sup>229</sup> Praktek semacam ini sering terjadi di kamp-kamp pemukiman yang dikuasai militer Indonesia pada akhir dekade 1970-an dan awal dekade 1980-an.<sup>230</sup>

199. Penduduk sipil yang dipaksa melakukan jaga malam juga beresiko ditembak atau dibunuh oleh Falintil atau anggota ABRI itu sendiri. Komisi menerima sejumlah pernyataan yang memaparkan insiden dimana Falintil atau ABRI membunuh penduduk sipil tidak bersenjata yang tengah bertugas jaga malam.<sup>231</sup>

200. Selama Operasi Kikis pada tahun 1981, dengan banyaknya penduduk sipil laki-laki sehat yang dipaksa ikut serta dalam operasi tersebut, di beberapa daerah perempuan dipaksa melakukan tugas jaga malam.<sup>232</sup> Penduduk desa Bibileo (Viqueque, Viqueque) mengatakan kepada Komisi bahwa selama periode ini, ABRI memaksa laki-laki dan perempuan tua membangun pos jaga di sekitar desa, dan perempuan dipaksa bertugas jaga malam.<sup>233</sup>

201. Selama dekade 1990-an, terdapat lebih sedikit laporan tentang penduduk sipil yang direkrut paksa untuk tugas jaga malam. Walaupun hal ini mencerminkan pergeseran situasi konflik dan prioritas keamanan dan strategi militer Indonesia, praktek-praktek ini tetap dilakukan di beberapa daerah tertentu. Beberapa laporan yang diterima Komisi untuk periode ini menunjukkan bahwa penduduk sipil yang dipaksa melakukan tugas jaga malam pada umumnya adalah mereka yang ditangkap karena kegiatan-kegiatan klandestin. Beberapa orang ini juga disiksa oleh anggota militer Indonesia atau kelompok paramiliter binaan mereka. Serangan oleh Falintil selama dekade 1990-an juga menimbulkan korban dari kalangan penduduk sipil yang bertugas jaga malam. Mateus Soares mengatakan kepada Komisi tentang sebuah serangan Falintil terhadap pos di Carlilo, desa Aiteas (Manatuto, Manatuto):

*Pada tanggal 23 Maret 1990, José Soares Laka, Domingos Ramos, Sebastião Ximenes, António Coli, Domingos Larak, Hermenegildo Soares, Mateus Go'ó, dan ayah saya, António Celo Soares dan saya sedang jaga malam di pos kamling [keamanan lingkungan].*

*Sekitar jam 9 malam Fretilin menyerang pos. António Celo Soares langsung terbunuh dalam serangan tersebut, sedang Mateus Go'ó, José Soares Laka dan Domingos Larak terluka akibat penembakan membabi buta dari Falintil.<sup>234</sup>*

202. Seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka yang dicurigai terlibat dalam kegiatan klandestin yang mendukung pasukan Falintil sering disiksa dan kemudian disuruh melakukan jaga malam dan tugas lainnya.<sup>235</sup> Penduduk sipil yang tidak mematuhi perintah untuk tugas jaga malam sering disiksa oleh militer Indonesia.<sup>236</sup>

203. Praktek ini dihidupkan kembali dalam skala besar sepanjang tahun 1999, ketika TNI dan milisi memaksa penduduk sipil untuk melakukan tugas jaga malam selain 'tugas-tugas' lainnya menjelang Konsultasi Rakyat pada akhir bulan Agustus.<sup>237</sup> Dalam audiensi Rekonsiliasi Komunitas di desa-desa di seluruh negeri, Komisi mendengar kesaksian dari mantan anggota milisi tentang kegiatan mereka. Perekrutan sering dipaksa, dengan ancaman kekerasan atau penghancuran harta benda oleh militer Indonesia. Pemerintah setempat sering dipakai oleh militer dalam proses perekrutan, karena sebagian besar masyarakat diwajibkan menyediakan anggotanya untuk kelompok milisi. Anggota papan bawah kelompok milisi, sering adalah mereka yang dipaksa bergabung, sering diwajibkan melakukan kegiatan seperti jaga malam dan patroli, dan menjaga pos jaga, dan posisi mereka berada di bawah militer Indonesia seperti dalam periode konflik sebelumnya (lihat Bagian 9: Rekonsiliasi Komunitas).

#### 7.5.4 Pelanggaran Hukum Perang oleh Fretilin/Falintil

204. Komisi menerima sejumlah laporan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil berkaitan dengan pelanggaran Hukum Perang. Pelanggaran terhadap penduduk sipil dalam konteks ini, bagaimanapun juga, hanya merupakan bagian kecil jika dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh ABRI/TNI. Bukti yang ada menunjukkan bahwa pelanggaran oleh Fretilin/Falintil tidak bersifat sistematis atau luas. Namun demikian, pasukan Fretilin/Falintil menyerang dan membunuh penduduk sipil, membakar rumah-rumah mereka, dan melakukan pelanggaran-pelanggaran berat lainnya terhadap penduduk sipil.

205. Komisi tidak menemukan bukti penggunaan senjata yang tidak pandang bulu atau yang tidak proporsional selama operasi militer Fretilin/Falintil, atau perekrutan penduduk sipil dalam skala besar oleh Fretilin/Falintil untuk mendukung dan melengkapi operasi militernya. Walau demikian, jelas bahwa upaya Fretilin/Falintil untuk menegakkan ideologi politik dan kebijakan-kebijakan Fretilin/Falintil antara tahun 1976-1978 mengakibatkan banyak penderitaan dan kematian penduduk sipil yang mereka larang untuk menyerahkan diri kepada militer Indonesia dan yang menjadi sasaran penyerangan ABRI. Fretilin/Falintil juga melakukan pelanggaran hukum perang dalam kaitannya dengan perlakuan tahanan dan pembunuhan penduduk sipil.

206. Ketika militer Indonesia melakukan invasi ke Dili pada tanggal 7 Desember 1975, Fretilin mundur ke selatan menuju bukit Aileu dimana Fretilin mempertahankan markasnya. Pemimpin Fretilin memutuskan untuk membawa serta banyak tahanan UDT dan Apodeti yang ditahan di *Quartel Geral*, Taibessi dan Comarca Balide, Dili. Tahanan dipaksa membawa amunisi dan bahan-bahan keperluan untuk Fretilin yang mundur.<sup>238</sup> Pada akhir Desember 1975, anggota Fretilin melakukan serangkaian eksekusi terhadap tahanan-tahanan ini, di Aisirimou di Aileu, kemudian saat mereka mundur lebih jauh ke selatan di Maubisse (Ainaro), dan pada bulan Januari 1976 di pantai selatan Same, Manufahi (lihat Bagian 3: Sejarah konflik; Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa). Komisi mewawancarai Humberto Martins da Cruz, seorang penjaga penjara Fretilin di Aileu saat itu, yang mengatakan bahwa hampir setiap malam satu orang tahanan dipanggil untuk dibunuh. Dia juga mengatakan kepada Komisi bahwa antara 23 dan 26 eksekusi di Aisirimou ini langsung melibatkan anggota Komite Sentral Fretilin.<sup>239</sup> Dia mengatakan kepada Komisi bahwa tahanan diperintahkan untuk menggali lubang bagi korban eksekusi, dan bahwa para pemimpin Fretilin tidak melakukan upaya untuk mencegah eksekusi ini.<sup>240</sup> Pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal, Presiden dan Sekertaris Jenderal Fretilin saat ini, Francisco Guterres "Lú- Olo" dan Mari Alkatiri, menyatakan bahwa pembunuhan ini bukan kebijakan Fretilin atau dilakukan atas perintah Komite Sentral Fretilin. Mereka, bagaimanapun juga, mengakui bahwa Fretilin sebagai organisasi harus mengambil tanggung jawab kolektif atas pembunuhan ini dan meminta maaf atas nama Fretilin kepada keluarga korban.<sup>241</sup> Presiden Fretilin saat itu, Francisco Xavier do Amaral, tidak berada di Aileu pada saat pembunuhan; namun demikian, dia menjelaskan pemahamannya tentang kejadian ini kepada Komisi pada saat Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal tahun 1974-76:

*Saya bisa jelaskan demikian. Tidak ada keputusan. Kalau kita menulis sesuatu, maka kita bisa katakan bahwa ini keputusan. Kadang kita ngomong tentang kesan kita, kita bicara dengan teman. Dan ide kita ini, orang bilang – orang bilang–dianggap sebagai keputusan. Karena pikiran kita hanya pendapat kita...*

*“Kita dalam keadaan perang, dalam perang ini, kalau kita mundur, lawan mengejar kita; jika kita mundur kita membawa serta tahanan, [yaitu] lawan kita yang menjadi tahanan kita. Di saat kita belum sempat mengambil napas, lawan sudah mendekat. Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Kita harus terus berlari. Kita tidak punya banyak pilihan. Tidak ada transportasi, tidak ada makanan, terkadang tidak ada obat-obatan, tidak ada semuanya ini.”*

*Sebagian tahanan dalam keadaan sakit keras, sebagian sudah sangat lemah. Jadi kami harus memperhatikan semua ini. Apakah kami merawat mereka? Apakah kami akan meninggalkan mereka sendirian? Atau kami harus membunuh mereka sebelum kami menyingkir? Dari kedua [kemungkinan] ini, saya melihat ada bahayanya. Kalau kami meninggalkan mereka dalam keadaan hidup, mereka pasti jatuh ke tangan lawan. Jadi kalau kami meninggalkan satu tahanan, misalnya salah seorang anggota UDT atau Apodeti, ia bisa saja jatuh ke tangan musuh. Jika pasukan Indonesia masuk, dia bisa jatuh ke tangan mereka. [Pasukan] Indonesia akan menekan dia dan mereka akan menemukan kami. Mereka dapat menipu dia atau mungkin dia akan mengaku ... [Apakah kami] berada di kota atau dimana saja, dia bisa mengaku. Oleh karena itu kami sampai kepada kesimpulan bahwa, jika mereka sudah dalam lemah dan mereka tidak berjalan dengan kami, kami ingin membawa mereka tetapi kami tidak punya kekuatan, tidak ada jaminan bahwa kami bisa membawa mereka kemana kami pergi, maka pilihannya adalah apakah dia yang mati atau kami yang mati? Kadang-kadang, keputusan diambil untuk membunuh mereka supaya musuh tidak membahayakan kami. Mungkin opini ini dipegang secara umum, lebih kurang, di semua level di kalangan pemimpin.<sup>242</sup>*

207. Pada kenyataannya, meski ada bukti bahwa beberapa tahanan lemah dan sakit, atau menderita luka dari pemukulan yang kejam saat ditahan Fretilin, tetapi tidak ada bukti bahwa tahanan dieksekusi karena terlalu sulit untuk bergerak. Bukti menunjukkan bahwa mereka dieksekusi anggota Fretilin karena khawatir mereka akan bekerja sama dengan Indonesia.

208. Komisi menerima kesaksian tentang pembantaian penduduk sipil di desa Kooleu (Loré I, Lautém) pada bulan Januari 1976 (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa).<sup>243</sup>

209. Setelah eksekusi bulan Januari 1976 di Same (Manufahi), para pemimpin Fretilin memutuskan untuk menghentikan eksekusi dan mendorong tahanan yang masih hidup untuk bertempur dengan mereka melawan militer Indonesia. Taur Matan Ruak, sekarang Panglima Angkatan Bersenjata RDTL, mengingat di hadapan Komisi kata-kata pemimpin Fretilin Nicolau Lobato, dan mengulang kembali kata-kata tersebut:

*Kita percaya dengan perubahan manusia. Sejarah perjuangan di negara lain membuktikan bahwa seorang yang dianggap revolusioner sekarang bisa dianggap sebagai pengkhianat besok, dan bahwa seorang yang dianggap pengkhianat hari ini bisa dianggap revolusioner besok... akal sehat manusia bisa memperbaiki manusia. Kita harus mempercayai kemampuan orang untuk merubah diri mereka.<sup>244</sup>*

210. Selama periode setelah invasi, banyak orang meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan di hutan dan gunung. Banyak orang yang lari atas kemauan sendiri karena takut invasi dan mencari perlindungan kepada pasukan Fretilin/Falintil. Namun demikian, Komisi juga menerima banyak kesaksian tentang Fretilin yang mendorong penduduk sipil untuk meninggalkan kota dan bergabung dengan Fretilin di pedalaman, dan ideologi revolusi sosial Fretilin pada tahun-tahun awal ini berkaitan dengan perang dan pendudukan didasarkan pada pandangan tentang penduduk sipil yang hidup bersama kader politik dan militer dimana mereka bisa dididik dan kesadaran sosial baru bisa muncul. Dalam konteks ini ada banyak tekanan bagi penduduk sipil untuk melarikan diri dan tinggal bersama Fretilin di pedalaman, bahkan saat situasi menjadi sangat sulit (lihat Bab 7.3.: Pemandangan Paksa dan Kelaparan).

211. Antara tahun 1976 dan 1977, penduduk sipil mendirikan komunitas-komunitas baru di bawah bimbingan Fretilin di basis-basis di pedalaman di belakang garis pertempuran dengan militer Indonesia. Mereka menanam kebun komunal, menjalankan program pemberantasan buta huruf dan mengembangkan pelayanan kesehatan dasar. Namun demikian, ketika perang semakin memuncak pada tahun 1977, Fretilin semakin kesulitan untuk mempertahankan jumlah penduduk yang besar tersebut di pedalaman.

212. Perpecahan muncul di kalangan pimpinan Fretilin tentang strategi terbaik untuk melanjutkan perjuangan, terutama tentang persoalan apakah penduduk sipil yang jumlahnya sangat besar harus menyerah dan kembali ke desa-desa dan kota-kota. Pada tahun 1976 di Zona Timur, Fretilin/Falintil menangkap dan mengeksekusi pemimpin Falintil Aquiles Freitas dan sejumlah pendukungnya (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa).

213. Perpecahan paling dalam dan penuh kekerasan terjadi dengan ditangkap dan ditahannya Presiden Francisco Xavier do Amaral dan mereka yang dicurigai satu garis dengannya pada bulan September 1977. Dalam waktu ini Fretilin/Falintil melakukan pelanggaran terhadap banyak penduduk sipil, termasuk penahanan, penyiksaan dan eksekusi (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa; Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Perlakuan Buruk).<sup>245</sup>

214. Setelah pembersihan yang penuh kekerasan ini, kecurigaan semakin dalam di wilayah-wilayah yang dikuasai Fretilin/Falintil dan pergerakan penduduk sipil diawasi ketat. Fretilin/Falintil mewajibkan penduduk sipil untuk memiliki surat jalan (atau dikenal dengan nama *Guia de Marcha*). Mereka yang ditangkap di luar wilayah yang diperbolehkan dituduh berkhianat dan dihukum. Hukuman termasuk penahanan dengan kondisi yang sangat buruk, penyiksaan dan kadang pembunuhan. Fretilin membangun suatu sistem pusat penahanan yang dikenal dengan nama *Renal* di basis-basis di seluruh negeri. Mereka sering menahan orang di lubang di tanah sampai dua minggu, dan lebih lama di *Renal* (lihat Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Perlakuan Buruk).

215. Pemimpin Fretilin/Falintil lain yang berlawanan dengan strategi perang Fretilin untuk mempertahankan kehadiran penduduk sipil di pedalaman juga dihukum atau dibunuh.<sup>246</sup> Mereka termasuk Afonso Savio, Sekretaris Zona untuk daerah Luro (Lautém) dan José dos Santos, komandan regional, yang dipukuli, diinjak dan dibakar sampai mati.<sup>247</sup> Menurut beberapa laporan yang masuk ke Komisi, para anggota Komite Sentral Fretilin memerintahkan eksekusi kepala kampung yang dituduh menyuruh penduduk sipil untuk menyerah kepada militer Indonesia.<sup>248</sup>

Tindakan semacam ini memberi pesan jelas kepada penduduk sipil yang mempunyai keinginan untuk menyerah bahwa mereka akan dianggap sebagai pengkhianat dan akan dihukum berat.

216. Persoalan apakah penduduk sipil harus menyerah menjadi sumber perpecahan yang dalam, dengan kesejahteraan penduduk sipil yang sering dikorbankan antara cita-cita politik yang berseberangan. Lucas da Costa, kader Fretilin saat itu, mengatakan kepada Komisi:

*Kalau seorang pemimpin politik berbicara, komandan [Falintil] mematuhi. Tetapi komandan hanya melihat perang dari sudut pandang militer. Mereka bilang, "kita tidak akan bisa menang kalau kita bawa orang-orang ini dengan kita. Kalau orang terus ikut kita akan menghabiskan tenaga melindungi mereka, bukan untuk bertempur melawan musuh. Lebih baik suruh mereka pergi, kita akan tinggal di hutan." Tetapi ini tidak sesuai dengan konsep [Fretilin]. Kalau orang-orang disuruh turun [dari gunung], mereka akan mendapatkan kembali status sosial mereka dan status sosial mereka akan meningkat lagi. Ini namanya membunuh ideologi sendiri, dan revolusi akan gagal.<sup>249</sup>*

217. Banyak penduduk sipil yang pada dasarnya terperangkap di Zona Libertad atau zona bebas Fretilin, yang kemudian menjadi sasaran serangan ABRI/TNI. Dengan pembatasan pergerakan penduduk sipil menjadi lebih ketat, banyak penduduk sipil mati karena kekurangan makanan dan obat-obatan.<sup>250</sup> Setelah operasi militer besar-besaran Indonesia menghancurkan basis-basis Fretilin/Falintil pada tahun 1978, banyak penduduk sipil yang melarikan diri bersama pasukan Fretilin/Falintil ke basis Fretilin/Falintil di Gunung Matebian. Situasi di sana sedikit lebih baik, meski sangat kekurangan papan dan obat-obatan untuk orang dewasa dan anak-anak yang sakit. Dalam situasi ini ribuan orang meninggal karena kelaparan, penyakit dan pemboman dan serangan Indonesia yang tanpa henti.<sup>251</sup>

218. Pada tahun 1978, penduduk tercerai berai dan tanpa pilihan apapun, banyak penduduk sipil mulai menyerahkan diri kepada pasukan Indonesia. Pada tanggal 22 November 1978, Komite Sentral Fretilin mengeluarkan perintah, yang secara efektif mengakui realitas ini.

219. Xanana Gusmão, yang berada di Gunung Matebian ketika itu, mengatakan kepada Komisi:

*Pada tanggal 22 November 1978 kami berpisah di Matebian. Meski kami dikepung, kami tetap berhubungan dengan Komite Sentral di Wilayah Tengah. Kami mengakui, kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan mereka menyuruh penduduk sipil untuk menyerah dan mempertahankan satu pos gerilya di Wilayah Timur yang membawahi Baucau, Viqueque dan Lospalos...*

*Kemudian mereka menunjuk saya sebagai komandan Wilayah Timur, dan pada tanggal 22 November kami memobilisasi kekuatan kami, menyelamatkan diri dari Matebian, dan menyuruh penduduk sipil untuk menyerah di kota-kota terdekat sementara Falintil bergerak menuju Wilayah Tengah untuk melanjutkan perjuangan.<sup>252</sup>*

220. Dengan berakhirnya Operasi Seroja dan kehancuran basis-basis Fretilin, Resistensi bersenjata hampir dipatahkan. Strategi Resistensi dirubah total dalam sebuah konferensi

reorganisasi nasional pada tahun 1981 (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik). Ini bermaksud bahwa banyak penduduk sipil tidak lagi tinggal bersama pejuang resistensi bersenjata di gunung. Penduduk kembali ke desa-desa dan kota-kota, meski setelah tinggal lama di kamp-kamp sementara, pusat penahanan dan desa-desa pemukiman yang diawasi ABRI/TNI (lihat Bab 7.3: Pemandangan Paksa dan Kelaparan). Hubungan Fretilin/Falintil dengan penduduk sipil berubah total, karena mereka berupaya mendorong berkembangnya jaringan klandestin penduduk sipil untuk mendukung Resistensi. Pemimpin baru Resistensi, Xanana Gusmão, secara bertahap menuntun Resistensi menjauhi posisi ideologi yang kaku yang telah mendorong berkembangnya kekerasan “ideologis” atau “revolusioner” terhadap anggota Resistensi mereka sendiri (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik). Dalam otobiografinya, Xanana Gusmão mengenang kekerasan yang dia saksikan atau dengar tentang periode awal tersebut, dan gagasannya untuk menjauhkan Resistensi dari pendekatan tersebut.<sup>253</sup>

Tidak! Meskipun saya anggota Komite Sentral, saya masih tidak bisa memahami kekerasan revolusioner. Saya tidak suka konsepnya dan saya tidak menjalankannya. Persuasi dan kompensasi mulai menjadi prinsip politik alternatif, yang sangat penting bagi saya.<sup>254</sup>

221. Masa-masa setelah reorganisasi Resistensi setelah kehancuran basis-basis yang menampung banyak penduduk sipil, pelanggaran hukum perang Fretilin/Falintil, terutama terhadap penduduk sipil, turun drastis. Meskipun demikian, Komisi menerima laporan tentang kekerasan dan intimidasi Falintil terhadap mereka yang dianggap bekerja sama dengan militer Indonesia atau yang melawan Resistensi. Hal ini termasuk pelanggaran yang paling berat, seperti eksekusi penduduk sipil.<sup>255</sup> Marta Ximenes memberi kesaksian bahwa pada tanggal 17 Agustus 1979, tiga tentara Falintil menembak mati suaminya Luis Lopes di kebun mereka di Paitaal-Bauro (Lospalos, Lautém) dan mencuri tanaman jagung dan ketela mereka.<sup>256</sup>

222. Dalam kasus dimana penduduk sipil Timor-Leste dipaksa militer Indonesia untuk melakukan tugas seperti jaga malam dan patroli, seperti dibahas di atas, mereka kadang menjadi korban aksi bersenjata Falintil. Status orang-orang semacam ini mungkin tidak jelas, dan mungkin tergantung pada peran yang terpaksa mereka jalankan dari militer Indonesia. Seorang anggota Pasukan Tombak yang berpatroli di hutan bisa menjadi ancaman militer bagi anggota Falintil. Namun, situasi orang yang dipaksa melakukan jaga malam dan patroli di desanya akan sangat berbeda. Apakah mereka dijadikan sasaran atau apakah korban semacam itu dibunuh karena pemakaian tingkat kekerasan yang berlebihan yang tidak sebanding dengan tujuan militer tidak selalu jelas.<sup>†</sup> Komisi tidak menerima bukti apapun yang menunjukkan bahwa Falintil secara umum menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran, dan juga tidak ada bukti bahwa Falintil melancarkan operasi militer dengan cara yang secara langsung menimbulkan korban sipil. Tetapi kekerasan semacam ini oleh pasukan Falintil, sepanjang dekade 1980-an dan lebih jarang pada dekade 1990-an menimbulkan penderitaan yang hebat dalam masyarakat.

### **Serangan terhadap Obyek-obyek Sipil**

223. Pernyataan yang diterima Komisi merinci 80 kasus pembakaran rumah, perusakan bangunan dan harta benda, serta penjarahan oleh Fretilin/Falintil antara tahun 1975 dan 1979. Sebagian besar insiden ini terjadi pada tahun 1976, dan sebagian besar dilaporkan oleh penduduk desa di distrik Viqueque dan Baucau. Beberapa laporan memberi rincian tentang pelanggaran Fretilin/Falintil pada tahun-tahun setelahnya, termasuk penghancuran rumah penduduk dan bangunan lain dan menjarah di 11 distrik di Timor-Leste. Tidak ada laporan yang diterima dari Liquiça dan Oecusse.

<sup>†</sup> Misalnya kematian seorang anggota Pasukan Tombak, Jacinto Pinto, yang disebut di atas, lihat Pernyataan HRVD 04439.

<sup>†</sup> Lihat misalnya kasus yang disebutkan di atas tentang pembunuhan António Coli dan Celo Soares di pos keamanan kampung pada tahun 1990 oleh pasukan Falintil yang menyerbu [lihat Pernyataan HRVD 06483].

224. Penduduk desa Obulo dan Batumanu (Atsabe, Ermera) mengatakan kepada Komisi bahwa pada tahun 1977 setelah militer Indonesia menyerang dan membakar rumah-rumah di Obulo, sejumlah penduduk desa menyerahkan diri ke ABRI. Setelah itu Falintil menyerang dan membakar rumah-rumah milik penduduk yang menyerah. Pasukan Falintil juga dilaporkan menyerang dan membakar rumah-rumah di Obulo dan Atsabe dan memaksa penduduk desa pergi bersama mereka ke hutan pada bulan Februari 1977. Banyak penduduk sipil yang dibawa pergi menderita kelaparan, penyakit dan kematian.<sup>257</sup>

225. Tampak jelas bahwa ada pasukan Fretilin/Falintil bertanggung jawab atas kerusakan berat dan penderitaan di kalangan penduduk sipil. Namun hal yang tidak jelas adalah apakah kebijakan resmi memerintahkan serangan-serangan atas warga sipil dan harta benda mereka. Fakta bahwa pelanggaran-pelanggaran ini dilakukan di berbagai distrik, dan dalam periode yang berbeda, menunjukkan bahwa paling tidak para pemimpin Falintil pasti mengetahui tentang serangan-serangan tersebut dan tidak mengambil tindakan untuk mencegah serangan-serangan tersebut.

### 7.5.5 Temuan

#### **Temuan-temuan berkaitan dengan angkatan bersenjata Indonesia**

226. Selama invasi Timor-Leste anggota ABRI/TNI melakukan pelanggaran konvensi-konvensi Jenewa secara sistematis dengan tidak membedakan sasaran sipil dan militer. Lebih jauh pada hari-hari awal invasi, penduduk sipil dijadikan sasaran oleh militer Indonesia dalam pembantaian dan eksekusi.

227. Dalam operasi militer skala besar setelah invasi awal, ribuan penduduk sipil Timor-Leste, termasuk laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tidak bersenjata dan tidak mampu melindungi diri mereka sendiri, dijadikan sasaran atau secara sewenang-wenang dibunuh oleh militer Indonesia.

228. Selama operasi-operasi militer anggota ABRI/TNI secara rutin menyiksa dan membunuh penduduk sipil dan tawanan perang yang tertangkap. Tawanan yang dieksekusi termasuk perempuan mengandung dan anak-anak (lihat Bab 7.8: Hak-hak Anak).

229. Anggota ABRI/TNI secara rutin membunuh, menahan dan menyiksa orang-orang yang dicurigai sebagai pendukung Fretilin/Falintil. Hukuman bagi yang menentang pendudukan juga termasuk rumah mereka dibakar, tanah dirampas dan harta benda dibagi-bagikan kepada pendukung politik pendudukan, dan perkosaan perempuan yang dicurigai bekerja sama dengan Resistensi.

230. Anggota ABRI/TNI secara sistematis melanggar kewajiban hukum internasional dengan menggunakan hukuman kolektif terhadap penduduk sipil untuk mencapai tujuan-tujuan militer. Ini termasuk penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan atau pemindahan paksa penduduk sipil karena mereka merupakan anggota keluarga dari atau berasal dari komunitas yang sama dengan orang-orang dicurigai sebagai anggota Fretilin/Falintil.

231. Anggota ABRI/TNI secara sistematis menghancurkan harta benda, termasuk gedung-gedung dan harta pribadi penduduk sipil sebagai bagian rutin operasi militer. Salah satu tujuan penghancuran ini adalah untuk menghukum penduduk Timor-Leste yang menentang pendudukan, dan menciptakan iklim ketakutan yang diharapkan dapat membuat penduduk lebih mudah dikendalikan, dan mencegah dukungan terhadap gerakan pro-kemerdekaan.

232. Penjarahan untuk keuntungan pribadi perwira ABRI/TNI sering menyertai aktifitas mereka selama operasi militer. Ini termasuk mencuri kendaraan yang diangkut ke kapal-kapal perang, pengangkutan kendaraan, barang dan ternak ke Timor Barat untuk dijual, penjarahan

benda-benda tradisional yang tidak ternilai harganya dan tidak bisa digantikan yang memiliki nilai spiritual dan budaya yang penting, dan tindakan-tindakan kejahatan bersenjata pada umumnya terhadap penduduk sipil. Pejabat pemerintah setempat, yang bertindak di bawah perlindungan ABRI/TNI, juga berpartisipasi dalam penjarahan dan pencurian dari warga sipil yang dicurigai menentang pendudukan.

233. Penghancuran dan penjarahan harta benda penduduk sipil sering disertai dengan pelanggaran lain, seperti pemukulan, penahanan, penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan penduduk sipil. Cara umum adalah penjarahan harta benda, pembunuhan penghuni rumah, dan pembakaran rumah dengan korban-korbannya yang masih di dalam. Cara ini digunakan untuk menghukum dan mengintimidasi lawan-lawan pendudukan, dan menghancurkan bukti pelanggaran.

234. Anggota ABRI/TNI secara sistematis menghancurkan sumber-sumber makanan penduduk sipil. Ini termasuk pembakaran tanaman pangan dan pembantaian ternak. Pelanggaran-pelanggaran ini mempunyai akibat yang luar biasa bagi penduduk sipil Timor-Leste dan secara langsung menyebabkan hilangnya nyawa dalam jumlah yang sangat besar pada dekade 1970-an karena kelaparan dan penyakit.

235. ABRI/TNI menggunakan senjata yang dilarang oleh hukum internasional yang mengatur konflik bersenjata dalam operasi militernya di Timor-Leste. Ini termasuk senjata kimia yang meracuni sumber air, membinasakan tanaman pangan dan tanaman lainnya, serta mengakibatkan kematian dengan meracuni penduduk sipil.

236. ABRI/TNI menjatuhkan bom napalm dan alat-alat pembakar yang lain tanpa pandang bulu terhadap sasaran sipil. Penggunaan bom-bom yang tidak sah ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa terhadap penduduk sipil, termasuk kematian dengan pembakaran hidup-hidup penduduk laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tidak bersenjata.

237. ABRI/TNI merekrut paksa ribuan laki-laki, perempuan dan anak-anak Timor-Leste untuk membantu mereka dalam operasi-operasi militer mereka, terutama selama tahun 1975-1979, dan selama periode-periode peningkatan operasi militer, di seluruh penjuru Timor-Leste. Mereka yang menolak berpartisipasi dipukuli dan disiksa. Perekrutan paksa ilegal atas penduduk sipil ke dalam operasi-operasi militer dilakukan untuk mendapatkan bantuan praktis dan murah dan juga meruntuhkan semangat orang-orang yang menentang pendudukan.

238. Penduduk Timor-Leste yang direkrut paksa untuk bergabung dengan unit-unit ABRI/TNI secara rutin dipaksa membawa beban berat berupa makanan, amunisi dan peralatan dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka sering mendapat perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

239. Anggota ABRI/TNI membunuh penduduk sipil Timor-Leste yang dipaksa ikut dalam operasi militer Indonesia, karena masalah ketidakpatuhan dan disiplin.

240. Perempuan muda Timor-Leste yang dipaksa bekerja untuk anggota ABRI/TNI secara rutin diperkosa dan dipaksa hidup dalam perbudakan seksual bagi tuan-tuan militer mereka (lihat Bab 7.7: Pelanggaran Seksual).

241. Banyak pendukung pro-kemerdekaan yang ditangkap atau yang menyerah disiksa kemudian dipaksa melakukan tugas jaga malam atau tugas keamanan lain. Jika mereka gagal dalam menjalankan tugas tersebut mereka semakin disiksa atau mengalami perlakuan buruk. Beberapa pejuang Falintil yang ditangkap dipaksa bertindak sebagai pasukan Indonesia melawan Falintil, hanya dipersenjatai tombak, untuk memastikan agar mereka tidak dapat memberontak melawan komandan ABRI/TNI mereka. Hal ini menempatkan mereka dalam bahaya langsung dalam situasi pertempuran dan mengakibatkan kematian.

242. Dalam sejumlah kasus penduduk Timor-Leste yang dipaksa ikut dalam operasi ABRI/TNI terbunuh oleh Falintil dalam operasi-operasi tersebut.

243. Sebelum Konsultasi Rakyat pada tahun 1999 ABRI/TNI membentuk kelompok-kelompok milisi pro-intergrasi di seluruh wilayah. ABRI/TNI menerapkan program perekrutan paksa terhadap ribuan pemuda Timor-Leste ke dalam kelompok-kelompok ini secara sistematis, disamping mereka yang sudah bergabung secara sukarela dengan imbalan bayaran. Kelompok milisi yang terlibat dalam program kekerasan dan penghancuran yang terorganisir ini dibentuk dengan sengaja, dipersenjatai, dibiayai dan diperintah oleh militer Indonesia. Bukti yang berlimpah mengenai hubungan ini dihabas di Bagian 4: Rejim Pendudukan, dan pertanggungjawaban atas tindakan ini dibahas di Bagian 8: Tanggung Jawab dan Pertanggungjawaban.

244. Anggota ABRI/TNI melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala yang luas dan sistematis, termasuk pelanggaran hukum perang, menjelang Konsultasi Rakyat pada tahun 1999. Pelanggaran ini dibahas secara rinci di bab-bab yang bersangkutan tentang pelanggaran hak asasi manusia, yaitu Bab 7.2.: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa; bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan; Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan dan Perlakuan Buruk; Bab 7.8: Pelanggaran Seksual; Bab 7.9: Hak Ekonomi dan Sosial.

245. Program kekerasan dan penghancuran pada tahun 1999 merupakan serangan sistematis oleh kelompok militer dan milisi dengan senjata lengkap dan terorganisir terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata dan tidak berdaya. Ini tidak melibatkan konflik antara dua kelompok bersenjata, karena Falintil, dengan beberapa pengecualian, tidak terlibat konflik. Ini merupakan aksi militer besar-besaran dengan sasaran penduduk sipil dengan tujuan memaksa mereka memilih tetap bersama Indonesia, dan, setelah hasil diumumkan, menghukum mereka karena tidak menurut. Praktek militer yang menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran ini merupakan pelanggaran hukum perang oleh militer Indonesia.

246. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia dan milisi binaan mereka sepanjang tahun 1999 termasuk:

- Membunuh lebih dari 1.400 penduduk sipil
- Perkosaan dan pelanggaran seksual terhadap ratusan perempuan
- Penyerangan dan pemukulan ribuan penduduk sipil
- Deportasi paksa sekitar 250.000 penduduk sipil dan pemindahan paksa sekitar 300.000 dari wilayah Timor-Leste
- Perekrutan paksa ribuan penduduk Timor-Leste ke dalam kelompok milisi
- Pembakaran lebih dari 60.000 rumah penduduk sipil
- Penjarahan harta benda penduduk sipil dalam skala besar, termasuk hampir semua sepeda motor dan barang buatan pabrik yang tidak ternilai yang dibawa melintas perbatasan ke wilayah Indonesia
- Pencurian dan pembantaian ternak dalam jumlah besar
- Penghancuran secara sengaja sebagian besar infrastruktur publik bukan untuk tujuan militer, termasuk semua rumah sakit, sebagian besar sekolah, instalasi air, generator listrik dan peralatan lain untuk menopang kesejahteraan masyarakat
- Penjarahan benda-benda budaya dan sejarah yang penting dan tidak ada duanya dari museum di Dili pada bulan September 1999, membawa benda-benda ini ke Timor Barat, Indonesia.

### **Temuan mengenai pelanggaran oleh Fretilin/Falintil**

247. Portugal merupakan penguasa administratif Timor-Leste yang diakui oleh PBB selama periode konflik dan selama masa pendudukan Indonesia. Portugal telah meratifikasi Konvensi Jenewa ketiga.

248. Hukum perang berlaku bagi Fretilin/Falintil, yang bisa diakui dalam hukum humaniter internasional sebagai gerakan resistensi karena secara umum memenuhi persyaratan bagi pengakuan semacam itu: Fretilin mempunyai struktur komando; anggotanya pada umumnya membedakan diri dengan penduduk sipil, membawa senjata secara terbuka; dan melakukan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. Fretilin/Falintil karena itu diwajibkan mentaati Konvensi Jenewa.

249. Selama periode pendudukan Indonesia anggota pasukan Fretilin/Falintil terlibat dalam pelanggaran hukum perang, termasuk menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran, pembunuhan, penyiksaan, pembakaran rumah dan perusakan harta benda secara sengaja. Walaupun sangat berat, skala pelanggaran yang dilakukan anggota Fretilin/Falintil merupakan bagian yang kecil dibandingkan pelanggaran yang dilakukan ABRI/TNI.

250. Anggota Fretilin/Falintil membunuh tahanan dari partai politik UDT dan Apodeti dalam tahanan mereka, tidak lama setelah invasi pasukan Indonesia pada akhir tahun 1975 dan awal tahun 1976, dan penduduk sipil di desa Kooleu (Loré I, Lautém) pada bulan Januari 1976.

251. Anggota Fretilin/Falintil mengeksekusi penduduk sipil yang dicurigai menjadi kolaborator pasukan keamanan Indonesia, anggota organisasi mereka sendiri yang dicurigai tidak setia, dan penduduk sipil yang bermaksud untuk menyerah kepada ABRI dan melanggar kebijakan Fretilin bahwa mereka harus tetap bertahan bersama Fretilin/Falintil di gunung. Anggota Fretilin/Falintil juga menahan, menyiksa dan memberikan perlakuan buruk kepada penduduk sipil dan kader politik dan militer Fretilin/Falintil pada dekade 1970-an yang mereka curigai mempunyai pandangan yang menentang kebijakan Fretilin/Falintil terutama dalam kaitannya dengan persoalan apakah penduduk sipil harus meninggalkan basis Fretilin/Falintil di pedalaman dan kembali ke desa-desa dan kota-kota.

252. Anggota Fretilin/Falintil menyiksa dan memberikan perlakuan buruk terhadap penduduk sipil yang dicurigai tidak setia atau bekerja sama dengan militer Indonesia. Cara penyiksaan yang digunakan termasuk menahan orang di lubang bawah tanah, pemukulan, diinjak-injak dan dibakar hidup-hidup.

253. Anggota Fretilin/Falintil menyerang dan membakar rumah-rumah milik penduduk sipil yang menyerah kepada ABRI/TNI, dan mereka yang dicurigai bekerja sama dengan militer Indonesia. Penghancuran ini mengakibatkan kelaparan, penyakit dan penderitaan bagi penduduk sipil, dan serangan-serangan tersebut mengakibatkan kematian penduduk sipil.

---

<sup>1</sup> Peraturan UNTAET 2001/10, Bagian 3 dan 1 (c)

<sup>2</sup> Mário Lemos Pires, kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.

<sup>3</sup> Wawancara, CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004

<sup>4</sup> Lihat APV Rogers, *Law on the Battlefield* (Edisi kedua), Manchester, Manchester University Press, 2004, hal. 3-23.

<sup>5</sup> Artikel 25 Peraturan Den Hague; Artikel 27 Konvensi Jenewa IV; Artikel 51 (2) dan 57 (1) dan 2 (a) Protokol Jenewa I; Artikel 52 (1) Protokol Jenewa I.

<sup>6</sup> Artikel 51 (2) Protokol Jenewa I.

<sup>7</sup> Artikel 51 (4) Protokol Jenewa; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1986) ICJ Report paragraf 78.

<sup>8</sup> Artikel 51 (5)(b) dan Artikel 57 (2)(a)(iii) dan (b) Protokol Jenewa I

<sup>9</sup> Artikel 57 (3) Protokol Jenewa I.

<sup>10</sup> Artikel 26 Peraturan Den Hague; Artikel 57 (c) Protokol Jenewa I.

<sup>11</sup> Lihat misalnya, Pernyataan HRVD 00691; 01301; 01466; 06699; 06976; 08149 dan 04200.

<sup>12</sup> Pernyataan HRVD 00445.

<sup>13</sup> Pernyataan HRVD 08200.

<sup>14</sup> Pernyataan HRVD 02406.

<sup>15</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Laimea Kraik, Sub-distrik Atsabe, Distrik Ermera, 20 Agustus 2003.

<sup>16</sup> Lihat misalnya, Dokumen Riset CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, Arsip CAVR; Profil Komunitas CAVR, Sub-distrik Maubisse, Distrik Ainaro, Mei-Agustus 2003.

<sup>17</sup> Wawancara CAVR dengan Agustino Soares, Hatulia, Ermera, 13 Agustus 2003.

<sup>18</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Muapitine, Sub-distrik Lospalos, Distrik Lautém, 18 Februari 2004.

<sup>19</sup> Wawancara CAVR dengan mantan tentara ABRI/TNI di Same (nama dirahasiakan), 13 Agustus 2004.

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Maria José da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.

<sup>22</sup> Lihat misalnya Profil Komunitas CAVR, Desa Atara dan Salaun, Sub-distrik Atsabe, Distrik Ermera, 14 April 2003; Profil Komunitas CAVR, Desa Maununo, Sub-distrik Ainaro, Distrik Ainaro, 24 Januari 2003.

<sup>23</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Aiasa, Bobonaro dan Malilait, Sub-distrik Bobonaro, Distrik Bobonaro, 17 Desember 2003.

- 
- <sup>24</sup> Wawancara CAVR dengan Adriano João, mantan asisten politik Fretilin untuk Zona Cailaco (Bobonaro) antara tahun 1975 dan 1979, Dili, 6 September 2004.
- <sup>25</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Aidantuik, Sub-distrik Suai, Distrik Covalima, 1 Desember 2003
- <sup>26</sup> Pernyataan HRVD 00432.
- <sup>27</sup> Lihat misalnya Profil Komunitas CAVR, Desa Tirilolo, Sub-distrik Iliomar, Distrik Lautem, 8 Juli 2003; Profil Komunitas CAVR, Desa Lelalai, Sub-distrik Quelicai, Distrik Baucau, 20 Oktober 2003; Profil Komunitas CAVR, Desa Maluro, Sub-distrik Quelicai, Distrik Baucau, 27 Oktober 2003; Desa Uailili, Sub-distrik Baucau, Distrik Baucau, 28 Oktober 2003; dan Desa Baduholo dan Uai-Kana, Sub-distrik Venilale, Distrik Baucau, CAVR, 6 Mei 2003.
- <sup>28</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Defawasi, Sub-distrik Baguia, Distrik Baucau, 23 September 2003.
- <sup>29</sup> Misalnya, lihat Profil Komunitas CAVR, Desa Raihun, Sub-distrik Tilomar, Distrik Covalima, 21 Oktober 2003.
- <sup>30</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Asbilitoho, Sub-distrik Lquidoe, Distrik Aileu, 3 September 2003.
- <sup>31</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Orlalan, Sub-distrik Laclubar, Distrik Manatuto, 24 Agustus 2003.
- <sup>32</sup> Wawancara CAVR dengan Albino da Costa, Dili, Juni 2003.
- <sup>33</sup> *Asian Wall Street Journal*, "Is There Enough to Eat in East Timor?", 21 Juni 1982.
- <sup>34</sup> Xanana Gusmão, Pesan kepada Sidang Umum PBB ke-37, di Niner, hal. 81.
- <sup>35</sup> Wawancara CAVR dengan Silvino das Dores Soares, Viqueque, 10 Maret 2004; dan António Soares (tidak ada tanggal). Lihat juga José Gomes, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, 19-21 November 2003.
- <sup>36</sup> CAVR, Wawancara dengan Silvino das Dores Soares, Viqueque, 10 Maret 2004
- <sup>37</sup> CAVR, Wawancara dengan Gerónimo da Costa Amaral, Viqueque, 10 Maret 2004.
- <sup>38</sup> J. Henckaerts and L. Doswald-Beck, *ICRC's Customary International Humanitarian Law, Vol I: Rules* , (2005) hal 46
- <sup>39</sup> Lihat Bank Dunia, Final Report of the Joint Assessment Mission to East Timor, 8 Desember 1999, Arsip CAVR. Lihat juga Bagian 3: Sejarah konflik.
- <sup>40</sup> CAVR, Wawancara dengan Rui Emeliano Texeira Lopes, Suai, Covalima, Maret 2003.
- <sup>41</sup> CAVR, Wawancara dengan Santana de Jesus Soares Ly, mantan OPMT Koordinator Baucau pada tahun 1975, Baucau, 10 Oktober 2003.
- <sup>42</sup> Pernyataan HRVD 01741.
- <sup>43</sup> Pernyataan HRVD 00941; 03558; 02167; 0913; 01043; 09471 dan 06443; dan Profil Komunitas CAVR: Desa Ponilala, Poetete dan Mirtutu, Sub-distrik Ermera, Distrik Ermera, 19-21 Januari 2004.
- <sup>44</sup> Pernyataan HRVD 03855 dan 04216.
- <sup>45</sup> Pernyataan HRVD 02246; 02256 dan 00704.
- <sup>46</sup> Pernyataan HRVD 07171
- <sup>47</sup> Pernyataan HRVD 03892
- <sup>48</sup> Album Kenangan Perjuangan Siliwangi [no informasi bibliografik], hal. 601.
- <sup>49</sup> Pernyataan HRVD 04044.
- <sup>50</sup> Pernyataan HRVD 01182.
- <sup>51</sup> Pernyataan HRVD 03116.

- 
- <sup>52</sup> Pernyataan HRVD 02589.
- <sup>53</sup> Pernyataan HRVD 02406.
- <sup>54</sup> Pernyataan HRVD 05011.
- <sup>55</sup> Pernyataan HRVD 01352.
- <sup>56</sup> Pernyataan HRVD 0983.
- <sup>57</sup> Pernyataan HRVD 01120; 06777; 05643 dan 03663
- <sup>58</sup> Pernyataan HRVD 00512.
- <sup>59</sup> Pernyataan HRVD 00512.
- <sup>60</sup> Pernyataan HRVD 07774.
- <sup>61</sup> Pernyataan HRVD 03852.
- <sup>62</sup> Pernyataan HRVD 01348; 04928; 04045 dan 05412.
- <sup>63</sup> Pernyataan HRVD 04178.
- <sup>64</sup> Pernyataan HRVD 02044; 06322 dan 06288
- <sup>65</sup> Pernyataan HRVD 03503 dan 01063
- <sup>66</sup> Pernyataan HRVD 02317; 03111; 04181; 06074 dan 07363.
- <sup>67</sup> Pernyataan HRVD 02813.
- <sup>68</sup> Lihat misalnya, Pernyataan HRVD 01348
- <sup>69</sup> Pernyataan HRVD 02254 dan 01649
- <sup>70</sup> Pernyataan HRVD 04045.
- <sup>71</sup> Pernyataan HRVD 04901; 07235; 07253; 07238; 07085; 03876; 00584 dan 07791
- <sup>72</sup> Pernyataan HRVD 03695; 08037;09120; 03602; 01022; 05079; 01022; 01702; 08042; 00918; 00298; 00966; 03504; 08042; 00918; 00298; 00966; 03504; 05450; 04599; 04712; 06487; 00625 dan 07527.
- <sup>73</sup> Pernyataan HRVD 0797
- <sup>74</sup> Pernyataan HRVD 00427.
- <sup>75</sup> Pernyataan HRVD 04334 dan 08217
- <sup>76</sup> Pernyataan HRVD 03462.
- <sup>77</sup> Pernyataan HRVD 05621 dan 02294
- <sup>78</sup> Pernyataan HRVD 03366.
- <sup>79</sup> Pernyataan HRVD 01985.
- <sup>80</sup> Pernyataan HRVD 01262; 08531; 04285, 05684
- <sup>81</sup> Pernyataan HRVD 03845.
- <sup>82</sup> Pernyataan HRVD 08077 dan 08044.
- <sup>83</sup> Pernyataan HRVD 02520; 06248; 08375; 08342 06418; 06369; 06408; 02512 dan 08290.
- <sup>84</sup> ETHRC, 28 Februari 1999, “Escalating Violation in East Timor: Is a Peaceful Solution Possible?” Lihat juga Pernyataan HRVD 01531; 01581; 01583; 01603 dan 01518.
- <sup>85</sup> Pernyataan HRVD 09022.
- <sup>86</sup> Pernyataan HRVD 00456; 02326; 00082; 05881; 00289 dan 02990.

- 
- <sup>87</sup> Pernyataan HRVD 00082.
- <sup>88</sup> Pernyataan HRVD 02573 dan 04240. Lihat juga, Profil Komunitas CAVR, Desa Lebos-Gidapil, Sub-distrik Lolotoe, Distrik Bobonaro, 9 September 2003.
- <sup>89</sup> Pernyataan HRVD 00561.
- <sup>90</sup> Pernyataan HRVD 00449; 00458 dan 00427.
- <sup>91</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Liurai, Sub-distrik Turisca, Distrik Manufahi, 17 September 2003.
- <sup>92</sup> Pernyataan HRVD 02024; 02034; 08463; 06313; 06324 dan 05138. Lihat juga Profil Komunitas CAVR, Desa Faholulik, Sub-distrik Tilomar, Distrik Covalima, 21 Oktober 2003.
- <sup>93</sup> Pernyataan HRVD 03510, 08385 dan Profil Komunitas CAVR, Desa Atara dan Salaun, Sub-distrik Atsabe, Distrik Ermera, 14 April 2003
- <sup>94</sup> Pernyataan HRVD 09031 dari mantan pemimpin milisi, Belu, Timor Barat Indonesia 25 April 2003.
- <sup>95</sup> Lihat misalnya Pernyataan HRVD 00309.
- <sup>96</sup> Lihat misalnya Pernyataan HRVD 02950.
- <sup>97</sup> Lihat misalnya, Pernyataan HRVD 03685; 01239; 01208 dan 01239
- <sup>98</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Atara dan Salaun, Sub-distrik Atsabe, Distrik Ermera, 14 April 2003
- <sup>99</sup> Pernyataan HRVD 02835
- <sup>100</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Costa, Sub-distrik Pante Makasar, Distrik Oecusse, 16 Februari 2004.
- <sup>101</sup> Pernyataan HRVD 02632.
- <sup>102</sup> Pernyataan HRVD 02930.
- <sup>103</sup> CAVR Interview with Manuel Cárceres da Costa, UNHCR Repatriation/Protection Assistant, Dili, 25 November 2002.
- <sup>104</sup> Lihat Bank Dunia, Final Report of the Joint Assessment Mission to East Timor, 8 Desember 1999. Arsip CAVR.
- <sup>105</sup> Pernyataan HRVD 01101; 08303; 08312 dan 08314. Lihat juga Profil Komunitas CAVR: Desa Leimea Kraik dan Samara, Sub-distrik Hatulia, Distrik Ermera, 20 Agustus 2003; Desa Ponilala, Poetete dan Mirtutu, Sub-distrik Ermera, Distrik Ermera, 19-21 Januari 2004; Desa Lihu dan Railaco Kraik, Sub-distrik Railaco, Distrik Ermera, 20 Februari 2003, Desa Lacro dan Paramin, Sub-distrik Atsabe, Distrik Ermera, 26 Juni 2003; Desa Eraulo, Sub-distrik Letefoho, Distrik Ermera, 2 Desember 2002; dan Desa Hatugau, Sub-distrik Letefoho, Distrik Ermera, 14 Oktober 2002.
- <sup>106</sup> Pernyataan HRVD 05271 dan 08282.
- <sup>107</sup> Pernyataan HRVD 04079.
- <sup>108</sup> Pernyataan HRVD 07747; 07811; 03908 dan 07089. Lihat juga Profil komunitas CAVR, Desa Gurusa, Sub-distrik Quelicai, Distrik Baucau, 21 November 2003.
- <sup>109</sup> Pernyataan HRVD 04194 dan 04129. Lihat juga Profil Komunitas CAVR: Desa Ahic, Dilor, Sub-Distrik Lacluta, Distrik Viqueque, 22 November 2002; Desa Luca, Sub-distrik Viqueque, Distrik Viqueque, 10 Juni 2003; dan Desa Uaibobo, Sub-distrik Ossu, Distrik Viqueque.
- <sup>110</sup> Pernyataan HRVD 05173; 06351; 02046; 06263 dan 08560.
- <sup>111</sup> Pernyataan HRVD 02807, 02828 dan 02630. Lihat juga Profil Komunitas CAVR, Desa Bobometo, Sub-distrik Oesilo, Distrik Oecusse, 31 Mei 2003.
- <sup>112</sup> Lihat misalnya, Pernyataan HRVD 02930, 00853 dan 00859; dan Profil Komunitas CAVR, Desa Usitaqeno, Sub-distrik Oesilo, Distrik Oecusse, 24 Juli 2003; Desa Suni Ufe, Sub-distrik Nitibe, Distrik Oecusse, 17 Januari 2003.

- 
- <sup>113</sup> Pernyataan HRVD 0831.
- <sup>114</sup> Pernyataan HRVD 02418.
- <sup>115</sup> Pernyataan HRVD 0140; 01391; 01392; 01307; 01312; 01334; 01335; 01381; 01382; 01392 dan 03310
- <sup>116</sup> Lihat, misalnya, Profil Komunitas CAVR dari: Desa Asbilitoho, Desa Asbilitoho, Desa Asumano dan Desa Manukasa yang diambil di Sub-distrik Liquidoe, Distrik Aileu, antara tanggal 11 Juli dan 3 September 2003.
- <sup>117</sup> Artikel 4 Konvensi Jenewa III; Artikel 44 (1), (3) dan (4) Protokol Jenewa I. (Ini termasuk penempur yang sakit atau terluka: Artikel 14 Konvensi Jenewa I).
- <sup>118</sup> Artikel 4A Konvensi Jenewa III.
- <sup>119</sup> CAVR, Wawancara dengan Jacinto Alves, mantan asisten Kepala Staff Falintil, Dili, 3 Mei 2005.
- <sup>120</sup> Artikel 5 Konvensi Jenewa III; Artikel 45 (1) Protokol Jenewa I.
- <sup>121</sup> Artikel 4 Peraturan Den Hague; artikel 13 Konvensi Jenewa III.
- <sup>122</sup> Artikel 13 dan 17 Konvensi Jenewa III
- <sup>123</sup> Artikel 15, 26, 30 Konvensi Jenewa III.
- <sup>124</sup> Artikel 19 dan 23 Konvensi Jenewa III.
- <sup>125</sup> Artikel 5 Konvensi Jenewa IV
- <sup>126</sup> Carmel Budiardjo & Kiem Soei Liong, *The War Against East Timor*, Documen 8 Komando Distrik Militer XVI, Udayana, Prosedur Baku Interogasi Tahanan, PROTAP/01-B/VII/1982.
- <sup>127</sup> Pernyataan HRVD 01440 dan 06571. Lihat juga Profil Komunitas CAVR, Desa Fatuloro, Sub-distrik Fatululik, Distrik Covalima, 20 November 2002; Desa Tapo, Sub-distrik Maliana, Distrik Bobonaro, 24 November 2003.
- <sup>128</sup> Pernyataan HRVD 0485. Lihat juga Profil Komunitas CAVR, Desa Tapo, Sub-distrik Maliana, Distrik Bobonaro, 24 November 2003.
- <sup>129</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Lifau, Sub-distrik Laleia, Distrik Manatuto, 17 Juni 2003
- <sup>130</sup> CAVR, Wawancara dengan Zeferino Armanda Ximenes (tanpa tanggal)
- <sup>131</sup> Pernyataan HRVD 07331 dan 05069.
- <sup>132</sup> Misalnya, Pernyataan HRVD 00716.
- <sup>133</sup> Pernyataan HRVD 06515.
- <sup>134</sup> Pernyataan HRVD 01267.
- <sup>135</sup> Artikel 22 Peraturan Den Hague; Artikel 35 (1) Protokol Jenewa I; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1986) Laporan ICJ paragraf 77.
- <sup>136</sup> Deklarasi St Petersburg 1868; Artikel 23 Peraturan Den Hague; Artikel 35(2) Protokol Jenewa I; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1986) Laporan ICJ paragraf 78.
- <sup>137</sup> Artikel 51(4) Protokol Jenewa I; *Advisory Opinion on the Threat or Use of Nuclear Weapons* (1986) Laporan ICJ paragraf 78.
- <sup>138</sup> Lihat juga Artikel 54 (2) Protokol Jenewa I
- <sup>139</sup> Lihat juga Artikel 54 (1) Protokol Jenewa I
- <sup>140</sup> Prosedur Operasional Resmi, No. PROTAP/3/IV/1988, Kemampuan Pesawat Taktis, 30 April 1988, Angkatan Bersenjata Indonesia, Komando Operasi Keamanan Timor Timur.

- 
- <sup>141</sup> Prosedur Operasional Resmi, No. PROTAP/3/IV/1988, Kemampuan Amunisi dan Jarak Jangkauan, 30 April 1988, Angkatan Bersenjata Indonesia, Komando Operasi Keamanan Timor Timur.
- <sup>142</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Maneluma, Sub-distrik Laulara, Distrik Aileu, 12 Desember 2002.
- <sup>143</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Laclo dan Paramin, Sub-distrik Atsabe, Distrik Ermera, 16 Juni 2003.
- <sup>144</sup> Ibid
- <sup>145</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Atara dan Lasaun, Sub-distrik Atsabe, Distrik Ermera, 14 April 2003
- <sup>146</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Guololo, Sub-distrik Letefoho, Distrik Ermera, 25 November 2003
- <sup>147</sup> CAVR, Wawancara dengan Augusto Soares di Hatulia, Ermera, 13 Agustus 2003.
- <sup>148</sup> Ibid
- <sup>149</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Bora dan Manelima, Sub-distrik Laclubar, Distrik Manatuto, 3 September 2003.
- <sup>150</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Kakae Uman, Sub-distrik Natarbora/Barique, Distrik Manatuto, 11 April 2003.
- <sup>151</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Guruça, Sub-distrik Quelicai, Distrik Baucau, 21 November 2003
- <sup>152</sup> Profil Komunitas CAVR di Desa Darulete, Sub-distrik Liquiça, Distrik Liquiça 13 Februari 2003; Desa Leimea Kraik dan Samara, Sub-distrik Hatulia, Distrik Ermera, 20 Agustus 2003; Desa Souro, Sub-distrik Lospalos, Distrik Lautém 24 Februari 2004; Desa Lebos dan Guldapil, Sub-distrik Lolotoe, Distrik Bobonaro 9 September 2003; Desa Fatuloro, Sub-distrik Faululik, Distrik Covalima 21 November 2002; dan Desa Lifau, Sub-distrik Laleia, Distrik Manatuto, 17 Juni 2003.
- <sup>153</sup> CAVR, Wawancara dengan Lucas da Costa Xavier, mantan tentara ABRI/TNI, Same Manufahi, 13 Agustus 2004.
- <sup>154</sup> Prosedur Operasional Resmi, No. PROTAP/3/IV/1988, Kemampuan Pesawat Taktis, 30 April 1988, Angkatan Bersenjata Indonesia, Komando Operasi Keamanan Timor Timur.
- <sup>155</sup> Conboy, hal. 276
- <sup>156</sup> Film dokumenter militer Indonesia, diperoleh Komisi dari sumber rahasia, Jakarta 2005. Arsip CAVR.
- <sup>157</sup> Protokol tentang Larangan dan Pembatasan pemakaian Senjata Pembakar 1980.
- <sup>158</sup> Wawancara CAVR dengan Adriano João, Dili, 21 September 2004.
- <sup>159</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Obulo dan Butamanu, Sub-distrik Atsabe, Distrik Ermera, 13 Mei 2003.
- <sup>160</sup> Artikel 23 Peraturan Den Hague.
- <sup>161</sup> Artikel 51 Konvensi Jenewa IV.
- <sup>162</sup> Artikel 51 Konvensi Jenewa IV.
- <sup>163</sup> Pernyataan HRVD 02491.
- <sup>164</sup> Pernyataan HRVD 05720.
- <sup>165</sup> Pernyataan HRVD 03412.
- <sup>166</sup> Pernyataan HRVD 01105.
- <sup>167</sup> Pernyataan HRVD 04012.
- <sup>168</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Guruça, Sub-distrik Quelicai, Distrik Baucau, 21 November 2003
- <sup>169</sup> Pernyataan HRVD 05685.
- <sup>170</sup> Lihat Pernyataan HRVD 07752, dan Profil Komunitas CAVR, Desa Mehara, Sub-distrik Tutuala, Distrik Lautém, 27 November 2002.

- 
- <sup>171</sup> Lihat misalnya Pernyataan HRVD 06081.
- <sup>172</sup> Lihat misalnya, Profil Komunitas CAVR di Desa Leber, Sub-distrik Bobonaro, Distrik Bobonaro, 24 November 2003; Desa Guda, Sub-distrik Lolotoe, Distrik Bobonaro, 26 Agustus 2003; Desa Leohito, Sub-distrik Balibo, Distrik Bobonaro 21 Januari 2004; dan Desa Lourba, Sub-distrik Bobonaro, Distrik Bobonaro 25 Januari 2003.
- <sup>173</sup> Pernyataan HRVD 08365.
- <sup>174</sup> Pernyataan HRVD 03403.
- <sup>175</sup> Lihat misalnya, Pernyataan HRVD 04763.
- <sup>176</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Defa-Uasi, Sub-distrik Baguia, Distrik Baucau, 23 September 2003.
- <sup>177</sup> Pernyataan HRVD 03101.
- <sup>178</sup> Pernyataan HRVD 01071.
- <sup>179</sup> Profil Komunitas CAVR di Desa Bibileo, Sub-distrik Viqueque, Distrik Viqueque, 5 Juni 2003; Desa Irabin de Baixo, Sub-distrik Watu-Carbau, Distrik Viqueque, 26 Agustus 2003; Desa Assu da Cima, Sub-distrik Ossu, Distrik Viqueque, 20 Maret 2003; dan Desa Manulesu, Sub-distrik Liquidoe, Distrik Aileu, 27 Agustus 2003.
- <sup>180</sup> Pernyataan HRVD 03135.
- <sup>181</sup> Pernyataan HRVD 03093.
- <sup>182</sup> Pernyataan HRVD 03421.
- <sup>183</sup> Pernyataan HRVD 00168.
- <sup>184</sup> Pernyataan HRVD 01990.
- <sup>185</sup> Pernyataan HRVD 03963.
- <sup>186</sup> Pernyataan HRVD 03474.
- <sup>187</sup> Pernyataan HRVD 06044.
- <sup>188</sup> Pernyataan HRVD 04351.
- <sup>189</sup> Pernyataan HRVD 05687.
- <sup>190</sup> Instruksi – Operasi No. INSOP/03/II/1982
- <sup>191</sup> Lihat misalnya Profil Komunitas CAVR, Desa Asumano, Sub-distrik Liquidoe, Distrik Aileu, 11 Juli 2003.
- <sup>192</sup> Instruksi – Operasi No. INSOP/03/II/1982, hal. 8
- <sup>193</sup> Conboy, hal. 298
- <sup>194</sup> Lihat Korps Marinir TNI AL, 1970-2000, Departemen Penerangan Marinir, Jakarta, 2000, hal. 274
- <sup>195</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Lelalai, Sub-distrik Quelicai, Distrik Baucau, 20 Oktober 2003.
- <sup>196</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Muapetini, Sub-distrik Lospalos, Distrik Lautém, 18 Februari 2004.
- <sup>197</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Rasa, Sub-distrik Lospalos, Distrik Lautém, 1 Juli 2004.
- <sup>198</sup> Pernyataan HRVD 06057.
- <sup>199</sup> Pernyataan HRVD 05224.
- <sup>200</sup> Kepala Intelejen Mayor Willem Da Costa, Petunjuk Teknis Tentang kegiatan Babinsa, [Juknis /06/IV/1982), 10 September 1982. Budiardjo dan Liem, *The War Against East Timor*, Zed Books, 1984, hal. 201.

- 
- <sup>201</sup> Pernyataan HRVD 04107.
- <sup>202</sup> Pernyataan HRVD 05040.
- <sup>203</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Uaitame, Sub-distrik Quelicai, Distrik Baucau, 12 Desember 2003.
- <sup>204</sup> Lihat misalnya, Profil Komunitas CAVR, Desa Fahisoi, Sub-distrik Remexio, Distrik Aileu, 29 Mei 2003.
- <sup>205</sup> Pernyataan HRVD 03465.
- <sup>206</sup> Pernyataan HRVD 04071.
- <sup>207</sup> Pernyataan HRVD 01022.
- <sup>208</sup> Lihat misalnya Pernyataan HRVD 03252.
- <sup>209</sup> Pernyataan HRVD 04756.
- <sup>210</sup> Pernyataan HRVD 02283.
- <sup>211</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Mehara, Sub-distrik Tutuala, Distrik Lautém, 21 November 2003.
- <sup>212</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Bibileo, Sub-distrik Viqueque, Distrik Viqueque, 5 Juni 2003.
- <sup>213</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Uairoke, Sub-distrik Luro, Distrik Lautém, 7 Oktober 2003; Desa Mehara, Sub-distrik Tutuala, Distrik Lautém, 11 November 2002.
- <sup>214</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Mehara, Sub-distrik Tutuala, Distrik Lautém, 27 November 2002
- <sup>215</sup> Pernyataan HRVD 05317; 05365 dan 05389.
- <sup>216</sup> Pernyataan HRVD 04129.
- <sup>217</sup> Pernyataan HRVD 00155.
- <sup>218</sup> Pernyataan HRVD 05316.
- <sup>219</sup> Pernyataan HRVD 04439.
- <sup>220</sup> Lihat misalnya Pernyataan HRVD 04251 dan 06817.
- <sup>221</sup> Pernyataan HRVD 01429 dan 07696.
- <sup>222</sup> Pernyataan HRVD 04386.
- <sup>223</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Guruça, Sub-distrik Quelecai, Distrik Baucau, 21 November 2003.
- <sup>224</sup> Pernyataan HRVD 01036.
- <sup>225</sup> Pernyataan HRVD 05825 dan 01313.
- <sup>226</sup> Pernyataan HRVD 04793 dan 01752.
- <sup>227</sup> Pernyataan HRVD 03078.
- <sup>228</sup> Pernyataan HRVD 07665.
- <sup>229</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Bualale, Sub-distrik Quelecai, Distrik Baucau, 16 Desember 2003.
- <sup>230</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Namalesu, Sub-distrik Liquidoe, Distrik Aileu, 27 Agustus 2003
- <sup>231</sup> Lihat misalnya Pernyataan HRVD 00638 dan 00427.
- <sup>232</sup> Lihat misalnya, Profil Komunitas CAVR, Desa Uaimori, Tula, Sub-distrik Viqueque, Distrik Viqueque, 19 Juni 2003.
- <sup>233</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Bibileo, Sub-distrik Viqueque, Distrik Viqueque, 5 Juni 2003.
- <sup>234</sup> Pernyataan HRVD 06483.

- 
- <sup>235</sup> Pernyataan HRVD 03408 dan 04748.
- <sup>236</sup> Pernyataan HRVD 06293; 00762 dan 01425.
- <sup>237</sup> Pernyataan HRVD 02934; 018958 dan 00243.
- <sup>238</sup> António Serpa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
- <sup>239</sup> CAVR, Wawancara dengan Humberto Martins da Cruz (tanpa tanggal)
- <sup>240</sup> Ibid; lihat juga pernyataan HRVD 09081.
- <sup>241</sup> Francisco Guterres “Lú-Olo”, kesaksian dalam kapasitasnya sebagai Presiden Fretilin, dan kesaksian Mari Alkatiri dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Fretilin, pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
- <sup>242</sup> Francisco Xavier do Amaral, Ibid
- <sup>243</sup> Angelo Araújo, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, 19-21 November 2003.
- <sup>244</sup> CAVR, Wawancara dengan Brigadier General Taur Matan Ruak, Dili, 9 June 2004
- <sup>245</sup> CAVR, Wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004
- <sup>246</sup> CAVR, Wawancara dengan Agostinho Boavida Ximenes (Sera Malik), Soe, Timor Barat, Indonesia, 28 Agustus 2004.
- <sup>247</sup> CAVR, Wawancara dengan José da Conceição, Kupang, Timor Barat, Indonesia, 24 Agustus 2004.
- <sup>248</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Faturasa, Sub-distrik Remexio, Distrik Aileu, 20 Juni 2003.
- <sup>249</sup> CAVR, Wawancara dengan Lucas da Costa, Dili, 21 Juni 2004.
- <sup>250</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Fahisoí, Sub-distrik Remexio, Distrik Aileu, 29 Mei 2003.
- <sup>251</sup> Profil Komunitas CAVR, Desa Guruça, Sub-distrik Quelicai, Distrik Baucau, 21 November 2003
- <sup>252</sup> CAVR, Wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
- <sup>253</sup> Xanana Gusmão, *Timor-Leste: Um Povo Uma Pátria*, Edições Colibri, 1994, hal. 31.
- <sup>254</sup> Ibid.
- <sup>255</sup> Lihat misalnya Pernyataan HRVD 04149.
- <sup>256</sup> Pernyataan HRVD 07612.
- <sup>257</sup> Lihat Profil Komunitas CAVR dari sub-distrik-sub-distrik tersebut. Arsip CAVR.